



RKPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Seram Bagian Timur



ABD. MUKTI KELIOBAS
Bupati

IDRIS RUMALUTUR
Wakil Bupati

Prepared by: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan pengembangan





BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
DPO	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menciptakan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

Pasal 2

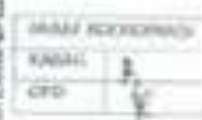
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
- Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

MIRNAWATI DERLEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2024 NOMOR 565

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Grafik	xiv
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	10
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.5 Sistematika RKPD.....	12
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 Kondisi Umum Daerah	1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi.....	1
2.1.1.1 Aspek Geografi	1
2.1.1.2 Aspek Demografi	11
2.1.1.2.1 Penduduk	11
2.1.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk	13
2.1.1.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	14
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	15
1. Pertumbuhan PDRB	15
1) Struktur Ekonomi	15
2) Pertumbuhan Ekonomi	19
3) PDRB Per Kapita	21
2. Pertumbuhan dan Peran PDRB Seram Bagian Timur	
Menurut Lapangan Usaha	21
3. Kemiskinan	32
4. Indeks Pembangunan Manusia	33
4.1 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten	
Seram Bagian Timur	33
4.2 Disparitas Pembangunan Manusia	34
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	35
2.1.2.2.1 Pendidikan	35
2.1.2.2.2 Kesehatan	36
2.1.2.2.3 Pemuda dan Olahraga	39
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	40
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan	
dengan Pelayanan Dasar	41
1. Urusan Pendidikan	41



2. Urusan Kesehatan	47
3. Urusan Pekerjaan Umum dan PR	52
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	53
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	58
6. Urusan Sosial	60
2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	61
1. Urusan Tenaga Kerja	61
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62
3. Urusan Ketahanan Pangan	65
4. Urusan Lingkungan Hidup	68
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71
8. Urusan Perhubungan	72
9. Urusan Komunikasi dan Informatika	73
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	73
11. Urusan Penanaman Modal	74
12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga	75
13. Urusan Statistik	76
14. Urusan Kebudayaan	76
15. Urusan Perpustakaan	77
16. Urusan Kearsipan	78
2.1.3.3. Fokus Urusan Pilihan	79
1. Urusan Perikanan	79
2. Urusan Pertanian	81
3. Urusan Kehutanan	84
4. Urusan Perdagangan	85
5. Urusan Transmigrasi	86
2.1.3.4. Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	86
1. Urusan Perencanaan	86
2. Urusan Keuangan	87
3. Urusan Pengawasan	88
4. Urusan Kepegawaian	89
5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	91
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	92
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	92
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah	96
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	101
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	102



2.15. Standar Pelayanan Minimal	105
1. Pendidikan	105
2. Kesehatan	106
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	109
6. Sosial	110
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	111
2.3. Permasalahan Pembangunan	378
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	378
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	381
A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan pelayanan Dasar	381
1. Pendidikan	381
2. Urusan Kesehatan	382
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	383
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	383
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	384
6. Urusan Sosial	384
B. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	384
1. Urusan Tenaga Kerja	384
2. Urusan Penanaman Modal	385
3. Urusan kepemudaan dan Olahraga	385
4. Urusan Kebudayaan	386
5. Urusan Perpustakaan	386
6. Urusan Kearsipan	386
7. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	387
8. Urusan Statistik	387
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	387
10. Urusan Pangan	388
11. Urusan Pertanahan	388
12. Urusan Lingkungan Hidup	388
13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	389
14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	389
15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	390



16. Urusan Perhubungan	390
17. Urusan Komunikasi dan Informatika	391
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan	391
1. Urusan Kelautan dan Perikanan	391
2. Urusan Pariwisata	392
3. Urusan Pertanian	393
4. Urusan Perdagangan	393
D. Penunjang Urusan Pemerintah	394
1. Administrasi Pemerintahan	394
2. Urusan perencanaan	395
3. Urusan Keuangan	395
4. Urusan Pengawasan	396
5. Urusan Kepegawaian	396
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	1
3.1.1 Asumsi Kebijakan Ekonomi Nasional	1
A. Evaluasi Pembangunan Tahun 2023	1
B. Prakiraan Tahun 2024	4
C. Perencanaan Tahun 2025	4
3.1.2 Asumsi Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku	7
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	9
A. Struktur Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur	10
B. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur	13
C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur	17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	23
3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah	27
3.5 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025	6
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	6
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025	7
4.2.3. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	7
4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	13
A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025	13
B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.	13
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Taun 2025	16



4.3. Kebijakan Pembangunan	33
4.3.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	33
A. Wilayah Pengembangan	35
B. Sistem Perkotaan	37
C. Rencana Sistem perkotaan dan Perdesaan	41
D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan	42
E. Rencana sistem Kawasan Perdesaan	44
F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan	44
4.3.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang	46
A. Rencana Kawasan Lindung	46
B. Rencana Hutan Lindung	47
C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Bawahannya	47
D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat	47
E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam	49
F. Kawasan Rawan Bencana Alam	50
G. Rencana Kawasan Lindung Geologi	52
H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya	52
I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	53
J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	55
K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	58
L. Kawasan Peruntukan Pertanian	58
M. Kawasan Peruntukan Perkebunan	60
N. Kawasan Peruntukan Perikanan	63
O. Kawasan Peruntukan Pertambangan	66
P. Kawasan Peruntukan Industri	69
Q. Kawasan Pariwisata	70
R. Rencana Kawasan Pengembangan Kawasan Permukiman	73
BAB.V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024	1
5.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2025	1
5.2. Rencana Program dan kegiatan yang Bersumber dari APBD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025	9
5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	40
BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	1
6.1. Penetapan Indikator dan Target Umum (Makro)	2
6.2. Indikator Kinerja Utama	3
6.3. indikator Kinerja Kunci	4
BAB. VII PENUTUP	1



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Hal
II.1.	Luas Wilayah Daratan Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan	2
II.2.	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	2
II.3.	Jarak Tempuh dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur	3
II.4.	Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur	4
II.5.	Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023	10
II.6.	Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023	10
II.7.	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023	11
II.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Kecamatan Tahun 2029 – 2023	11
II.9.	Jumlah Penduduk, Rata-rata Kepadatan dan Komposisi menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023	12
II.10.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2023	13
II.11.	Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023	14
II.12.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)	16
II.13.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019–2023	17
II.14.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019 – 2023	18
II.15.	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	20
II.16.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023	21
II.17.	Peranan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	22
II.18.	Nilai PDRB ADHB Kategori Pertambangan dan Penggalian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Milyar) Tahun 2019 – 2023	23
II.19.	Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	23
II.20.	Peranan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	24
II.21.	Peranan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	25
II.22.	Peranan Kategori Konstruksi di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023	25
II.23.	Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	26
II.24.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	26
II.25.	Peranan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	27



No Tabel	Judul	Hal
II.26.	Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	28
II.27.	Peranan Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	28
II.28.	Peranan Kategori Real Estate di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	29
II.29.	. Peranan Kategori Jasa Perusahaan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	29
II.30.	. Peranan Kategori Administrasi, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	30
II.31.	Peranan Kategori Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	30
II.32.	Peranan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	31
II.33.	Peranan Kategori Jasa Lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	31
II.34.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2019-2023	32
II.35.	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	33
II.36.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023	33
II.37.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023	34
II.38.	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	36
II.39.	Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	36
II.40.	Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	37
II.41.	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	38
II.42.	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	39
II.43.	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	39
II.44.	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	40
II.45.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	42
II.46.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	42
II.47.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	43
II.48.	Jumlah Ketersediaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	43
II.49.	Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	44
II.50.	Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022	44
II.51.	Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	45
II.52.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang TK/RA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	46
II.53.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SD/MI Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	46
II.54.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMP/MTs Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	46



No Tabel	Judul	Hal
II.55.	Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMA/SMK/MA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	46
II.56.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	47
II.57.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	48
II.58.	Jumlah Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	49
II.59.	Jumlah Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	49
II.60.	Jumlah Kasus Tuberculosis (TB) di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	50
II.61.	Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	51
II.62.	Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	51
II.63.	Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	52
II.64.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)	52
II.65.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)	52
II.66.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)	53
II.67.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022-2023	53
II.68.	Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Realisasi Tahun 2023 Melalui Program BSPS, DAK, APBD I dan APBD II	54
II.69.	Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur	56
II.70.	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	57
II.71.	Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur	58
II.72.	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	59
II.73.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial (Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur	60
II.74.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Berdasarkan Jumlah PMKS Yang mendapat Bantuan	60
II.75.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	61
II.76.	Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	62
II.77.	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	62
II.78.	Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	62
II.79.	indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	63
II.80.	Persentase penanganan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	64
II.81.	Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	64
II.82.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	65
II.83.	Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	67



No Tabel	Judul	Hal
II.84.	Pola Pangan Harapan (PPH) Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	68
II.85.	Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	69
II.86.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur	70
II.87.	Jumlah Kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	71
II.88.	Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	71
II.89.	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023	71
II.90.	Nama Pelabuhan dan Kedalamannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	72
II.91.	Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	73
II.92.	frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	73
II.93.	Perkembangan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 – 2023	73
II.94.	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	74
II.95.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	74
II.96.	Jumlah PMDN/PMA di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	75
II.97.	Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	75
II.98.	Ketersediaan Informasi Manual Book di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	76
II.99.	Perkembangan Pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur	77
II.100.	Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	78
II.101.	Jumlah SDM dan Pengelola Arsip di Kabupaten Seram Bagian Timur	78
II.102.	Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenisnya Tahun 2019-2023	79
II.103.	Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenis Budidaya Perikanan Tahun 2019-2023	79
II.104.	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	80
II.105.	Perkembangan Jumlah Nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	80
II.106.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	80
II.107.	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2023 (ton)	80
II.108.	Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	82
II.109.	Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	82
II.110.	Luas Areal Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 - 2023	83
II.111.	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ekor)	84
II.112.	Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ekor)	84



No Tabel	Judul	Hal
II.113.	Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ha)	85
II.114.	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	85
II.115.	Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	85
II.116.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Seram Bagian Timur	87
II.117.	Proporsi Belanja Pegawai APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	88
II.118.	Kinerja Pengawasan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2023	89
II.119.	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	90
II.120.	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	90
II.121.	Jumlah ASN Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	91
II.122.	Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur	91
II.123.	PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	93
II.124.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	94
II.125.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	95
II.126.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	96
II.127.	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)	96
II.128.	Nama Pelabuhan dan Kedalamannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	97
II.129.	Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya di Kabupaten Seram Bagian Timur	97
II.130.	frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	97
II.131.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur	98
II.132.	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur	98
II.133.	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	99
II.134.	Nama Akomodasi, Alamat, Kamar, Tempat Tidur di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023	99
II.135.	Nama Akomodasi Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Seram Bagian Timur	100
II.136.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	101
II.137.	Jumlah Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	102
II.138.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023	104
II.139.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan	106
II.140.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan	107
II.141.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108



No Tabel	Judul	Hal
II.142.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109
II.143.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	110
II.144.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial	111
II.145.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan di Kabupaten Seram Bagian Timur	114
III.1.	Proyeksi dan Penyesuaian Target Ekonomi Makro Tahun 2024	4
III.2.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (persen)	12
III.3.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2021-2023	13
III.4.	Laju Pertumbuhan Rill PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2021-2023	15
III.5.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2021-2023	16
III.6.	target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur	19
III.7.	Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023, Pendapatan 2024 Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Seram Bagian Timur	25
III.8.	Realisasi dan Proyeksi/target Belanja tahun 2022 s/d 2025 Kabupaten Seram Bagian Timur	31
III.9.	Realisasi dan Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 s/d 2025	32
IV.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	2
IV.2.	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur	8
IV.3.	Keterkaitan antara Isu Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	15
IV.4.	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	16
IV.5.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	18
IV.6.	Rencana Hirarki Pusat Pelayanan Di Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	39
IV.7.	Potensi Kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur	53
IV.8.	Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur	55
IV.9.	Usulan Alih Fungsi Hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur	56
IV.10.	Luas Lahan Kawasan Pertanian	59
IV.11.	Luas Lahan Perkebunan	62
IV.12.	Wilayah Komoditas	62
IV.13.	Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Daerah Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya	63
IV.14.	Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur	67
IV.15.	Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur	70
IV.16.	Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur	72
IV.17.	Penyebaran Lokasi Transmigrasi	74
V.1.	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	2
V.2.	Program Prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2025	4



No Tabel	Judul	Hal
V.3.	Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	9
V.4.	Rencana Kerja Program/Kegiatan Stunting Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	34
V.5.	Penyelarasan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada SPM Tahun 2025	41
V.6.	Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025	60
V.7.	Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025	61
VI.1.	Indikator Makro Tahun 2025	3
VI.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Seram Bagian Timur	4
VI.3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	5
VI.4.	Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	5
VI.5.	Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025	17



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Hal
I.1	Hubungan antar dokumen	11
II.1	Peta Kabupaten Seram Bagian Timur	4
III.1	Capaian Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2023	2
III.2	Tema dan Prioritas RKP Tahun 2025	6
III.3	Sasaran Kinerja Ekonomi Makro RKP Tahun 2025	7
III.4	Sasaran Kinerja Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku	9
IV.1	Konsep Struktur Ruang Kota Kabupaten Seram Bagian Timur	34
IV.2	Peta Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Seram Bagian Timur	37
IV.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	41
IV.4	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur	49
IV.5	Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur	49
IV.6	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur	54
IV.7	Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur	60
IV.8	Peta Rencana Kawasan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur	66
IV.9	Peta Potensi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur	69
IV.10	Peta Rencana Kawasan Periwisata Kabupaten Seram Bagian Timur	73
IV.11	Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur	74



DAFTAR GRAFIK

No Gambar	Judul	Hal
II.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010	19
II.2.	Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023	34
III.1.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019-2023	14

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005- 2025, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur ini dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan kedalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2025. Prioritas program dan kegiatan tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi seluruh Perangkat Daerah berdasarkan urusan yang diampu masing-masing.

Dokumen RKPD Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun, dimana bertujuan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Seram Bagian Timur di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat

Proses dan tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diawali dengan persiapan Penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD

sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2025 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1.1.1. Proses Penyusunan

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan melalui tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

1. *Persiapan Penyusunan RKPD;*

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. *Penyusunan Rancangan Awal RKPD;*

Penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD untuk menyusun rancangan awal Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan top-down/bottom-up, teknokratis dan partisipatif maupun politis, termasuk mengakomodir proses telaahan Pokok pokok pikiran DPRD.

3. *Penyusunan Rancangan RKPD;*

Penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta

untuk mengharmoniskan dan mensinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tujuan membahas rancangan RKPD yang meliputi : (1) menyepakati permasalahan pembangunan daerah; (2) menyepakati prioritas pembangunan daerah; (3) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; (4) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; (5) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

Rancangan akhir RKPD merupakan hasil penyelarasan Rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur, Rancangan RKPD Provinsi Maluku dan Rancangan RKP pada saat Musrenbang Nasional.

6. Penetapan RKPD.

Penetapan RKPD adalah tahap akhir yang dilakukan setelah pembahasan/fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD dibahas di provinsi. Penetapan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

- (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.1.2. Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 disusun Untuk memastikan bahwa output dari hasil penyusunan berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 melibatkan beberapa prinsip sebagai berikut :

- 1. Pendekatan Bottom Up;** Pendekatan ini mengakomodasisecara optimal masukan dari masyarakat luas melalui jenjang pemerintahan dan struktur kemasyarakatan dari bawah. Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulaidari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- 2. Pendekatan Top Down;** Pendekatan ini memadukan antara arahan yang bersifat mandatory dari pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) dengan kepentingan Pemerintah Daerah bersama masyarakat. Dalam prakteknya perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

- 3. Pendekatan Teknokratis;** Pendekatan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilaksanakan pemerintah daerah melalui kewenangan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 4. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif;** Pendekatan ini mengakomodasi secara langsung berbagai kepentingan stakeholders dalam pembangunan
- 5. Pendekatan Politis;** Pendekatan ini mengakomodasi kepentingan politik dari para pejabat dan pelaku politik baik melalui DPRD maupun partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1555, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
27. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026;

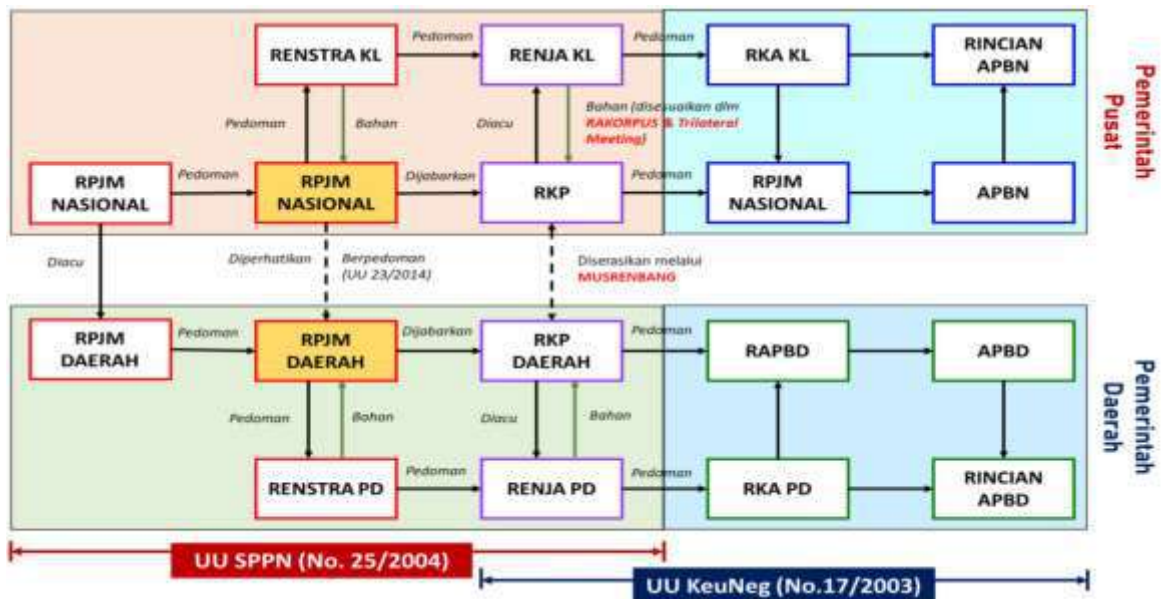
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 – 2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus manajemen pembangunan yang berkelanjutan sehingga dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD atau RPD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Dokumen RKPD ini akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada saat memasuki tahapan penganggaran. Selanjutnya pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah (LKPD). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen



Selain itu, penyusunan dokumen RKPd juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang sifatnya nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*sustainable development goals* (SDGs), *road map* reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan *stunting*, pangan dan gizi, penurunan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPd Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPd) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk :



1. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

a. Tujuan :

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025; dan
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

1.5. Sistematika RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri atas :

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang berikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika RKPD

Sistematika RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

- 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum;
- 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah;
- 2.1.5. Standar Pelayanan Minimal.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.5. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.3. Kebijakan Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

1.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2025

1.2. Rencana Program dan kegiatan yang Bersumber dari APBD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025



- 1.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 6.1. Penetapan Indikator dan Target Umum (Makro)
- 6.2. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama
- 6.3. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci
- 6.4. Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB VII Penutup

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten.

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak dibagian Timur dan Selatan Pulau Seram Provinsi Maluku, dimana secara geografis berada pada 128°20' – 130°10' BT dan 02°50' – 04°40'LS. Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki luas 20.656,894 km² dengan tiga dimensi kewilayahan yang meliputi dataran rendah, dataran tinggi dan laut. wilayah daratan tinggi dan rendah memiliki luas 5.779,123 km², sedangkan wilayah lautan memiliki luas 14.877,771 km², serta mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu : Pulau Gorom, Kesui Watubela, Teor, Gorom Timur, Pulau Panjang, Seram Timur, Tutuk Tolu, Kilmury, Siritaun Wida Timur, Kian Darat, Werinama, Siwalalat, Bula, Bula Barat dan Teluk Waru. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Werinama yaitu sebesar 993,84 km² atau sekitar 17,20 persen dari luas Kabupaten Seram Bagian Timur, Kecamatan Bula Barat memiliki luas kedua terbesar, yaitu 880,29 km² atau 15,23 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah kecamatan Pulau Panjang, yaitu sebesar 20,53 km² atau 0,36 persen.

Sementara itu, jumlah pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 62 pulau, dimana terdapat 10 pulau besar yaitu Pulau Seram 554.737,325 Ha, Pulau Gorom 6.852,661 Ha, Pulau Manawoka 5.099,812 Ha, Pulau Kesui 3.014,497 Ha, Pulau Teor/Wanin 2.328,542 Ha, Pulau Panjang

2.052,636 Ha, Pulau parang 1.235,226 Ha, Pulau Seram Laut 939,683 Ha, Pulau Merwaru 411,301 Ha, Pulau Watubela 406,652 Ha.

**Tabel II.1. Luas Wilayah Daratan
Kabupaten Seram Bagian Timur Berdasarkan Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Prosentase (%)	Jumlah Desa
1.	Pulau Gorom	Kataloka	91,303	1,58	24
2.	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58	0,65	18
3.	Teor	Wermaf Kampung Tengah	23,41	0,41	10
4.	Gorom Timur	Miran	29,29	0,51	23
5.	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53	0,36	6
6.	Seram Timur	Geser	73,35	1,27	16
7.	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09	5,71	11
8.	Kilmury	Kilmury	837,62	14,49	14
9	Kian Darat	Watu-Watu	129,23	2,24	10
10.	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37	2,98	10
11.	Werinama	Werinama	993,84	17,20	10
12.	Siwalalat	Atiahu	847,19	14,66	12
13.	Bula	Bula	643,36	11,13	10
14.	Bula Barat	Waiketam Baru	880,29	15,23	13
15.	Teluk Waru	Waru	669,67	11,59	11
Jumlah			5.799,123	100,00	198

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Jumlah Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 198 Desa. Jumlah Desa terbanyak ada di wilayah Kecamatan Pulau Gorom, diikuti Kecamatan Gorom Timur Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Desa paling sedikit adalah Kecamatan Pulau Panjang yaitu sebanyak 4 Desa. Jarak tempuh terjauh dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kecamatan Teor.

**Tabel II.2. Jumlah Desa Menurut Kecamatan di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pulau Gorom	24	24	24	24	24
Kesui Watubela	18	18	18	18	18
Teor	10	10	10	10	10
Gorom Timur	23	23	23	23	23
Pulau Panjang	6	6	6	6	6
Seram Timur	16	16	16	16	16
Tutuk Tolu	11	11	11	11	11
Kilmury	14	14	14	14	14
Kian Darat	10	10	10	10	10
Siritaun Wida Timur	10	10	10	10	10

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Werinama	10	10	10	10	10
Siwalalat	12	12	12	12	12
Bula	10	10	10	10	10
Bula Barat	13	13	13	13	13
Teluk Waru	11	11	11	11	11
Jumlah	198	198	198	198	198

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

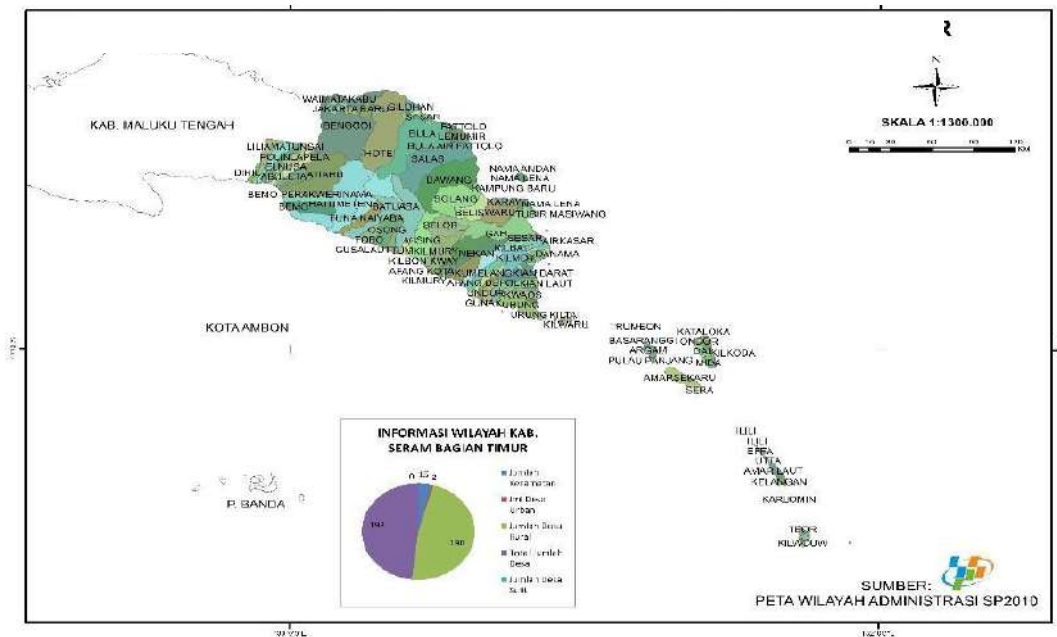
**Tabel II.3. Jarak Tempuh dari Ibukota Kecamatan
Ke Ibukota Kabupaten Seram Bagian Timur**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Tempuh Ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Pulau Gorom	Kataloka	177,93
2.	Kesui Watubela	Tamher Timur	230,40
3.	Teor	Wermaf Kampung Tengah	244,58
4.	Gorom Timur	Miran	145,20
5.	Pulau Panjang	Pulau Panjang	130,00
6.	Seram Timur	Geser	118,68
7.	Tutuk Tolu	Air Kasar	94,43
8.	Kilmury	Kilmury	58,80
9.	Kian Darat	Watu-Watu	71,00
10.	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	80,00
11.	Werinama	Werinama	102,00
12.	Siwalalat	Atiahu	65,40
13.	Bula	Bula	0,89
14.	Bula Barat	Waiketam Baru	40,00
15.	Teluk Waru	Waru	36,00

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Sedangkan untuk menjelaskan posisi letak geografis dari Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana peta pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1.Peta Kabupaten Seram Bagian Timur



Ditinjau dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada ketinggian rata-rata antara 0-500 m s.d 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl) dengan kemiringan lahan antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %. dataran rendah di Kabupaten Seram Bagian Timur terdapat di Daerah Masiwang, Data dan informasi mengenai kondisi topografi dimaksud, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.4. Data Topografi Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Uraian	Luas
1	Kemiringan lahan	Rata-rata antara 0 s/d 3 %, 8 s/d 15 %, 30 s/d 50 % dan > 50 %
2	Ketinggian lahan	Rata-rata antara 0-500 m dan antara 500-1000 m diatas permukaan laut (mdpl)

Kondisi hidrologi Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari air laut, air tanah dan air permukaan tanah. Sumber air laut, air tanah dan air permukaan tanah selain berasal laut, dari dasar tanah dan permukaan tanah juga berasal dari danau dan sungai, seperti Sungai Arewan, Kian,

Kilaba, Aruan, Masiwang, Kadar, Bitorik, Bemo, Bobot, Tian, Daut, Tunsai, Salas, Balifar, Bulawa, serta Sungai Waimiran.

Sungai di Kabupaten Seram Bagian Timur T terdiri atas sungai perenial (mengalir sepanjang musim) dan sungai intermiten (sungai musiman). Sungai-sungai perenial merupakan sungai-sungai utama di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengalir sepanjang musim dengan debit yang bervariasi. Adanya variasi debit aliran disebabkan pengurangan jumlah pasokan debit air ke sungai utama akibat perubahan penggunaan lahan pada wilayah DAS.

29 buah sungai yang tersebut dapat digunakan masyarakat sebagai sumber air bersih maupun sebagai pengairan lahan pertanian. Jumlah sungai yang paling banyak ditemukan di pulau Seram, terutama di bagian selatan Pulau Seram yang meliputi Kecamatan Werinama, Kilmury dan Siwalalat dengan 15 buah sungai dan bagian utara Pulau Seram termasuk dalam wilayah Bula dan sekitarnya dengan 9 buah sungai. Bentuk alur sungai utama di wilayah utara dan seram umumnya berbentuk V. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan masa air tawar yang memasuki wilayah lembah sungai ini memiliki lingkungan sekitar dengan tutupan lahan bergetasi hutan, sehingga fungsi tangkapan air masih tetap berlangsung secara baik. Walaupun demikian, telah banyak lahan hutan mengalami pembukaan, terutama untuk aktifitas HPH. Akitivitas HPH berpotensi merusak sistem aliran pada wilayah DAS jika tidak dikelola secara baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Pasal 5 ayat (4) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur. Dan ayat (5) Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati/Walikota.

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas,

sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim seiring dengan musim yang ada. Iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman. **Distribusi** iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasiun pengamatan iklim.

1. Wilayah kecamatan Pulau-Pulau Gorom termasuk dalam zona Iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah P. Panjang, P. Amaskaru dan P. Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi P. Garogos, P. Koon, bagian Tengah dan Selatan P. Gorom, P. Kesui, Kepulauan Watubela dan P. Teor.
2. Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur di yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.
3. Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3 ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.

4. Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagian di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Dari aspek klimatologi, iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, sehingga iklim yang terjadi sangat dipengaruhi perkembangan cuaca laut yang berlangsung seiring dengan musim yang ada. Iklim yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut oleh karena Kabupaten Seram Bagian Timur dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seirama dengan musim yang ada. Oleh karena luasnya wilayah ini dimana pulau-pulau yang tersebar dalam jarak yang berbeda-beda, sehingga iklim yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah iklim musiman.

Distribusi iklim secara spasial di Seram Bagian Timur sesuai dengan lokasi stasion pengamatan iklim. Berdasarkan pada asumsi yang mengklasifikasikan data klimatologi spasial oleh Oldeman (1980), maka pengelompokan wilayah curah hujan dalam bentuk zona Agroklimat untuk Kabupaten Seram Timur sebagaiberikut :

- Zona I.3 : Curah hujan tahunan 2000 – 4000 mm
- Zona II. 6 : Curah hujan Tahunan 2500-4000 mm, tercakup didalamnya zona B2 (7-9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman
- Zona III.1 : Curah hujan tahunan 2000-2500 mm, tercakup di dalamnya zona C2 (5-6 B, 2-3 BK) menurut Oldeman. Termasuk zona ini adalah sebagian wilayah Kecamatan Werinama
- Zona III.2 : Curah hujan tahunan 2000-3000 mm, tercakup di dalamnya zona C1 (5-6 BB dan < 2 BK) menurut Oldeman. Puncak curah hujan pada bulan Juni-Juli atau Juli Agustus
- Zona IV.1 : Curah hujan tahunan 3000-4000 mm, tercakup di dalamnya zona A2 (>9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman

Wilayah Kecamatan Pulau Gorom termasuk dalam zona iklim I.3 dan II.6. Zona agroklimat I.3 mendominasi bagian Utara Pulau Gorom, seluruh wilayah P. Panjang, P. Amarsekaru dan P. Igar. Sedangkan zona agroklimat II.6 meliputi P. Garogos, P. Koon, bagian Tengah dan Selatan P. Gorom, P. Kesui, Kepulauan Watubela dan P. Teor.

Wilayah Kecamatan Seram Timur juga sama dengan kecamatan Pulau-Pulau Gorom yang termasuk dalam zona agroklimat I.3 dan II.6. Wilayah dominan untuk zona II.6 ialah Pulau Seram Laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Geser, Pulau Keffing, sebagian kecil daratan sekitar tanjung Masiwang dan bagian Barat wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram. Sedangkan zona agroklimat I.3 meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Seram Timur yang ada di dataran Pulau Seram sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Wilayah Kecamatan Bula memiliki jumlah zona agroklimat yang bervariasi antara lain zona I.3, II.6, dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona I.3 ialah pada pesisir Timur Pulau Seram, sementara Bagian Utara dan sebagian daerah pegunungan di pertengahan pulau Seram termasuk dalam zona II.6. Sedangkan zona agroklimat IV.1 mendominasi wilayah

pegunungan, terutama pada kawasan yang berbatasan dengan Kecamatan Werinama.

Wilayah Kecamatan Werinama memiliki jumlah zona agroklimat yang lebih bervariasi dari 3 wilayah lain. Bervariasinya zona agroklimat ini disebabkan adanya 4 zona agroklimat yang teridentifikasi di wilayah ini masing-masing : zona II.6, III.1, III.2 dan IV.1. Wilayah dominan untuk zona II.6 terdistribusi mulai dari wilayah bagian Timur sampai dengan bagian Barat Kecamatan Werinama, sementara zona III.1 terfokus pada pesisir pantai Selatan dan beberapa bagian di sebelah Timur wilayah ini. Zona agroklimat III.2 terpusat pada sebagian kecil wilayah di bagian pesisir yang berbatasan dengan kecamatan Tehoru (Kabupaten Maluku Tengah). Sedangkan zona IV.1 tersebar sepanjang wilayah pegunungan mulai dari bagian Timur sampai bagian Barat, terutama pada kawasan pegunungan yang berbatasan dengan Kecamatan Bula.

Data perkembangan cuaca sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana Suhu udara berkisar antara 23,8°C sampai dengan 34,8°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 68 persen sampai dengan 98 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Geser Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 291,4 mm dan hari hujan terbanyak tercatat di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Geser sebanyak 151 hari. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan cuaca di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat ditunjukkan pada tabel-tabel berikut :

**Tabel II.5. Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan
Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembaban Udara (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	24,8	28,5	33,4	68	79	79
Februari	24,7	28,3	32,4	70	81	79
Maret	25,2	28,4	32,5	76	82	87
April	24,2	28,5	32,6	75	82	91
Mei	24,2	27,9	32,8	74	86	93
Juni	24,0	25,8	31,8	82	86	94
Juli	24,5	27,2	32,0	72	86	92
Agustus	24,0	26,7	31,0	71	85	98
September	24,6	26,8	31,2	72	86	94
Oktober	23,8	27,9	33,8	71	85	97
November	24,8	29,1	34,8	68	83	98
Desember	25,0	30,3	33,8	69	81	92

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel II.6. Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari
Menurut Bulan Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023**

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Penyinaran Matahari (%)	Angin		
			Arah Angin Terbanyak (°)	Kecepatan Terbesar (Knot)	Arah Saat Kecepatan Terbesar (°)
Januari	1.007,9	59	W	25	W
Februari	1.009,4	66	N	23	W
Maret	1.011	76	N	19	W
April	1.010,2	69	W	18	W
Mei	1.011,5	69	S	19	SW
Juni	1.011,7	35	SE	17	S
Juli	1.012,4	58	S	19	SW
Agustus	1.012	77	SE	12	SE
September	1.013	75	S	15	S
Oktober	1.013,3	84	S	14	S
November	1.011,1	87	S	11	S
Desember	1.010,5	79	N	18	NW

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel I.7. Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan
Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023**

Bulan	Curah Hari (mm)	Hari Hujan (Hari)
Januari	87,9	12
Februari	227,0	14
Maret	140,7	18
April	174,8	14
Mei	291,4	20
Juni	153,7	15
Juli	93,5	14
Agustus	79,2	10
September	13,5	6
Oktober	26,6	6
November	75,7	8
Desember	190,7	14

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

2.1.1.2 Aspek Demografi

2.1.1.2.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 berdasarkan Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka sebanyak 138.580 jiwa, terdiri dari 70.051 jiwa laki-laki dan 68.529 jiwa perempuan.

**Tabel II.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur
Menurut Kecamatan Tahun 2019 – 2023**

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pulau Gorom	20.752	22.134	21.960	21.820	21.787
2	Kesui Watubela	7.750	9.110	9.100	9.002	9.039
3	Teor	2.959	2.955	2.915	3.023	3.195
4	Gorom Timur	8.618	9.293	9.446	9.490	9.426
5	Pulau Panjang	2.214	2.719	2.644	2.584	2.648
6	Seram Timur	11.857	12.378	12.278	12.180	12.255
7	Tutuk Tolu	5.466	6.996	6.964	6.938	7.033
8	Kilmury	4.931	6.338	6.248	6.319	6.440
9	Siritaun Wida Timur	5.514	6.832	6.832	6.830	7.137
10	Kian Darat	5.501	6.153	6.209	6.288	6.450
11	Werinama	5.830	5.943	5.837	5.823	5.741
12	Siwalalat	5.459	6.355	6.270	6.288	6.404
13	Bula	16.537	25.713	26.113	26.259	26.695
14	Bula Barat	6.795	8.186	8.408	8.542	8.540
15	Teluk Waru	4.493	5.362	5.385	5.517	5.790
Seram Bagian Timur		114.677	136.467	136.609	136.903	138.580

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan mengamati data pada tabel diatas dapat diketahui, bahwa terjadi pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan sepanjang kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dimana jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2019 berjumlah 114.677 jiwa sampai dengan tahun 2023 telah tumbuh menjadi 138.580 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini, kiranya dapat dijadikan masukan dalam merumuskan berbagai strategi, kebijakan dan program/kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan program/kegiatan oleh seluruh masyarakat dapat terjadi jika dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas. Kondisi kependudukan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.9. Jumlah Penduduk, Rata-rata Kepadatan dan Komposisi menurut Jenis Kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	114.677	136.467	136.609	136.903	138.580
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	19,84	23,61	23,64	23,69	23,98
Sex Rasio (%)	107	103	103	103	102
- Laki-Laki	59.960	69.141	69.478	69.485	70.051
- Perempuan	54.717	67.326	67.131	67.418	68.259

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 sebanyak 138.580 jiwa dibandingkan dengan luas wilayah (daratan) Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 5.779,123 km², maka diperoleh kepadatan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 23,98 jiwa/km².

Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki

per 100 perempuan. Tahun 2023 rasio jenis kelamin Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 102 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur, terdapat 102 orang penduduk laki-laki

2.1.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 – 2023 sebesar 0,05 persen, dengan rincian tahunan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel II.10. Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
2020	136.467	19
2021	136.609	0,1
2022	137.359	0,5
2023	138.580	0,9

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1.2.3 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Tahun 2023 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 35 – 49 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 79.863 jiwa, atau sebesar 57,63 persen dari total penduduk. Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 35 – 49 tahun mencapai 39.096 jiwa, atau sebesar 28,21 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 35 – 49 berjumlah 40.767 jiwa atau mencapai 29,42 persen. Tabel berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023.

**Tabel II.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023**

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	-	-	-
5-9	-	-	-
10-14	-	-	-
15-19	-	-	-
20-24	-	-	-
25-29	-	-	-
30-34	-	-	-
35-39	14.997	15.405	30.402
40-44	13.551	14.073	27.624
45-49	10.548	11.289	21.837
50-54	8.916	9.108	18.024
55-59	6.621	6.408	13.029
60-64	5.118	4.992	10.110
65-69	3.777	3.567	7.344
70-74	2.631	2.283	4.914
75+	2.742	2.181	4.923
Total	70.051	68.529	138.580

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.2. Aspek Kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingindicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur. Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 3,51 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini memiliki penurunan sebesar 0,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3,64 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha dan adanya perubahan harga.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Seram Bagian Timur tercatat senilai dari 2,05 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 2,13 triliun rupiah pada tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan ditahun 2023 sebesar 3,19 Persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,10. Perlambatan laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 3 sektor lapangan usaha yang berperan besar terhadap perekonomian yaitu sector pertanian, kehutan dan perikanan, Pertambangan dan Administrasi Pemerintahan. Sektor Pertanian, kehutan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi paling dominan (leading sector) terhadap perekonomian mengalami perlambatan disebabkan fenomena El Nino yakni gangguan musim tanam, penurunan kualitas tanaman di bidang pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan sebab kekeringan.

1) Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Seram Bagian Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu mencapai 31,26 persen (naik 4,09 poin persen dibandingkan tahun 2022). Selanjutnya Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 19,49 persen (turun 9,33 poin persen dibandingkan tahun 2022). Persentase terbesar ketiga dihasilkan oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,37 persen (naik 1,35 poin persen dibandingkan tahun 2022).

**Tabel. II.12. Produk Domestik Regional Bruto ADHB
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	806,872.52	854,418.69	883,973.45	988,502.81	1.097,095.11
2	Pertambangan dan Penggalian	756,835.67	704,043.92	843,455.02	1.048,749.36	684,120.90
3	Industri Pengolahan	47,584.82	47,097.04	48,303.70	56,613.59	59,702.02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	433.27	454.71	488.74	524.90	549.22
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,790.03	1,880.59	1,991.63	2,128.89	2,319.91
6	Konstruksi	212,781.87	214,980.41	232,203.67	251,146.75	270,506.82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	214,491.58	213,281.32	232,310.89	265,394.30	297,501.15
8	Transportasi dan Pergudangan	83,982.45	79,177.98	85,270.89	99,925.68	120,573.93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,358.88	14,423.28	15,108.15	16,901.82	18,783.21
10	Informasi dan Komunikasi	17,644.66	18,285.02	19,591.95	21,589.73	23,499.55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	49,387.86	53,866.30	59,656.37	65,874.33	66,901.30
12	Real Estate	10,324.04	10,359.82	10,632.27	11,219.21	11,896.55



No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
13	Jasa Perusahaan	3,897.79	3,910.29	4,128.30	4,543.55	4,853.13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	496,515.17	506,604.80	539,248.35	583,005.62	609,614.30
15	Jasa Pendidikan	71,244.91	71,551.60	75,250.07	81,437.81	85,072.45
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	71,901.02	75,931.70	81,288.95	90,890.99	101,863.85
17	Jasa Lainnya	44,351.92	43,811.87	44,808.67	49,693.40	54,503.67
Produk Domestik Regional Bruto ADHB		2,904,398.46	2,914,079.35	3,177,711.08	3,638,142.75	3,509,353.09

Sumber Data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

Tabel di atas menunjukkan selama lima tahun (2019-2023), pertumbuhan PDRB semakin meningkat. Kontribusi terbesar pertama terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2023 yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian sedangkan kontribusi ketiga terbesar yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel. II.13. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019—2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	526,641.04	546,249.20	561,140.88	601,141.37	643,528.12
2	Pertambangan dan Penggalian	547,771.79	534,425.44	507,843.26	491,108.32	489,769.90
3	Industri Pengolahan	28,439.91	27,723.24	28,078.01	31,813.96	32,798.41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	323.51	337.05	356.29	372.83	382.58
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,552.01	1,611.39	1,676.08	1,736.20	1,851.42
6	Konstruksi	125,657.38	124,685.51	132,794.00	139,355.09	144,427.66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	145,673.77	140,155.61	150,012.54	162,518.75	173,749.76
8	Transportasi dan Pergudangan	57,485.50	52,842.92	54,292.95	57,263.74	63,012.75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,998.51	8,851.25	9,230.60	10,013.60	10,755.77
10	Informasi dan Komunikasi	15,337.54	15,492.21	16,204.56	17,419.53	18,492.05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,152.06	35,285.22	36,912.93	37,089.72	37,019.57
12	Real Estate	7,432.15	7,419.06	7,558.14	7,861.89	8,182.66
13	Jasa Perusahaan	3,161.08	3,119.47	3,245.56	3,464.71	3,611.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	307,791.21	307,679.74	322,212.21	341,402.35	346,126.99



No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022**	2023**
15	Jasa Pendidikan	52,223.83	52,067.80	54,126.87	57,540.04	60,056.37
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	47,381.74	49,602.88	52,616.32	56,916.07	61,597.73
17	Jasa Lainnya	28,860.13	28,241.33	28,562.64	30,490.73	32,130.97
Produk Domestik Regional Bruto ADHK		1.936,883.16	1.935,789.31	1.966,863.84	2.047,508.87	2.127,493.73

Sumber Data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

**Tabel II.14. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019 – 2023**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022**	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,78	29,32	27,82	27,17	31,26
2	Pertambangan dan Penggalian	26,06	24,16	26,54	28,83	19,49
3	Industri Pengolahan	1,64	1,62	1,52	1,56	1,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
6	Konstruksi	7,33	7,38	7,31	6,90	7,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	7,39	7,32	7,31	7,29	8,48
8	Transportasi dan Pergudangan	2,89	2,72	2,68	2,75	3,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,49	0,48	0,46	0,54
10	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,63	0,62	0,59	0,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	1,85	1,88	1,81	1,91
12	Real Estate	0,36	0,36	0,33	0,31	0,34
13	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	17,10	17,38	16,97	16,02	17,37
15	Jasa Pendidikan	2,45	2,46	2,37	2,24	2,42
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2,48	2,61	2,56	2,50	2,90
17	Jasa Lainnya	1,53	1,50	1,41	1,37	1,55
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

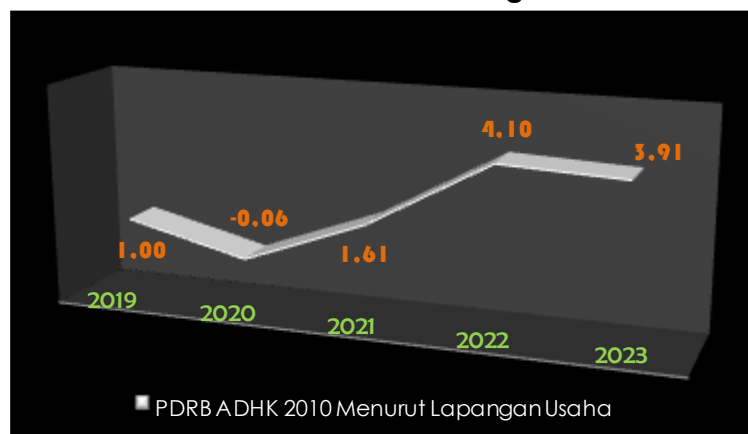
2) **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selain pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya barang dan jasa yang bias dihasilkan, yang berarti akan lebih banyak orang yang dapat ikut menikmati barang dan jasa yang dihasilkan. Namun, jika barang dan jasa yang dihasilkan bertambah tanpa disertai dengan pemerataan akan menambah kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar daerah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010



Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur

tahun 2023 berada pada 3,91 persen, lebih rendah 0,19 persen dari tahun 2022 yang berada pada angka 4,10 persen.

Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 adalah pada kategori Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,04 persen, mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen dari sebelumnya 5,47 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kategori Jasa Keuangan merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2023, dimana pertumbuhannya sebesar negatif 0,19 persen.

**Tabel II.15. Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,61	3,72	2,73	7,16	7,02
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,16	-2,44	-4,97	-3,30	-0,27
3	Industri Pengolahan	1,28	-2,52	1,28	13,23	3,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,76	4,18	5,71	4,64	2,62
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,44	3,83	4,01	3,59	6,64
6	Konstruksi	3,78	-0,77	6,50	4,58	4,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	3,20	-3,79	7,03	8,34	6,91
8	Transportasi dan Pergudangan	4,26	-8,08	2,74	5,47	10,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,39	-1,64	4,29	8,48	7,41
10	Informasi dan Komunikasi	4,30	1,01	4,60	7,50	6,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,71	9,74	4,61	0,48	-0,19
12	Real Estate	1,15	-0,18	1,87	4,02	4,08
13	Jasa Perusahaan	3,63	-1,32	4,04	6,75	4,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,91	-0,04	4,72	6,05	1,29
15	Jasa Pendidikan	4,18	-0,30	3,95	6,31	4,37
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5,00	4,69	6,08	8,17	8,23
17	Jasa Lainnya	3,72	-2,14	1,14	6,75	5,38
Produk Domestik Regional Bruto		1,00	-0,06	1,61	4,10	3,91

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha 2019-2023

3) PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2023), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selalu mengalami perubahan, dimana pada tahun 2023 mencapai 24,23 juta rupiah atau menurun sebesar 1,29 juta rupiah dibandingkan tahun 2022.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2023 dengan puncaknya adalah pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,40 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 2,25 persen.

**Tabel II.16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	2.904.398,46	2.914.079,35	3.177.711,08	3.638.142,75	3.509.353,08
ADHK	1.936.883,16	1.935.789,31	1.966.863,84	2.047.508,87	2.127.493,73
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	25.887,29	21.250,02	22.669,28	25.529,57	24.232,85
ADHK	17.257,70	14.116,14	14.031,29	14.367,78	14.690,81
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	1,85	-18,20	-0,60	2,40	2,25

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

2. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Seram Bagian Timur Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2019-2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur.

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup Sub kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Sub kategori kehutanan dan Penebangan Kayu dan Sub kategori Perikanan. Sub kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku mencapai 1097,10 miliar rupiah atau sebesar 31,26 persen dari total PDRB. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung berfluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel II.17. Peranan Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,78	29,32	27,82	27,17	31,26

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2) Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 sub kategori, yaitu: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, sub kategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sub kategori Pertambangan Bijih Logam, dan sub kategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, hanya sub kategori Pertambangan Minyak, dan Pertambangan Penggalian lainnya yang berkontribusi terhadap nilai tambah pada kategori ini.

Tabel II.18. Nilai PDRB ADHB Kategori Pertambangan dan Penggalian Di Kabupaten Seram Bagian Timur (Milyar) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertambangan dan Penggalian	26,06	24,16	26,54	28,83	19,49

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Kontribusi Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur relatif fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya pada tahun 2023 sebesar 684,12 milyar rupiah atau sekitar 19,49 persen terhadap total PDRB. Sementara untuk laju pertumbuhan, kategori Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun. Pada periode 2019-2023, penurunannya cukup signifikan pada tahun 2019, yaitu sebesar negatif 7,16 persen. Pertumbuhannya terus negatif hingga pada tahun 2022 dan 2023, yaitu sebesar negatif 3,30 persen dan negatif 0,27 persen.

3) Industri Pengolahan

Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 mencapai 59,70 milyar rupiah atau sekitar 1,70 persen. Laju pertumbuhan kategori ini fluktuatif pada periode 2019-2023, bahkan terjadi kontraksi sebesar negatif 2,52 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan kategori ini kembali positif pada tahun 2022, yaitu sebesar 13,23 persen, dan kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,16 persen.

Tabel 2.19. Peranan Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Industri Pengolahan	1,64	1,62	1,52	1,56	1,70

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4) **Pengadaan Listrik dan Gas**

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,02 persen terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB kategori ini turun sebesar 2,03 poin persen, yaitu dari 4,64 persen di tahun 2022 menjadi 2,62 persen di tahun 2023.

**Tabel II.20. Peranan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas
di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

5) **Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.**

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 0,07 persen, dimana terjadi peningkatan sebesar 191,02 juta rupiah, yaitu dari 2,13 miliar pada tahun 2022 menjadi 2,32 miliar rupiah pada tahun 2023. Selanjutnya, laju pertumbuhan kategori ini selama periode 2019–2023 relatif fluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 6,64 persen, dan terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,44 persen.

Tabel II.21. Peranan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

6) Kontruksi

Pada tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 270,51 milyar rupiah atau sebesar 7,71 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur. Angka tersebut meningkat 0,81 poin persen dibandingkan tahun 2022 yang memiliki kontribusi sebesar 6,90 persen.

Secara umum, laju pertumbuhan Kategori Konstruksi berfluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Pertumbuhan kategori ini sempat berkonstruksi sebesar negatif 0,77 persen pada tahun 2020, namun mulai bangkit di tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 6,50 persen dan di tahun 2023 tumbuh sebesar 4,00 persen.

**Tabel II.22. Peranan Kategori Konstruksi
di Kabupaten Seram Bagian Timur (Persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Konstruksi	7,33	7,38	7,31	6,90	7,71

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi lebih dari 7 persen terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada tahun 2023, kontribusi kategori ini mencapai 297,50 milyar rupiah atau sekitar

8,48 persen, naik 1,18 poin persen dibandingkan tahun 2022. Secara umum, laju pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berfluktuatif selama periode tahun 2019-2023. Laju pertumbuhan kategori ini di tahun 2023 adalah sebesar 6,91 persen, menurun sebesar 1,43 persen dibandingkan tahun 2022 yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 8,34 persen.

Tabel II.23. Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,39	7,32	7,31	7,29	8,48

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

8) Transportasi dan Pergudangan

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) sub kategori namun hanya 5 (lima) yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Angkutan Sungai dan Penyeberangan serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Kontribusi kategori ini mencapai 120,57 milyar rupiah atau sekitar 3,44 persen terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 20,65 milyar rupiah dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 99,92 milyar rupiah.

Tabel. II.24. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Transportasi dan Pergudangan	2,89	2,72	2,68	2,75	3,44

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2022, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 18,78 milyar rupiah atau 0,54 persen. Kategori ini sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Disamping itu kegiatan pertemuan dari pemerintah dan swasta sangat berpengaruh terhadap peningkatan kategori ini. Laju pertumbuhan kategori ini cenderung berfluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu negatif 1,64 persen. Di tahun 2021 kategori ini mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 4,29 persen, dan pertumbuhannya menjadi 7,41 persen di tahun 2023. Hal ini seiring dengan mulai diperbolehkannya pembukaan tempat-tempat wisata dan restoran setelah meredanya pandemi covid-19.

Tabel. II.25. Peranan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,49	0,49	0,48	0,46	0,54

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

10) Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Laju pertumbuhan kategori ini terus menurun pada periode tahun 2019-2020, dimana pada tahun 2019 bertumbuh sebesar 4,30 persen dan terus turun hingga bernilai 1,01 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, kategori ini bertumbuh sebesar 4,60 persen, selanjutnya pada tahun 2022 tumbuh

7,50 persen dan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan mencapai 6,16 persen.

**Tabel II.26. Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Informasi dan Komunikasi	0,61	0,63	0,62	0,59	0,67

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

11) Aktivitas Keuangan dan Asuransi

Selama tahun 2019-2023, kontribusi kategori ini memiliki kecenderungan positif. Dari sisi pertumbuhan, kategori ini memiliki pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,74 persen. Di tahun 2023, kategori ini mengalami kontraksi sebesar -0,19 persen atau menurun sebesar 0,67 poin persen dibanding tahun 2022 yang memiliki pertumbuhan 0,48 persen.

**Tabel. II.27. Peranan Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,70	1,85	1,88	1,81	1,91

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

12) Real Estate

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur dengan peranan berkisar antara 0,31 sampai 0,36 persen pada periode tahun 2019-2023. Sumbangan kategori ini pada tahun 2023 sebesar 11,90 milyar rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi kategori Real Estat cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2023, pertumbuhan kategori ini adalah sebesar 4,08 persen



meningkat 0,06 poin persen dibanding tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,02 persen.

**Tabel. II.28. Peranan Kategori Real Estate
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Real Estate	0,36	0,36	0,33	0,31	0,34

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

13) Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir. Kategori ini merupakan salah satu kategori yang memiliki kontribusi relatif kecil dibandingkan dengan kategori lainnya. Laju pertumbuhan kategori Jasa Perusahaan pada periode tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 laju pertumbuhan kategori ini mengalami kontraksi sebesar negatif 1,32 persen dan pada tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 4,22 persen.

**Tabel. II.29. Peranan Kategori Jasa Perusahaan
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,12	0,14

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Di Kabupaten Seram



Bagian Timur, kategori ini termasuk yang memiliki kontribusi terbesar di antara kategori yang lain.

Selama periode tahun 2019-2023, kontribusi kategori ini terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur cenderung stabil pada angka 17 persen. Sedangkan untuk laju pertumbuhannya fluktuatif pada tahun 2019-2023.

Tabel. II.30. Peranan Kategori Administrasi, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,10	17,38	16,97	16,02	17,37

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

15) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2023, kategori Jasa Pendidikan menyumbang 2,42 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur, meningkat 0,19 poin persen bila dibandingkan tahun 2022. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2023 adalah sebesar 4,37 persen menurun sebesar 1,93 persen dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang bertumbuh sebesar 6,31 persen.

Tabel. II.31. Peranan Kategori Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Pendidikan	2,45	2,46	2,37	2,24	2,42

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2019-2023 peranannya relatif stabil di sekitar angka 2 persen. Pada tahun 2023, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar 2,42 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 8,23 persen.

**Tabel. II.32. Peranan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,48	2,61	2,56	2,50	2,90

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

17) Jasa lainnya

Kategori ini mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perseorangan lainnya. Kontribusi Jasa Lainnya sejak 2019-2023 relatif stabil di kisaran 1 persen. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2023 adalah 5,38 persen, mengalami penurunan sebesar 1,37 poin persen dibandingkan tahun 2022, yang bertumbuh sebesar 6,75 persen.

**Tabel. II.33. Peranan Kategori Jasa Lainnya
di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023**

Lapangan Usaha/Industry	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6
Jasa Lainnya	1,53	1,50	1,41	1,37	1,55

Sumber data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Catatan : *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

3. Kemiskinan

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 sebesar 21,08% naik 0,35% dibanding dengan tahun 2022 sebesar 20,73%. Penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 berada pada urutan ke-6 yaitu sebesar 24,26 (ribu) dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II.34. Jumlah Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu) Tahun 2019-2023**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kepulauan Tanimbar	30,76	30,74	30,70	26,94	27,64
Maluku Tenggara	22,69	22,59	22,89	21,38	22,02
Maluku Tengah	74,80	74,18	74,59	65,73	67,22
Buru	23,89	24,42	25,23	23,60	25,19
Kepulauan Aru	25,62	25,45	25,11	22,36	23,13
Seram Bagian Barat	43,14	43,15	43,72	38,57	38,87
Seram Bagian Timur	26,44	26,69	26,41	23,71	24,26
Maluku Barat Daya	21,49	21,37	21,74	20,36	21,23
Buru Selatan	10,17	10,07	9,99	9,35	9,77
Ambon	21,66	22,15	23,67	22,58	25,87
Tual	17,03	17,36	17,76	16,01	16,41
Maluku	317,69	318,19	321,81	290,57	301,61

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel. II.35. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2019	375.040	26.440	23,13
2020	398.430	26.690	23,04
2021	403.573	26.410	23,25
2022	421.902	23.710	20,73
2023	458.176	24.260	21,08

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel. II.36. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	4,35	1,18
2020	4,44	1,22
2021	3,79	0,98
2022	3,14	0,70
2023	3,29	0,78

Sumber data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

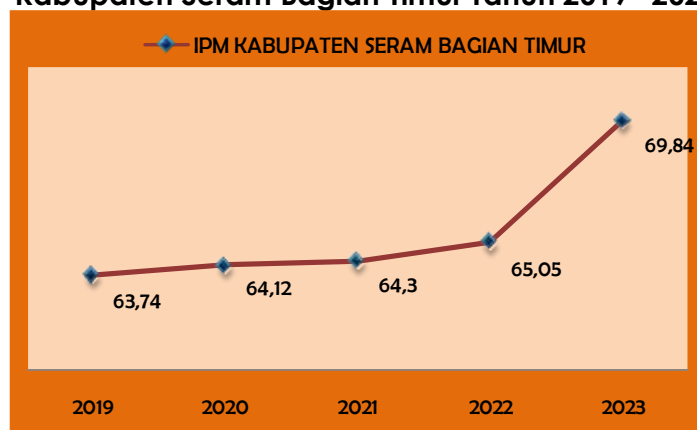
4. Indeks Pembangunan Manusia

4.1. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata-rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Angka-angka capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik berikut ini.

Grafik II.2. Capaian IPM
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 –2023



Sumber: Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

4.2. Disparitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel II.37 dibawah ini.

Tabel II.37. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Se Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Tanimbar	62,86	62,86	62,97	63,45	67,04
Maluku Tenggara	65,85	66,20	66,33	66,88	69,91
Maluku Tengah	71,25	71,25	71,32	71,81	74,34
Buru	68,91	68,95	69,33	69,94	72,11
Kepulauan Aru	63,64	63,71	63,83	64,21	68,19
Seram Bagian Barat	65,49	65,62	65,83	66,67	71,68
Seram Bagian Timur	63,74	64,12	64,30	65,05	69,84
Maluku Barat Daya	61,55	61,90	62,37	63,07	66,71
Buru Selatan	64,42	64,69	64,80	65,37	67,68
Ambon	80,81	80,84	81,23	81,63	82,84
Tual	67,74	67,96	68,16	68,60	71,67
Maluku	69,45	69,49	69,71	70,02	72,75

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pembentuk IPM adalah hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM kearah

yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelektualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada focus kesejahteraan sosial pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan daerah, terutama karena pengaruhnya yang sangat berarti bagi peningkatan daya dukung penduduk selaku subyek pembangunan, dan bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Menyadari akan hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui peningkatan sarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan

penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

**Table II.38. Rata-Rata Lama Sekolah di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Lama Sekolah	35	36	37	37	37

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2. Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

**Table II.39. Harapan Lama Sekolah di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah	55	55	55	56	58

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2.1.2.2.2 Kesehatan

1. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Definisi Angka Harapan

Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel II.40. Angka Harapan Hidup (AHH) di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (AHH)	59,16	59,41	67,45	67,91	68,33

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2018-2022), yaitu dari 58,84 pada tahun 2018 menjadi 60,06 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan

berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu *stunting*. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

**Tabel II.41. Jumlah Balita Gizi Buruk di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun (Balita)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Balita Gizi Buruk	25	15	12	8	11

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Kesehatan seperti halnya pendidikan, merupakan salah satu aspek penting yang sangat diperhitungkan dalam pembangunan manusia. Sasaran utama dari pembangunan kesehatan tidak lain adalah meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang secara umum diukur dengan tingkat usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah dan atau daerah tertentu.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari segi penyediaan sarana kesehatan dan ketersediaan Tenaga Medis yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel II.42. Jumlah Sarana Kesehatan
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Tenaga Medis	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Puskesmas	22	24	22	22	22
Puskesmas Pembantu	70	60	70	70	67
Posyandu	229	230	248	241	248
Puskesdes	5	3	6	12	5
Klinik	1	1	2	3	9

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

**Tabel II.43. Jumlah Tenaga Medis di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Tenaga Medis	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Umum	11	20	34	52	37
Dokter Gigi	3	15	6	7	6
Dokter Spesialis	12	10	9	11	12
Bidan	84	254	294	386	418
Perawat Umum	204	631	661	737	782
Perawat Gigi	2	2	2	1	-
Farmasi	-	-	-	60	48
Apoteker	-	-	-	17	19
Kemas	-	-	-	124	105
Kesling	-	-	-	60	51
Gizi	-	-	-	66	56
Keterampilan Fisik	-	-	-	1	1
Keteknisan Medis	-	-	-	5	2
Teknis Biomedika	-	-	-	21	60

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

2.1.2.2.3 Pemuda dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator antara lain :

- a. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- b. Jumlah Organisasi Kepemudaan.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.44. Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Stadion Sepak Bola	0	0	0	0	0
Stadion Atletik	0	0	0	0	0
Lapangan Bulu Tangkis	7	7	9	9	11
Gedung Olahraga	1	1	1	1	1
Kolam Renang	0	0	0	0	0
Sasana Tinju	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum, pada berbagai bidang yakni : (i) Bidang Pendidikan, (ii) Kesehatan, (iii) Lingkungan hidup, (iv) sarana dan prasarana umum, (v) Penataan ruang dan perhubungan dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni: (i) pertanian, (ii) pariwisata, (iii) jasa dan perdagangan, (iv) energi dan sumberdaya mineral dan sebagainya, yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan saluran perubahan masyarakat, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-Undang Dasar. Peran pemerintah dalam melaksanakan layanan wajib bidang pendidikan, dicerminkan melalui beberapa indikator, antara lain: pendidikan usia dini, tingkat dasar dan menengah, baik itu terkait kualitas manajemen maupun fasilitas infrastruktur penunjangnya.

Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur dari semua jenjang pendidikan.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100% dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100%, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table II.45. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
7 – 12	95,34	99,60	99,77	99,69	99,70
13 – 15	95,65	97,11	97,37	97,10	97,22
16 – 18	91,12	82,94	82,88	82,79	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk APS usia 7-12 tahun, 13-15 dan 16-18, angkanya makin mendekati 100%, yang berarti bahwa anak usia 7-18 tahun hampir semuanya bersekolah.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia sekolah menurut jenjang pendidikan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table II.46. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
7 – 12	107,70	109,64	110,33	113,13	87,30
13 – 15	90,87	90,91	90,01	90,01	70,70
16 – 18	87,45	87,21	87,19	91,93	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table II.47. Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
7 – 12	87,85	98,42	98,65	98,55	98,41
13 – 15	88,76	75,51	72,72	79,00	73,02
16 – 18	86,62	64,50	64,41	64,87	68,01

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan.

d. Jumlah Ketersediaan Sarana Pendidikan

Dari segi ketersediaan sarana pendidikan, jumlah sekolah untuk setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Table II.48. Jumlah Ketersediaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	2019		2020		2021		2022		2023	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
TK/RA	5	92	5	63	5	55	5	109	5	162
SD/MI	129	18	128	20	128	21	129	22	129	23
SMP/MTs	47	7	47	7	47	6	47	8	47	8
SMA/SMK/MA	22	8	22	8	25	13	27	13	-	-
PERGURUAN TINGGI	-	5	-	4	-	3	-	3	-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

e. Jumlah Guru dan Murid

**Table II.49. Jumlah Murid Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TK/RA	167	135	245	210	950	1.043	37	649	2.919	2.833
SD/MI	9.703	8.606	8.345	6.241	8.649	9.481	15.441	3.016	8.625	7.801
SMP/MTs	2.881	2.832	2.541	3.143	2.358	3.407	6.704	1.293	3.044	2.911
SMA/SMK/MA	2.783	2.743	2.653	2.548	3.514	2.635	4.137	2.467	-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

**Table II.50. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2022**

Jenjang Pendidikan	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
TK/RA	8	9	23	15	59	218	7	9	2	371
SD/MI	363	696	537	378	605	484	1.242	225	507	1.120
SMP/MTs	195	321	318	186	332	170	710	204	287	478
SMA/SMK/MA	156	231	178	243	185	103	279	96	-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

f. Rasio Guru Permurid

Indikator rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Indikator rasio murid terhadap guru mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar berbanding jumlah murid disuatu sekolah. Untuk mengetahui dan mengukur jumlah yang paling ideal antara jumlah murid untuk satuguru agar tercapai target kualitas pembelajaran, maka perlu dihitung prosentase rasio perbandingan dimaksud Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah murid, guru dan rasio murid terhadap guru di setiap jenjang pendidikan.

**Tabel II.51. Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenjang Pendidikan	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru	Murid	Guru	Rasio Murid/Guru
	2019			2020			2021			2022			2023		
TK/RA	302	17	18	455	38	12	1.993	277	7	686	16	43	5.752	373	15
SD/MI	18.309	1.059	17	14.586	915	16	18.130	1.089	17	18.457	1.467	13	16.426	1.627	10
SMP/MTs	5.713	516	11	5.684	504	11	5.765	502	11	7.997	914	9	5.955	765	8
SMA/SMK/MA	5.526	387	14	5.201	421	12	6.149	288	21	6.604	375	18	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**Tabel II.52. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang TK/RA
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga TK/RA	97	68	60	122	167
Jumlah Tenaga Pendidikan TK/RA	17	38	277	617	492
Jumlah Murid TK/RA	17	38	1.993	4.936	5.916
Rasio Tenaga Pendidik	18	12	7	8	12

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

h. Pendidikan Dasar

**Tabel II.53. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SD/MI
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga SD/MI	147	148	149	151	169
Jumlah Tenaga Pendidikan SD/MI	1.059	915	1.039	1.467	1.670
Jumlah Murid SD/MI	18.309	14.586	18.130	18.457	18.184
Rasio Tenaga Pendidik	17	16	17	13	11

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

i. Pendidikan Menengah Pertama

**Tabel II.54. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga SMP/MTs	54	51	53	55	80
Jumlah Tenaga Pendidikan SMP/MTs	516	504	502	914	954
Jumlah Murid SMP/MTs	5.713	5.684	5.407	7.997	7.716
Rasio Tenaga Pendidik	11	11	11	18	8

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

j. Pendidikan Menengah Atas

**Tabel II.55. Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Murid Jenjang
SMA/SMK/MA Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lembaga SMA/SMK/MA	30	30	38	40	40
Jumlah Tenaga Pendidikan SMA/SMK/MA	387	421	288	375	471
Jumlah Murid SMA/SMK/MA	5.526	5.201	6.149	6.604	6.426
Rasio Tenaga Pendidik	14	12	21	18	14

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

2. Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.

**Tabel II.56. Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB)	26	30	30	53	49

Sumber Data : Dinas Kesehatan

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90 persen kematian ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada TPB Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2015).

Dalam rangka upaya penurunan AKI yang ditujukan untuk negara yang sedang berkembang, disusun suatu gerakan yang dinamakan *Safe Motherhood*. *Safe motherhood* merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat melalui penolong persalinan dengan tenaga kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

**Tabel II.57. Angka Kematian Ibu (AKI) di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	8	8	8	7	6

Sumber Data : Dinas Kesehatan

c. Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

**Tabel II.58. Jumlah *Stunting* di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah <i>Stunting</i>	234	516	257	421	193

Sumber Data : Dinas Kesehatan

d. Jumlah Penderita HIV/AIDS

HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman.

**Tabel II.59. Jumlah Kasus HIV/AIDS di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus HIV/AIDS	11	13	10	22	15

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

e. Tuberculosis (TB)

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*,

yang menyerang paru-paru. Bakteri TBC membunuh jaringan dari organ yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas.

**Tabel II.60. Jumlah Kasus Tuberculosis (TB) di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Tuberculosis (TB)	146	149	123	172	234

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

f. Malaria

Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API) malaria merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah. Angka *Annual Parasite Incidence* (API) malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.

**Tabel II.61. Jumlah Kasus Malaria di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Malaria	45	63	60	118	81

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

g. Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang sering dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu (pustu). Rasio Sarana Kesehatan tahun 2019-2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.62. Rasio Sarana Kesehatan per Satuan Penduduk di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk	114.667	137.972	136.609	136.903	138.580
Puskesmas	22	24	22	22	22
Rasio Puskesmas	1 : 6.035	1 : 5.749	1 : 6.210	1 : 6.223	1 : 6.299
Puskesmas Pembantu	70	60	70	70	67
Rasio Pustu	1 : 1.638	1 : 2.300	1 : 1.952	1 : 1.956	1 : 2.068
Posyandu	229	230	248	241	248
Rasio Posyandu	1 : 501	1 : 600	1 : 551	1 : 568	1 : 559
Puskesmasdes	5	3	6	12	5
Rasio Puskesmasdes	1 : 22.933	1 : 45.991	1 : 22.768	1 : 11.409	1 : 27.716
Klinik	2	2	2	3	9
Rasio Klinik	1 : 57.334	1 : 68.986	1 : 68.305	1 : 45.634	1 : 15.398

Sumber Data : Dinas Kesehatan

h. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dan tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter dan tenaga melayani 2.500 penduduk. Data tentang Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

Tabel II.63. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk	114.667	137.972	136.609	136.903	138.580
Dokter Umum	11	20	34	52	37
Rasio Dokter Umum	10	14	25	18	27
Dokter Gigi	3	15	6	7	6
Rasio Dokter Gigi	3	11	4	5	4
Dokter Spesial	12	10	9	11	12
Rasio Dokter Spesial	10	7	7	8	9
Bidan	84	254	294	386	418
Rasio Bidan	173	184	215	282	302
Perawat Umum	204	631	661	737	782
Rasio Perawat Umum	178	457	484	538	564
Perawat Gigi	2	2	2	1	0
Rasio Perawat Gigi	2	1	1	1	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pembangunan bidang urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator pembangunan bidang urusan wajib pekerjaan umum antara lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.64. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Negara	90,000	90,000	90,000	206,430	194,310
Provinsi	153,400	153,400	153,400	153,400	161,480
Kabupaten/Kota	404,140	404,140	404,140	404,140	286,140
Jumlah	647,540	647,540	647,540	645,970	641,930

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

Tabel II.65. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	338,960	342,045	341,477	368,080	355,720
Tidak Diaspal	162,050	167,591	281,895	255,840	265,310
Lainnya	146,530	137,904	24,168	22,050	20,900
Jumlah	647,540	647,540	647,540	645,970	641,930

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

**Tabel II.66. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	312,453	293,147	269,023	323,410	305,470
Sedang	33,612	121,771	194,144	174,630	170,920
Rusak	94,052	86,777	143,936	21,910	7,500
Rusak Berat	207,423	145,845	40,437	126,020	158,030
Jumlah	647,540	647,540	647,540	645,970	641,930

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

**Tabel II.67. Perkembangan Cakupan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022-2023**

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	312,453	293,147	269,023	324,981	331,5584
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (orang/km)	471	502	547	453	225
Persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik (%)	48,25	45,27	41,55	50,19	50,57
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	3,12	3,12	3,12	3,12	3,08

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebutuhan akan perumahan dapat diukur berdasarkan pertumbuhan penduduk serta faktor lainnya, seperti kebijakan kota, perkembangan ekonomi wilayah dan kota, baik internal maupun eksternal. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan factor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan perumahan, karena penduduk merupakan subjek yang nantinya akan menempati rumah tersebut, Data jumlah rumah perlu digunakan untuk menganalisis ketersediaan rumah saat ini terhadap kebutuhan rumah oleh penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur. Data jumlah rumah yang digunakan diperoleh dari data digitasi dari peta citra Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023. Adapun jumlah rumah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.68. Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Realisasi Tahun 2023
Melalui Program BSPS, DAK, APBD I dan APBD II**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH RTLH	TAHU 2023				RTLH Yang Belum Tereali sasi
					BSPS	DAK	APBD I	APBD II	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN PULAU GOROM	1	Desa Amarsekaru	18	-	-	-	52	0
		2	Desa Adm. Loko	2	-	-	-	2	0
		3	Desa Kataloka	63	-	-	-	-	0
		4	Desa Mida	0	-	-	-	-	0
		5	Desa Arewan	1	-	-	-	1	0
		6	Desa Dada	18	-	-	-	1	17
2	KECAMATAN PULAU PANJANG	1	Desa Wisalean	24	-	-	-	-	24
		2	Desa Ialasa	32	-	-	-	-	32
3	KECAMATAN SERAM TIMUR	1	Desa Kiltai	5	-	-	-	-	5
		2	Desa Kwamor Mata Ata	0	-	-	-	-	0
		3	Dusun Mar Desa Kilwaru	3	-	-	4	-	0
4	KECAMATAN SIRITAU WIDA TIMUR	1	Desa Suru	63	-	-	-	12	51
		2	Desa Salagor Kota	33	-	-	-	-	33
5	KECAMATAN KIAN DARAT	1	Desa Ad. Artafela	15	-	-	-	-	15
		2	Desa Angar	0	-	-	-	-	0
		3	Desa Kilga Kilwouw	17	-	-	-	7	10
6	KECAMATAN TUTUK TOLU	1	Desa Danama	10	-	-	-	-	10
		2	Desa Bati Kilwouw	0	-	-	-	-	0
7	KECAMATAN BULA	1	Desa Bula	0	-	-	-	-	0
		2	Desa Sesar	26	-	-	-	-	26
		3	Desa Fattolo	35	-	-	2	-	33
		4	Desa Tansi Ambon	22	-	-	-	4	18
		5	Desa Limumir	15	-	-	1	1	13
		6	englas	15	-	-	-	1	14
8	KECAMATAN BULA BARAT	1	Desa Banggoi Pancorang	11	-	-	-	-	11
		2	Desa Jakarta Baru	48	-	-	-	-	48
		3	Desa Waimatakabo	33	-	-	-	-	33
9	KECAMATAN KILMURI	1	Desa Sumbawa	23	-	-	-	-	23
		2	Desa Kumelang	14	-	-	-	-	14
10	KECAMATAN WERINAMA	1	Desa Tum	0	-	-	-	-	0
		2	Desa Gusalaut	2	-	-	-	-	2
		3	Desa Werinama	19	-	-	-	-	19
		4	Desa Bemo	19	-	-	-	-	19
		5	Desa Bemo Perak	54	-	-	-	-	54
		6	Desa Batuasa	65	-	-	-	11	54
11	KECAMATAN SIWALALAT	1	Desa Lapela	17	-	-	-	-	17
12	KECAMATAN KESUI WATUBELA	1	Desa Lahema	23	-	-	-	-	23
		2	Desa Tanah Baru	30	-	-	-	3	30
		3	Desa Guliar	13	-	-	-	10	3

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH RTLH	TAHU 2023				RTLH Yang Belum Tereali sasi
					BSPS	DAK	APBD I	APBD II	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		4	Desa Otademan	23	-	-	-	2	21
13	KECAMATAN GOROM TIMUR	1	Desa Tinari	10	-	-	-	9	1
		2	Desa Kotasiri	27	-	-	-	10	17
JUMLAH RTLH				848	-	-	7	126	753
Realisasi RTLH				133					

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Keberadaan beberapa kawasan permukiman kumuh (terutama kumuh berat) merupakan masalah yang mendesak untuk ditangani. Penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan secara sepihak atau parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan saling bersinergi dalam mencapai sasaran manfaat yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya, dalam hal ini pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil. Masa depan suatu wilayah sangat tergantung dari keberhasilan mencapai kehidupan masyarakat yang berimbang, kemajemukan masyarakat harus dilihat sebagai kekuatan untuk menghadapi masa depan suatu wilayah yang penuh persaingan dan permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan perintisan pembentukan jaringan kemitraan yang saling mendukung.

Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur No. 120.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur. Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi 98 (Sembilan Puluh Delapan) Lokasi di 15 (Lima Belas) Kecamatan, dengan luas total sebesar 564,97 (Lima Ratus Enam Puluh Empat koma Sembilan Puluh Tujuh) Hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.69. Luasan Kawasan Kumuh di
Kabupaten Seram Bagian Timur**

No	Lokasi	Luas (Ha)	Topografi Kawasan	Kategori	Pola Penanganan	Prioritas Penanganan
1	Kecamatan Teor	19,24	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
2	Kecamatan Kilmury	94,63	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
3	Kecamatan Bula	22,90	Permukiman Kumuh di atas Air dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
4	Kecamatan Teluk Waru	66,91	Permukiman Kumuh di dataran rendah dan kawasan perbukitan	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
5	Kecamatan Bula Barat	27,20	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
6	Kecamatan Pulau Gorom	37,54	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
7	Kecamatan Gorom Timur	23,81	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
8	Kecamatan Siritaun Wida Timur	91,75	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Tinggi
9	Kecamatan Siwalalat	32,94	Permukiman kumuh tepi pantai dan di dataran rendah	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
10	Kecamatan Werinama	17,06	Permukiman kumuh di tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
11	Kecamatan Kian Darat	36,41	Permukiman Kumuh di tepi Pantai dan di dataran rendah serta perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
12	Kecamatan Tutuk Tolu	35,05	Permukiman Kumuh di atas air, dataran rendah, dan perbukitan	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
13	Kecamatan Seram Timur	24,50	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang
14	Kecamatan Pulau Panjang	14,89	Permukiman Kumuh di atas air dan tepi pantai	Kumuh Berat	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Berat
15	Kecamatan Kesui Watubela	20,14	Permukiman Kumuh di Tepi Pantai	Kumuh Sedang	Permukiman Kembali atau Legalisasi kemudian Peremajaan	Sedang

Sumber Data : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur No. 120a Tahun 2020

Keberhasilan pembangunan bidang Urusan Perumahan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja persentase rumah layak huni, rasio permukiman layak huni dan berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Capaian kinerja indikator bidang urusan perumahan Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.70. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Rasio Rumah Layak Huni	29,39	16,97	17,51	17,15	18,60
Rasio Permukiman Layak Huni	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	83,90	84,01	86,71	88,28	91,79
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	6,87	14,20	5,428	13,48	2,89
Persentase Permukiman Tertata	94,76	94,94	94,94	94,93	94,94
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,61	1,24	1,54	1,09	1,28
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	0,98	0,13	0,52	2,47	1,33
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	60,39	60,39	60,50	60,68	60,54
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	25,25	9,09	12,12	39,89	22,72
Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,61	1,24	1,54	1,09	1,28

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat diukur dengan indikator antara lain meliputi :

- a. Rasio jumlah polisi pamong praja per 1.000 penduduk, rasio pos siskamling per jumlah desa dan jumlah linmas per 10.000 penduduk.
- b. Sedangkan pencapaian target indikator cakupan patrol petugas satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran k-3, jumlah petugas linmas, cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan yang baik, system informasi manajemen pemda dan indeks kepuasan layanan masyarakat.

Tabel II.71. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penegak PERDA	0	23	1	1	9
Jumlah Petugas Satpol PP :					
ASN	19	26	30	31	30
Honorer	280	280	150	150	155
Penyelesaian Sengketa K3	0	0	0	0	0
Jumlah Petugas Linmas	0	0	0	0	0
System Informasi Manajemen Pemda	0	0	0	0	0
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kejadian bencana di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagian besar didominasi oleh bencana banjir. Tabel II.72. merincikan jumlah kasus bencana yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023.

Tabel II.72. Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Kecamatan	Banjir					Gempa Bumi					Tanah Longsor				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pulau Gorom	2	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Kesui Watubela	0	0	2	1	-	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-
Teor	1	0	0	0	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-
Gorom Timur	0	0	3	2	-	0	0	4	0	-	0	0	0	0	-
Pulau Panjang	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Seram Timur	0	0	1	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Tutuk Tolu	2	0	1	3	-	0	0	0	0	-	1	0	0	0	-
Kilmury	2	0	2	1	-	0	0	1	0	-	0	0	0	0	-
Siritaun Wida Timur	0	0	5	3	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Kian Darat	1	0	0	0	-	0	0	1	0	-	0	0	1	0	-
Werinama	0	0	1	2	-	0	0	0	0	-	1	0	0	1	-
Siwalalat	2	0	4	1	-	3	0	0	0	-	3	0	0	0	-
Bula	7	0	3	4	-	0	0	1	1	-	0	0	0	0	-
Bula Barat	7	0	2	2	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Teluk Waru	0	0	2	2	-	10	0	0	0	-	0	0	2	0	-
Seram Bagian Timur	24	0	26	20	-	14	0	7	1	-	7	0	3	1	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

6. Urusan Sosial

a. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Keberhasilan pencapaian target indikator panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada urusan sosial di Kabupaten Seram Bagian Timur kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.73. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial
(Jumlah Panti) di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial

b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial

**Tabel II.74. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial
Berdasarkan Jumlah PMKS Yang mendapat Bantuan**

Tahun	Jumlah PMKS (Org)	Mendapat Bantuan	
		Jumlah Orang	Rasio (%)
2019	74.154	10.000	13,50
2020	74.154	10.000	13,50
2021	74.154	10.000	13,50
2022	74.154	10.000	13,50
2023	745.154	27.650	37,30

Sumber Data : Dinas Sosial

2.1.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (man power) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Keberhasilan target capaian indikator penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurun waktu tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.75. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0	0	228
Tamat Sekolah Dasar	21.147	19.564	20.011	20.948	64
Sekolah Menengah Pertama	10.620	10.355	15.793	7.715	217
Sekolah Menengah Atas/Kejuruan	11.308	15.450	15.359	12.841	1.202
D-I/II/III, S1/S2/S3	7.913	7.820	8.349	10.673	248

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

Sedangkan pencapaian target indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.76. Perkembangan Urusan Tenaga Kerja Berdasarkan Angka Pengangguran dan Tingkat Partisipasi di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Pengangguran Terbuka	1.715	1.919	2.120	1.766	1.959
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	49.273	51.270	52.489	50.411	57.313
Jumlah	50.988	53.189	54.609	52.177	59.272

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

Tabel II.77. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk Yang Bekerja	Angkatan Kerja	Rasio Penduduk Yang Bekerja %
2019	49.273	50.988	96,64
2020	51.270	53.189	96,39
2021	52.489	54.609	96,12
2022	50.411	52.177	96,62
2023	57.313	59.277	96,69

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

Tabel II.78. Jumlah Pendaftaran dan Penerimaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tahun	Pendaftaran		Jumlah	Penerimaan		Jumlah
	L	P		L	P	
2019	28	47	75	1	30	31
2020	18	4	22	0	0	0
2021	181	32	213	96	8	104
2022	93	16	109	49	4	53
2023	113	32	145	69	20	89

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan

politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

**Tabel II.79. Indeks Pemberdayaan Gender
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Uraian	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender	-	-	-	-	50%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Tabel II.80. Persentase penanganan Anak Korban kekerasan
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Uraian	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	-	20%	20%	50%	70%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

**Tabel II.81. Indeks Perlindungan Anak
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak	-	20%	20%	50%	70%

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif disemua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur antara lain, yakni prosentase jumlah tenaga kerja dibawah umur dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.82. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	98,31	99,00	25,31	64,05	62,10
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	18.516	19.788	21.857	18.911	24.002
Jumlah	18.614,31	19.887,00	21.882,31	18.975,05	24.064,10

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

3. Urusan Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia. Selain itu, ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.



❖ **Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan :**

I. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

II. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Pangan dan Gizi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

III. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Asean plus Three Emergency Rice Recess Agreement* (Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asean Plus Tiga).
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

IV. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

V. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tujuan dan fungsi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain (i) regulasi ketahanan pangan; dan (ii) ketersediaan pangan utama, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel II.83. Eksisting Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Tahun				
	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Peraturan Pemerintah Nomor : 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan pangan	Peraturan Presiden Nomor : 46 Tahun 2020 Tentang Protokol untuk Mengubah Persetujuan Cadangan Beras Darurat Asian + 3	Peraturan Presiden Nomor : 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional	Peraturan Presiden Nomor : 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor : 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)					
1. Beras	7.335,6	11.084	16.589	17.205	18.685,00
2. Jagung	18.535	2.994	467,61	453,34	1.162,73
3. Bawang Merah			775,57	553,90	510,37
4. Bawang Putih			554,31	443,50	625.749
5. Cabai Merah Keriting	390	702	186,07	88.91	301
6. Cabai Rawit	735	723	134,97	79,01	329,4
7. Daging Sapi	-	2.656	132,65	134,55	167,25
8. Daging Ayam	-	-	1.365,44	1.389,54	1.307,05
9. Telur	-	-	3.908,05	2.099,00	626,2
10. Gula Pasir	-	-	1.125,72	1.290,95	1.365,35
11. Minyak Goreng	-	-	724,8	274,98	1.996.10

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Timur

Keterangan : * Data Produksi Tidak Terolah.

** Data terolah Prognosa Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok.

b. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

**Tabel II.84. Pola Pangan Harapan (PPH)
Pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pola Pangan Harapan (PPH)	85,2	72	74,33	77,48	75,33

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Seram Bagian Timur

4. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan Millennium Development Goals (MDGs) 2018 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Penataan lingkungan hidup untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan melalui penanganan persampahan, penduduk berakses air bersih, luasan permukiman perkotaan yang tertata dan penanganan pencemaran status mutu air. Penanganan masalah persampahan di Kabupaten Seram Bagian Timu, terutama di wilayah Kota Bula terus ditingkatkan. Meningkatnya

volume sampah perkotaan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk perkotaan dan meningkatnya aktifitas industri rumahan perlu ditangani secara serius sehingga tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Dalam hal sistem penanganan sampah perkotaan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sistem pengelolaan sampah di Kota Bula dilakukan dengan pengumpulan sampah rumah tangga yang diangkut menggunakan kendaraan (mobil) sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pada TPA dilakukan pemisahan sesuai jenis dan karakteristik sampah. Capaian kinerja indikator bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.85. Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Volume Sampah Tertangani	68 m ³	68 m ³	48 m ³	48 m ³	48 m ³
Persentase Pembangunan Memiliki Izin Lingkungan %	7	11	16	10	8
Jumlah Sumber Air Bersih yang Terjaga Ketersediaannya	3	3	3	3	3
Persentase Luasan RTH Perkotaan %	-	-	-	30.000 m ²	1.159,4 m ²
Jumlah Desa Sadar Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Seram Bagian Timur

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bias disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat

jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Perkembangan penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

Tabel II.86. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Surat	Tahun %				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kartu Keluarga	78,96	81,12	100	100	100
KTP-el	80,48	82,70	86,65	90,09	71,23
Akte Kelahiran 0-18 Tahun	77,07	77,64	88,04	95,30	82,24
Akte Perkawinan	11,88	13,22	79,56	82,48	57,32
Akte Kematian	84,69	84,89	87,25	100	100

Sumber Data : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan inisiatif dari masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa hanya bisa terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.87. Jumlah Kelompok/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	198	198	198	198	198
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	198	198	198	198	198
Jumlah PKK Aktif	990	990	1.980	2.970	3.960
Jumlah Posyandu Aktif	239	239	239	248	248
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan	396	396	594	792	990

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan pencapaian target indikator penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, diantaranya cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan penyelenggaraan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat disajikan sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.88. Perkembangan Penyelenggaraan Urusan Peserta KB
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Tahun	Peserta KB							
	PUS	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntik	Pil
2019	0	0	0	0	0	146	6.443	1.529
2020	0	38	44	6	1.147	270	8.634	1.232
2021	24.073	45	53	6	1.147	601	12.537	2.396
2022	25.320	59	75	6	1.147	853	13.037	2.600
2023	26.198	83	83	6	1.257	986	13.523	3.363

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

**Tabel II.89. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
di Kabupaten Seram Bagian Timur 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	2,08	2,07	2,09	2,26	2,27
Persentase Kebutuhan Kontrasepsi yang belum terpenuhi (Unmet Need)	10,67	9,92	9,69	16,2	14,5

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

8. Urusan Perhubungan

Salah satu indikator pengukuran capaian target urusan perhubungan adalah banyak Bandara, Pelabuhan laut dan Terminal bis yang ada pada suatu daerah. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bias diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Moda transportasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah transportasi jenis pelayaran baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Saat ini pelayaran yang sedang dikelola oleh swasta adalah pelayaran untuk rute Ambon – Bula – Geser – Gorom – Kesui Watubela - Teor sebanyak 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Sedangkan pelayaran yang dikelola oleh pemerintah untuk rute Geser – Bula untuk sementara 1 kali pelayaran dalam seminggu. Sedangkan terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Pertumbuhan pelabuhan laut dan bandara di Kabupaten Seram Bagian Timur, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel-tabel dibawah ini.

**Tabel II.90. Nama Pelabuhan dan Kedalamannya
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Kecamatan	Nama Pelabuhan	Bahan Konstruksi Dermaga	Ukuran
Bula	Pelabuhan Sesar	Beton	50 M
Seram Timur	Pelabuhan Geser	Beton	50 M
Tutuk Tolu	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Beton	50 M
Kesui Watubela	Pelabuhan Air Kasar	Beton	250 M
Pulau Gorom	Pelabuhan Kesui	Beton	50 M
Gorom Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kota Siri	Beton	100 M
Werinama	Pelabuhan Bemo	Beton	60 M
Siritaun Wida Timur	Pelabuhan Air Nanang	Beton	100 M

Sumber Data : Dinas Perhubungan

**Tabel II.91. Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Kecamatan/Bandara Lapangan Terbang	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
Desa GAh, Kecamatan Tutuk Tolu/Bandara Kufar (BUAK URITI)	Kelas III Lapter Pemerintah/Goverment Airport	46	32 x 1.400 M	Hotmix

Sumber Data : Dinas Perhubungan

**Tabel II.92. frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Rute Penerbangan	Frekuensi Penerbangan (Per Minggu)	Jenis Pesawat	Maskapai Penerbangan
Direncanakan akan melintasi rute Perbangan Bula – Ambon PP	4 x / Minggu	ATR – 42	Trigana Air

Sumber Data : Dinas Perhubungan

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan berbagai pilihan masyarakat dalam mengakses informasi dari berbagai belahan dunia tanpa batas waktu. Perkembangan komunikasi dan informatika di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II.93. Perkembangan Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 – 2023**

Indikator	Tahun	
	2022	2023
Jumlah Kantor Pos	3	3
Kapasitas Sentral Telepon	60	60
Jumlah Desa Penerima sinyal Internet, Telepon Selular	124	124

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Perkembangan jenis jenis

berdasarkan jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel II.94. Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenis Koperasi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pulau Gorom	24	24	10	3	10
Kesui Watubela	6	6	5	1	5
Teor	2	2	1	-	1
Gorom Timur	12	12	10	1	10
Pulau Panjang	2	2	2	-	2
Seram Timur	16	16	10	4	10
Tutuk Tolu	7	7	5	-	5
Kilmury	11	11	9	-	8
Siritaun Wida Timur	13	13	1	-	1
Kian Darat	5	5	1	-	-
Werinama	7	7	5	-	5
Siwalalat	5	5	5	-	5
Bula	16	16	10	9	42
Bula Barat	9	9	8	3	7
Teluk Waru	5	5	4	-	3
Seram Bagian Timur	140	140	86	21	114

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

**Tabel II.95. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Jenis Koperasi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
KUD	18	18	20	20	20
KSU	58	58	91	91	88
KPN	4	4	6	6	6
KOPPAS	1	1	2	2	2
Lainnya	59	59	1	0	72

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

11. Urusan Penanaman Modal

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel II.96. Jumlah PMDN/PMA di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	0	38,3 Milyar	34,6 Milyar	21,1 Milyar	24,9 Milyar
Jumlah Izin Yang Diterbitkan	0	484 Izin	547 Izin	652 Izin	954 Izin
Indeks Kepuasan Masyarakat	0	77,38%	80,67%	84%	84%

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator antara lain :

- Jumlah organisasi pemuda;
- Jumlah organisasi olahraga;
- Jumlah kegiatan kepemudaan;
- Jumlah kegiatan olahraga; (v) jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda; dan
- Jumlah lapangan olahraga.

Keberhasilan pencapaian target urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.97. Jumlah Organisasi dan Sarana Penunjang Kepemudaan
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Pemuda	12	12	12	12	13
Jumlah Organisasi Olahraga	11	11	11	11	11
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja/Pemuda	1	1	1	1	1
Jumlah Lapangan Olahraga	11	11	11	11	12

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

13. Urusan Statistik

Urusan statistik daerah, mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan statistik, dapat diukur melalui indikator : tersedianya buku “Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka”; dan tersedianya buku “PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur”, sebagaimana data yang tersaji pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.98. Ketersediaan Informasi Manual Book
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				2023
	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kabupaten Menurut Pengeluaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kabupaten Menurut Lapangan Usaha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kabupaten Dalam Angka Untuk Kepentingan Pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Konstruksi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Statistik Kesejahteraan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kecamatan Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur

14. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan
- b. mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data tentang perkembangan pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II.99. Perkembangan Pengelolaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Nama Situs/Bangunan Bersejarah	Lokasi Situs		Pengelola
	Desa	Kecamatan	
Monument Tulabeal Goran Riun	Kataloka	P. Gorom	Pemerintah
Makam Pahlawan Mayor Abdullah	Geser	Seram Timur	Pemerintah
Masjid Tua Giro Gaja	Kataloka	P. Gorom	
Kapal Tua Bakoka	Bati Kilwouw	Seram Timur	
Masjid Tua Kilbaren	Waru	Teluk Waru	
Benteng Kosongat	Keffing	Seram Timur	
Sumur Tua	Ondor	P. Gorom	
Sumur Tua	Kataloka	P. Gorom	
Nakara	Kataloka	P. Gorom	

Sumber Data : Dinas Pariwisata

15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan, dapat diukur antara lain dengan pencapaian target indikator :

- a. jumlah perpustakaan;
- b. jumlah koleksi buku perpustakaan; dan

c. jumlah pengunjung perpustakaan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.100. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perpustakaan	231	246	269	304	304
Jumlah Koleksi Buku	13.700 Eks	16.300 Eks	18.300 Eks	21.901 Eks	21.901 Eks
Jumlah Pengunjung	150	790	962	962	5.532

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

16. Urusan Kearsipan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (a) pengelolaan arsip secara terpadu; dan (b) peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.101. Jumlah SDM dan Pengelola Arsip
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengelola Arsip Secara Terpadu	34 OPD, 2 Kecamatan	34 OPD	34 OPD, 2 Desa, 2 Parpol dan 1 Ormas	34 OPD, 2 Desa, 2 Parpol dan 1 Ormas	34 OPD, 2 Kecamatan, 2 Desa, 2 Parpol dan 1 Ormas
Peningkatan Sumber Daya Pengelola Arsip	26 Orang	16 Orang	50 Orang	50 Orang	55 Orang

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan :

1. Urusan Perikanan

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merupakan kabupaten bahari dengan 72% wilayahnya adalah lautan. Kabupaten Seram Bagian Timur wilayah ini berada pada lintang tropis serta berbatasan dengan Laut Seram, Laut Banda dan Laut Arafura. Hal ini menyebabkan Kabupaten Seram Bagian Timur kaya akan potensi sumber daya alam.

Hasil perkembangan produksi perikanan serta jumlah nelayan pada Tahun 2019-2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel II.102. Perkembangan Produksi Ikan
Menurut Jenisnya Tahun 2019-2023**

Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelagis Kecil	6.214	6.956,12	7.677,23	6.336	5.785
Pelagis Besar	6.837	7.894,36	9.917,95	4.528	6.165,30
Demersal	7.329	6.481.	6.914,82	7.518	7.853
		42			
Non Ikan	655	965	1.347,61	1.650	1.863

Sumber Data : Dinas Perikanan

**Tabel II.103. Perkembangan Produksi Ikan
Menurut Jenis Budidaya Perikanan Tahun 2019-2023**

Jenis Ikan	Produksi Tahun (Ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Keramba Jaring Apung	24,98	25,74	26,92	28,85	33,75
Rumput Laut	75,96	83,70	86,95	107,89	31,35
Kolam Air Tenang	11,35	12,30	13,58	12,54	20,70
Tambak Sederhana	1,54	1,98	2,67	2,85	24,83

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.104. Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2019	21.035	131.552.815.000	124,31	4.354.396.000
2020	19.549	104.682.720.000	126,5	4.096.979.000
2021	19.857,60	248.885.309.000	130,22	4.103.040.000
2022	20.032	247.516.540.500	152,13	4.415.510.000
2023	21.666,3	296.897.957.000	110,63	8.258.264.000

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.105. Perkembangan Jumlah Nelayan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Jenis Perikanan	Jumlah Nelayan (Orang)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Perikanan Tangkap	8.939	9.256	9.449	9.969	9.776
Perikanan Budidaya	635	513	546	512	597

Sumber Data : Dinas Perikanan

Tabel II.106. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Jenis Budidaya	Tahun				2023
	2019	2020	2021	2022	
Budidaya Laut	370	306	306	326	330
Tambak	25	24	24	37	40
Kolam	105	107	108	115	115
Keramba	0	0	0	0	0
Jaring Apung	107	109	110	110	112
Sawah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II.107. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Budidaya di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018-2023 (ton)

Jenis Budidaya	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Budidaya Laut	89,9	84,4	86,95	107,88	31,35
Tambak	2,66	2,68	2,77	2,85	24,83
Kolam	12,26	13,26	13,57	12,54	20,70
Keramba	0	0	0	0	0
Jaring Apung	25,35	26,23	26,93	28,85	33,75
Sawah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

2. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menentukan perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, Sektor pertanian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Tanaman Pangan

Luas lahan padi sawah pada tahun 2023 seluas 2.252 hektar, terdiri dari lahan sawah irigasi teknik dan lahan sawah tadah hujan/lahan kering. Produksi padi tahun 2023 sebanyak 6.256 ton. Selain Padi, di Kabupaten Seram Bagian Timur juga banyak diproduksi tanaman pangan Jagung dan Kacang Tanah.

b. Hortikultura

Tanaman hortikultura yang ditanam di kabupaten Seram Bagian Timur diantaranya ada sayuran bayam, cabai besar, cabai rawit, mentimun, sawi, terong, dan tomat. Pada tahun 2023 hampir semua tanaman memiliki produksi lebih banyak daripada tahun sebelumnya.

c. Perkebunan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, pada tahun 2023 luas lahan tanaman dan hasil produksi perkebunan paling besar adalah pada tanaman Sagu yaitu dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan 21.212 hektar dan produksi sebesar 122.628 ton. Sagu sendiri merupakan salah satu bahan makanan utama pengganti nasi yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk lebih jelasnya data mengenai luas tanam, luas panen dan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta data mengenai peternakan di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel II.108. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman pangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Jenis Tanaman Pangan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Padi Sawah	2.407	2.923	11.692	2.933	3.383	13.474	3.042	2.565	10.260	2.890	2.310	9.240	2.252	1.564	6.256
Padi Kering	-	-	-	-	-	-	350	224	224	982	749,5	1.042	-	-	-
Jagung	2.438	3.717	18.585	2.102	1.297	5.188	1.245	998	2.994	305	421	1.263	536	410	1.230
Ketela Pohon	126	151	6.795	108	55	2.475	110	34	1.530	106	103	4.635	-	-	-
Ketela Rambat	152	166	4.980	138	112	3.360	150	101	3.030	143	104	3.120	-	-	-
Kacang Tanah	153	172	258	133	126	189	138	116	174	135	121	181,5	165	167	250,5
Kacang Hijau	6	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kacang Kedelai	2	2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talas	45	73	949	38	29	377	40	21	273	34	28	364	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II.109. Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)				
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 ¹	Tahun 2023 ²	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 ¹	Tahun 2023 ²
Bayam	52	36	19	14	10	1.040	960	510	265	265
Cabai Besar	79	73	68	44	37	3.950	7.020	7.340	3.230	3.530
Cabai Rawit	147	88	72	51	40	7.350	7.260	6.580	2.450	2.460
Mentimum	30	28	16	16	13	2.400	2.190	1.100	1.110	900
Sawi	65	25	16	12	12	1.950	420	510	270	240
Terong	68	36	31	27	12	5.440	4.320	3.670	2.730	3.280
Tomat	81	58	76	47	68	4.050	8.340	9.440	4.800	7.020

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan : ¹Curah hujan tinggi sehingga tanam sayuran banyak berkurang

²Luas Panen menurun karena banyak tanaman terkena penyakit sehingga gagal panen

**Tabel II.110. Luas Areal Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019 - 2023**

Jenis Tanaman	Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
	TBM	TM	TM/TR	Produksi (ton)	TBM	TM	TTM/TR	Produksi (ton)	TBM	TM	TTM/TR	Produksi (ton)
Kelapa	3.120	13.238	854	15.480	2.972	13.081	988	15.033	3.719	13.579	729	13.697
Cengkeh	1.769	6.949	1.239	4.889	1.722	6.919	1.241	2.023	1.581	7.317	1.039	2.442
Kopi	91	211	96	43.707	106	216	93	48	121	216	93	46
Kakao	178	1.138	105	342.334	179	1.140	112	358	179	1.140	112	357
Pala	4.719	4.058	470	1.505.890	4.691	4.059	458	1.271	5.285	4.280	452	1.365
Sagu	13.103	21.198	1.145	123.258.617	13.103	21.212	1.043	122.628	13.166	21.212	1.048	122.628

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel II.111. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ekor)**

Tahun	Jenis Populasi Ternak				
	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
2019	0	0	0	0	0
2020	0	7.839	0	10	12.847
2021	0	8.653	0	0	13.436
2022	0	8.433	9	4	12.769
2023	0	9.723	12	0	12.953

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel II.112. Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ekor)**

Tahun	Jenis Populasi Unggas		
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik/Itik Manila
2019	0	0	0
2020	29.389	380	3.236
2021	31.154	0	3.146
2022	29.669	1.014	3.236
2023	25.012	105	1.921

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

3. Urusan Kehutanan

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multi fungsi bagi kehidupan manusia. Salah satu fungsi hutan sebagai penyangga air dan udara bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30% dari total hamparan darat. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan data statistik tahun 2024, 50,64% wilayah hutan di Kabupaten Seram Bagian Timur difungsikan menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan sebesar 22,56% sebagai Hutan Produksi yang di Konversi (HPK). Sementara itu, 21% sebagai Hutan Lindung (HL) serta sisanya adalah area danau, HP, KPA/KSA dan APL. Selanjutnya keberhasilan pencapaian target indikator urusan kehutananyang meliputi (i) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (ii) kerusakan kawasan hutan; dan (iii) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Untuk lebih jelasnya data mengenai kehutanan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

**Tabel II.113. Luas Kawasan Hutan dan Perairan di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (ha)**

Tahun	Fungsi Penggunaan						
	APL	Danau	HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	64.479	15	107.880	27.163	115.869	261.068	1.216
2021	64.471,38	15,14	107.879,81	27.163,03	115.869,23	261.068,79	1.126,46
2022	-	-	-	-	-	-	-
2023	64.468	15	107.880	27.163	115.869	261.068	1.216

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

4. Urusan Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan usaha jasa yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, mempunyai fungsi *Time and Place Utility*. Keuntungan kegiatan perdagangan selain memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain juga mengangkut barang ke tempat yang mempunyai nilai lebih tinggi. Jumlah perusahaan menurut badan hukum di Seram Bagian Timur tahun 2023 mencapai 954 unit, yang terbanyak dari Perorangan sebanyak 923 unit. Berikut ini jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023.

**Tabel II.114. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar	20	20	20	15	15
Toko	199	199	199	219	230
Kios	1.087	1.087	1.087	1.107	1.119
Warung	82	82	82	1.100	1.102
Jumlah	1.388	1.388	1.388	2.441	2.466

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel II.115. Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perseroan Terbatas (PT)	66	66	66	12	13
CV/Firma	237	237	237	16	11
Koperasi	198	198	198	-	4
Perorangan	1.416	1.416	1.416	619	923
Lainnya	9	9	9	2	3
Jumlah	1.926	1.926	1.926	649	954

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

5. Urusan Transmigrasi

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi, Kab. Seram Bagian Timur menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi penempatan transmigran di Indonesia. Lokasi pengembangan permukiman transmigran tersebut semua nya terletak di Kecamatan Bula, namun terbagi menjadi menjadi 6 titik kawasan yang disebut dengan istilah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Adapun uraian rincian gambaran umum tiap lokasi permukiman transmigrasi berada pada lokasi sebagai berikut :

1. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) R
2. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) T
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) U
4. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) X
5. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Y
6. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Z

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Dalam Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJP, IIII/.mD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Data tentang ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan Keputusan Bupati dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

**Tabel II.116. Ketersediaan Dokumen Perencanaan di
Kabupaten Seram Bagian Timur**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

Sumber Data : Bappeda Litbang

2. Urusan Keuangan

Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

Dalam upaya pencapaian sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan baik internal dan eksternal. Koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah, Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan berbasis Teknologi Informasi Pembinaan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan unsur yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk

mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pendanaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah. Pengelolaan keuangan diarahkan pada pengendalian proporsi belanja pegawai, dengan belanja untuk pembangunan (baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal). Tabel II.109. menunjukkan proporsi belanja pegawai di Kabupaten Seram Bagian Timur.

**Tabel II.117. Proporsi Belanja Pegawai APBD
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	293.026.379,953	258.750.490,737	277.622.539,158,40	277.705.404.573,20	271.276.190.931,16
Total Belanja	1.111.955.066,273	686.293.682,100,10	910.147.764,961,91	971.801.623.023,85	957.709.122.064,26
Persentase Belanja Pegawai	26,35	37,70	30,50	28,58	28,33

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

3. Urusan Pengawasan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar, yang masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui media massa maupun langsung kepada unit pelayanan. Keluhan ini bisa menyangkut sistem dan prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif dan kurang konsisten, sehingga kurang menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktik pungutan tidak resmi. Tabel II.118 merincikan kinerja pengawasan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

**Tabel II.118. Kinerja Pengawasan Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Cakupan Tindak Lanjut Temuan BPK			
	Temuan			
	Jumlah Temuan	25	22	24
	Nilai Temuan	Rp.6.260.081.556,60	Rp.7.208.953.764,12	Rp. 12.343.495.402,48
	Rekomendasi			
	Jumlah Rekomendasi	89	60	79
	Nilai Rekomendasi	Rp.6.260.081.556,60	Rp.7.117.717.967,52	Rp. 11.907.499.486,17
	Status Penyelesaian Tindaklanjuti			
	Jumlah Telah selesai ditindaklanjuti	54	24	20
	Nilai telah selesai ditindaklanjuti	Rp.1.134.112.703,00	Rp.297.536.000,00	Rp. 521.125.000,00
	Jumlah Dalam Prosen Tindaklanjuti	34	36	45
	Nilai Dalam Proses Tindaklanjuti	Rp.5.125.968.853,60	Rp.6.820.181.967,52	Rp. 10.509.109.386,17
	Jumlah Belum ditindaklanjuti	1	-	14
	Nilai Belum ditindaklanjuti	0	0	Rp. 877.265.100,00
	Jumlah Tidak dapat ditindaklanjuti	-	-	0
	Nilai Tidak dapat ditindaklanjuti	0	0	0
2	Temuan Inspektorat			
	Temuan	138	127	135
	Temuan yang sudah ditindaklanjuti	107	114	0
	Temuan yang belum ditindaklanjuti	52	40	0
3	Pelanggaran Disiplin PNS			
	Ringan			
	Sedang			
	Berat			
4	Pelanggaran Pidana			
	Kriminal			
	Penyalahgunaan jabatan/wewenang			
	Korupsi			
	Narkoba			

Sumber Data : Inspektorat Kab. Seram Bagian

4. Urusan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, disiplin atau taat pada ketentuan yang berlaku, serta berdedikasi tinggi, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara di

Kabupaten Seram Bagian Timur mampu melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan tahun 2023 sebanyak 3.381, yang terdiri dari 1.443 (43%) pegawai laki-laki dan 1.938 (57%) perempuan. Berikut ini tabel-tabel mengenai jumlah ASN di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023.

Tabel II.119. Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sampai dengan SD	2	1	1	1	1
SLTP/Sederajat	22	28	24	27	23
SMA/Sederajat	938	911	887	848	791
Diploma I, II	816	762	760	714	709
Diploma III	415	435	429	477	435
Diploma IV, Sarjana	1.367	1.301	1.289	1.290	1.350
Magister/Doktor/Ph.D	39			81	72
Jumlah	3.560	3.438	3.390	3.438	3.381

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tabel II.120. Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Fungsional Tertentu	0	0	1.807	0	-
Fungsional Umum	0	0	1.125	0	-
Struktural	0	0	458	0	-
Non Esselon	3.189	2.951	2.932	2.997	2.943
Jabatan Fungsional Penyetaraan	-	-	-	-	166
Esselon IV	214	319	303	181	114
Esselon III	142	150	143	112	145
Esselon II	15	18	12	138	13
Esselon I	-	0	-	10	0
Jumlah	3.560	3.438	3.390	3.438	3.381

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

**Tabel II.121. Jumlah ASN Menurut Tingkat Kepangkatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023**

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
I/a (Juru Muda)	0	0	0	0	1
I/b (Juru Muda Tk.I)	3	1	0	0	1
I/c (Juru)	18	12	6	6	2
I/d (Juru Tk.I)	28	10	13	13	14
Golongan I	49	23	19	19	18
II/a (Pengatur Muda)	160	104	42	44	42
II/b (Pengatur Tk.I)	401	354	285	203	180
II/c (Pengatur)	638	575	267	334	338
II/d (Pengatur Tk.I)	410	396	408	436	434
Golongan II	1.609	1.429	1.002	1.017	994
III/a (Penata Muda)	616	665	705	658	650
III/b (Penata Muda TK. I)	340	408	524	554	547
III/c (Penata)	438	427	327	336	337
III/d (Penata Muda TK. I)	344	337	564	572	564
Golongan III	1.738	1.837	2.120	2.120	2.098
IV/a (Pembina)	114	107	186	209	199
IV/b (Pembina TK.I)	38	31	47	60	63
IV/c (Pembina Utama Muda)	11	10	16	13	8
IV/c (Pembina Utama Madya)	1	1	0	0	4
IV/e (Pembina Utama)	0	0	0	0	0
Golongan IV	164	149	249	282	271
Jumlah	3.560	3.438	3.390	3.438	3.381

Sumber Data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat diukur dengan indikator (i) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; dan (ii) kegiatan pembinaan politik daerah. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.122. Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat pada Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di
Kabupaten Seram Bagian Timur**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	0	0	0	0	0

Sumber Data : Badan Kesbangpol

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomidaerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas untuk menarik pelaku ekonomi baik di Kabupaten Seram Bagian Timur maupun di luar untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur yang dapat menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing daerah, yaitu iklim yang kondusif, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Di samping itu, untuk meningkatkan daya saing, beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain kondisi makro ekonomi, dimana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor serta tersedianya fasilitas dan kualitas infrastruktur yang mencukupi.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran. Distribusi pengeluaran daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel.

Tabel II.123. PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Uraian	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%	Milyar Rp	%
Konsumsi Rumah Tangga	1.714,51	59,03	1.765,02	60,57	1.816,69	57,17	1.958,45	53,83	2.087,63	59,49
Konsumsi LNPRT	44,78	1,54	47,95	1,65	49,91	1,57	56,74	1,50	60,14	1,71
Konsumsi Pemerintah	1.486,98	51,20	1.266,19	43,45	1.334,96	42,01	1.329,62	36,65	1.367,56	38,97
PMTB	1.122,51	38,65	1.140,32	39,13	1.195,55	37,62	1.255,43	34,51	1.271,30	36,23
Perubahan Inventori	18,33	0,63	19,31	0,66	19,13	0,60	19,88	0,55	19,93	0,57
Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.482,72)	(51,05)	(1.324,70)	(45,46)	(1.238,53)	(38,98)	(979,98)	(26,94)	1.297,20)	(36,96)

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2019-2023

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada tabel

**Tabel II.124. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.714,51	1.765,02	1.816,69	1.958,45	2.087,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.031	1.044,40	1.048,11	1.096,48	1.137,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	59,03	60,57	57,17	53,83	59,49
Rata-rata konsumsi per Kapita per tahun (Juta Rp)					
a. ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	15,28	12,87	12,96	13,74	14,42
b. ADHK 2010 (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010)	9,19	7,62	7,48	7,69	7,85
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	3,82	1,31	0,35	4,62	3,73
b. Perkapita	4,70	17,09	1,82	2,91	2,07
Jumlah Penduduk (ribu orang)	112,23	137,13	140,18	142,51	144,82

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2019-2023

Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian karena selain berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah juga merupakan konsumen akhir yang perilaku permintaannya akan mempengaruhi struktur penyediaan domestik. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara simultan. Cakupan pengeluaran konsumsi pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya dari pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi pengeluaran pemerintah pusat dan sebagian pengeluaran

pemerintah provinsi yang melakukan kegiatan diwilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

**Tabel II.125. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.486,98	1.266,19	1.334,96	1.329,62	1.367,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	927,53	767,89	795,75	776,35	782,58
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	51,20	43,45	42,01	36,55	38,97
Konsumsi Pemerintah Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	13,25	9,23	9,52	9,33	9,44
b. ADHK 2010	8,26	5,60	5,68	5,45	5,40
Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah (Juta Rp)					
a. ADHB	417,69	368,29	393,79	386,74	404,48
b. ADHK 2010	260,54	223,35	234,74	225,81	231,46
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi Pemerintah	22,38	(17,21)	3,63	(2,44)	0,80
b. Konsumsi Perkapita	23,41	(32,24)	1,38	(4,03)	(0,81)
Jumlah Pegawai Pemerintah	3.560	3.438	3.390	3.438	3.381
Jumlah Penduduk (ribu orang)	112,23	137,13	140,18	142,51	144,82

Sumber Data : PDRB Kab. Seram Bagian Timur Menurut Pengeluaran 2019-2023

2.1.3.4.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat.

**Tabel II.126. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita				Total	
	Makanan	Persen	Non Makanan	Persen		
2019	461.745	59,71	311.557	40,29	773.303	100
2020	545.659	57,86	397.432	42,14	943.091	100
2021	446.056	53,52	387.440	46,48	833.496	100
2022	524.059	56,20	408.424	43,80	932.482	100
2023	588.039	54,42	492.459	45,58	1.080.498	100

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah diberbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Keberhasilan terhadap penyediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain :

1. Jalan

Ruas jalan di Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari ruas Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

**Tabel II.127. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023 (km)**

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Negara	90,00	90,00	90,00	206,43	194,31
Provinsi	153,40	153,40	153,40	153,40	161,48
Kabupaten/Kota	404,14	404,14	404,14	286,14	286,14
Jumlah	647,54	647,54	647,54	645,97	641,93

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024



2. Pelabuhan

Terdapat beberapa jenis pelabuhan di Kabupaten Seram Bagian Timur seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.128. Nama Pelabuhan dan Kedalamannya
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Kecamatan	Nama Pelabuhan	Bahan Konstruksi Dermaga	Ukuran
Bula	Pelabuhan Sesar	Beton	50 M
Seram Timur	Pelabuhan Geser	Beton	100x8
	Pelabuhan Penyeberangan ASDP	Beton	50 M
Tutuk Tolu	Pelabuhan Air Kasar	Beton	250 M
Kesui Watubela	Pelabuhan Kesui	Beton	46x8
	Pelabuhan Penyeberangan Kurwar	Beton	100x100
Pulau Gorom	Pelabuhan Namalua	Beton	73x8
Gorom Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kota Siri	Beton	60 M
Werinama	Pelabuhan Bemo	Beton	100 M
Siritaun Wida Timur	Pelabuhan Air Nanang	Beton	
Teor	Pelabuhan Teor	Beton	

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

3. Bandara

**Tabel II.129. Bandara Lapangan Terbang dan Keadaannya
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Kecamatan/Bandara Lapangan Terbang	Kelas	Kapasitas	Ukuran	konstruksi
Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu/Bandara Kufar (BUAK URITI)	Kelas III Lapter Pemerintah/Goverment Airport	46	32 x 1.400 M	Hotmix

Sumber Data : Dinas Perhubungan

**Tabel II.130. frekuensi Penerbangan Teratur (SKED) Menurut Rute Penerbangan di
Kabupaten Seram Bagian Timur**

Rute Penerbangan	Frekuensi Penerbangan (Per Minggu)	Jenis Pesawat	Maskapai Penerbangan
Direncanakan akan melintasi rute Perbangan Bula – Ambon PP	4 x / Minggu	ATR – 42	Trigana Air

Sumber Data : Dinas Perhubungan

4. Listrik

Tabel II.131. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2019	9.839.400	20.444.461	18.491.893	319.766	9,76
2020	9.380.000	22.554.361	20.912.001	-	7,08
2021	10.308.000	20.640.000	15.266.924	-	13,58
2022	11.259.000	24.684.560	21.600.000	960.359	8,88
2023	11.730.000	25.546.010	23.312.057	1.325.292	6,56

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Tabel II.132. Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Werinama	N.A	931	1.033	-	1.012
Geser	857	885	898	-	1.232
Ondor	3.698	3.844	4.208	-	4.117
Kesui	915	1.074	1.115	-	1.332
Kian Darat	2.961	2.956	3.445	-	3.624
Amarsekaru	1.131	1.135	1.181	-	1.219
Bula	8.860	10.049	10.378	-	11.029
Pulau Panjang	147	147	147	-	599
Teor	40	40	40	-	113
Keffing-Kellu	-	-	224	228	240
Effa	-	-	-	371	232
Guli-Guli	-	-	-	194	195
Kwamor	-	-	-	331	336
Namalomin	-	-	-	444	113
Siwalalat	-	-	-	-	1.261
Seram Bagian Timur	N.A	20.914	22.669	25.212	26.654

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2023

5. Fasilitas Bank dan Non Bank

Sebagai tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator fasilitas bank dan non bank, antara lain (i) jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya; dan (ii) jenis dan jumlah perusahaan asuransi. Pencapaian target indikator jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, serta jenis dan jumlah perusahaan asuransi di Kabupaten Seram Bagian Timur sepanjang tahun 2019-2023, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada table dibawah ini.

**Tabel II.133. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Jenis Bank			
	Bank Pemerintah	Bank Daerah	Bank Swasta	Bank Syariah
2019	1	0	3	2
2020	1	0	3	2
2021	1	0	3	2
2022	1	0	4	1
2023	1	0	4	1

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

6. Jenis, Kelas dan Jumlah Hotel/Penginapan

Ketersediaan hotel/penginapan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan hotel/penginapan. Dalam konteks uraian jenis, kelas dan jumlah hotel/penginapan, maka hotel/penginapan dapat dikelompokkan pada 2 kelas, yaitu :

**Tabel II.134. Nama Akomodasi, Alamat, Kamar, Tempat Tidur
di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023**

Nama Akomodasi	Desa	Kamar	Tempat Tidur
Penginapan Restu	Bula	8	10
Penginapan Damai	Bula	21	21
Penginapan Arema	Bula	29	33
Hotel Mutiara	Bula	30	34
Hotel Surya	Bula	30	34
Penginapan SS	Bula	18	21
Penginapan Rifa I	Bula	6	6
Penginapan Rifa II	Bula	7	7
Hotel Akham	Bula	14	17
Penginapan Delta	Bula	12	12
Penginapan Aurifan	Bula	12	12
Penginapan Rizki	Bula	8	8
Penginapan Aries	Bula	8	8
Penginapan Jati	Bula	8	8

Nama Akomodasi	Desa	Kamar	Tempat Tidur
Penginapan An-Nisa	Bula	4	4
Penginapan Solo Terapung	Geser	8	10
Penginapan Cahaya Kasih	Geser	8	13
Penginapan Nusantara	Geser	12	16
Penginapan Dua Saudara	Geser	6	8
Penginapan Putri Sembilan	Werinama	4	4
Pondok Wisata Alhidayah	Werinama	3	3
Penginapan Damai	Pulau Gorom	10	10
Penginapan Liliu	Pulau Gorom	5	5

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

**Tabel II.135. Nama Akomodasi Berdasarkan Klasifikasi
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Nama Akomodasi	Klasifikasi			
	Penginapan	Non Bintang	Bintang I	Bintang II
Penginapan Restu	√	-	-	-
Penginapan Damai	√	-	-	-
Penginapan Arema	√	-	-	-
Hotel Mutiara	√	-	-	-
Hotel Surya	√	-	-	-
Penginapan SS	√	-	-	-
Penginapan Rifa I	√	-	-	-
Penginapan Rifa II	√	-	-	-
Hotel Akham	√	-	-	-
Penginapan Delta	√	-	-	-
Penginapan Aurifan	√	-	-	-
Penginapan Rizki	√	-	-	-
Penginapan Aries	√	-	-	-
Penginapan Jati	√	-	-	-
Penginapan An-Nisa	√	-	-	-
Penginapan Solo Terapung	√	-	-	-
Penginapan Cahaya Kasih	√	-	-	-
Penginapan Nusantara	√	-	-	-
Penginapan Dua Saudara	√	-	-	-
Penginapan Putri Sembilan	√	-	-	-
Pondok Wisata Alhidayah	√	-	-	-
Penginapan Damai	√	-	-	-
Penginapan Liliu	√	-	-	-

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Keamanan dan Ketertiban

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas yang terjadi pada suatu daerah. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjad iberapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delikaduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1(satu) tahun.

Gambaran terkait dengan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.136. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan pada Polres
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	0	2	0	1	0
Penganiayaan	30	28	20	43	25
Pemerkosaan	0	0	0	1	0
Pencurian	16	13	5	6	9
Penggelapan	1	0	1	1	2
Perzinaan	4	2	2	2	2
Melarikan Anak Gadis	0	0	0	0	0
Pembakaran	1	0	0	0	0
Pengrusakan	2	3	2	1	2
Perjudian	-	-	0	0	0
Penipuan	4	3	0	3	2
Pemerasan	0	0	0	0	0
Percobaan Pelaksanaan Kejahatan	0	2	0	0	0
Pengeroyokan	12	15	10	39	11
Kejahatan Lainnya	32	46	28	58	31

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

**Tabel II.137. Jumlah Perkara yang Diterima dan Diselesaikan di
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2023**

Tahun	Pidana		Perdata		Jumlah	
	Diterima	Diselesaikan	Diterima	Diselesaikan	Diterima	Diselesaikan
2019	102	80	0	0	102	80
2020	114	84	0	0	114	84
2021	68	65	0	0	68	65
2022	155	99	0	0	155	99
2023	83	35	0	0	83	35

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

2. Regulasi Penanaman Modal

Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keputusan Bupati Nomor 258 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Keputusan Bupati Nomor 259 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dandaerah. Hal ini dapat disadari, oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan Sumber

Daya Manusia diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel II.138. Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
SD	20.608	340	20.948	98,38	11.757	32.705	64,05
SMP	7.599	116	7.715	98,50	8.296	16.011	48,19
SMA	12.119	722	12.841	94,38	5.597	18.438	69,64
SMK	2.129	59	2.188	97,30	697	2.885	75,84
Diploma I/II/III	1.412	144	1.556	90,75	226	1.782	87,32
Perguruan Tinggi	6.544	385	6.929	94,44	1.058	7.987	86,75
Jumlah	50.411	1.766	52.177	96,62	27.631	79.808	65,38

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Sosial

1. Pendidikan

Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang

dan jalur Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Permendikbudristek 32 tahun 2022 tentang SPM Pendidikan mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; pencapaian SPM Pendidikan; dan pelaporan dan evaluasi. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini; Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan.

**Tabel II.139. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Pendidikan**

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Anak Usia 6 Tahun Belajar di Sekolah PAUD					
Persentase partisipasi warga negara usia 6 thn Pada Sekolah PAUD	62,65	63,92	68,01	71,04	73,47
2. Anak Usia 6-12 Tahun Belajar di Sekolah Dasar					
Persentase Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 12 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	60,65	65,92	69,35	72,04	73,47
3. Anak usia 12 - 15 tahun belajar di sekolah menengah Pertama					
Persentase partisipasi warga negara usia 12 - 15 tahun dalam pendidikan menengah Pertama	63,65	69,92	70,01	71,04	72,47

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Tabel II.140. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Kesehatan

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	64	42	97	56	758
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	56	72	76	39	627
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (usia 0 - 28 hr)	51	62	96	49	735
Pelayanan Kesehatan Balita	85	100	99	43	9.648
Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	59	59	4	93	6.411
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	87	89	92	8.346
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (usia 15-59 Thn)	43	36	45	25	17.041
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (Usi > 15 Thn)	10	6	3	2	3.854
Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus	100	49	10	32	191
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	76	20	0	54	68
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	51	20	31	53	970
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	16	21	77	1.336

Sumber Data : Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh OPD yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a) SPM Bidang Pekerjaan Umum mencakup SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi dan SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota.
- b) SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1. Pemenuhan kebutuhan Air Minum, untuk sub-bidang Air Minum; dan
 2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, untuk sub-bidang air limbah.
- c) Materi muatan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 1. Pelayanan Dasar;
 2. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 3. Penerima Pelayanan Dasar.

**Tabel II.141. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan pendukung ekonomi daerah	52,40%	71,56%	78,70%	92,29%	96,82%
Persentase meningkatkan kualitas dan kuantitas jembatan pendukung ekonomi daerah	0	0	0	88,58%	77,69%
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana drainase	0	0	0	0	
Panjang Turap/ talud/bronjong	5.750	6.318	7.261	8.588	10.100
Persentase meningkatnya kualitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	83,23%	92,05%	92,05%	92,05%	92,05%
Persentase meningkatnya kualitas pengendalian banjir	0	0	0	0	0
Persentase meningkatnya infrastruktur air minum	63,58%	63,91%	63,91%	71,11%	
Persentase meningkatnya infrastruktur Sanitasi	43,99%	49,99%	51,72%	55,51%	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

**Tabel II.142. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten					
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah	0	0	0	0,01	2 Unit (2/2*100)=100%
Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten					
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah/Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman

5. Ketenteraman, Ketersiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah satu indikator SPM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur. Indikator ini merupakan salah

satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/ Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah:

**Tabel II.143. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	80%	80%	80%
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0	0	95%	100%	100%
Cakupan Pengamanan pada Pos Penjagaan di Fasilitas Pemerintah	0	0	100%	100%	100%
Cakupan Pelaksanaan PAM Unjuk rasa dan Hari/Pejabat Penting	0	0	90%	100%	100%
Cakupan Penanganan Ketertiban Umum	0	0	75%	72%	76%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab III pasal 26 (dua puluh enam) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

**Tabel II.144. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Urusan Sosial**

indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Penyandang Disabilitas Terlantar					
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	0	35%	37%
2. Anak Terlantar					
Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	0	9%	3%
3. Lansia Terlantar					
Persentase Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0	0	8%	18%
4. Gepeng					
Persentase Gelandangan, pengemis yang tertangani	0	0	0	0	0
5. Bencana alam dan sosial					
Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang tertangani	5%	0	45%	77%	15%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu diarahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka focus perhatian sebagai lingkup kajian diarahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Secara umum faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.



Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 turut mempertimbangkan hasil capaian program dan indikator kinerja RKPD Tahun 2023. Berikut adalah hasil evaluasi capaian program dan indikator kinerja RKPD Tahun 2023 menurut Misi dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026.

Tabel II.145. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan di Kabupaten Seram Bagian Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		858	106.068.002.311	650	65.832.962.058	76%	62%	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		63	45.105.954.047	63	36.899.401.074	100%	81%	
1.1.03.01.3.2.01	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	29.950.000	1 Lap	29.950.000	100%	100%	
1.03.01.2.01.01	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	29.950.000	1 Lap	29.950.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48 Org	43.868.051.720	48 Org	35.519.372.111	100%	85%	
01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Org	43.868.051.720	48 Org	35.519.372.111	100%	85%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1 Lap	60.060.000	1 Lap	60.060.000	100%	100%	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	60.060.000	1 Lap	60.060.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.05	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		5	817.384.420	5	815.548.800	100%	99%	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pkt	45.000.000	1 Pkt	45.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	165.660.000	1 Pkt	165.660.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Pkt	175.989.420	1 Pkt	175.95.420	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	99.980.000	1 Lap	99.980.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	330.755.000	1 Lap	329.003.800	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Unit	93.800.000	2 Unit	85.120.000	100%	99%	
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Disediakan	2 Unit	93.800.000	2 Unit	85.120.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	369.597.407	4	363.254.413	100%	91%	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	5.020.400	1 Lap	5.020.400	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Olahraga
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	86.888.427	1 Lap	80.546.308	100%	98%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	9.938.580	1 Lap	9.937.705	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	264.750.000	1 Lap	264.750.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	11.110.500	1 Unit	11.095.750	100%	100%	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	11.110.500	1 Unit	11.095.750	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		795	60.961.048.264	587	28.933.560.984	74%	47%	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		419	29.025.744.784	267	1.822.916.885	64%	40%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	705.000.000	2 Ruang	676.143.000	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.03	Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	605.218.272	3 Ruang	565.377.877	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	716.697.517	4 Ruang	679.008.700	100%	95%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	541.158.664	3 Ruang	507.226.350	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	733.246.382	4 Unit	693.343.850	100%	95%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2.093.053.714	10 Unit	1.989.405.225	100%	95%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	1.335.353.305	6 Ruang	1.286.584.621	100%	96%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	805.000.000	4 Paket	749.269.000	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	600.000.000	3 Paket	595.800.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta didik	450.000.000	200 Peserta didik	450.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 Paket	1.434.108.714	20 Paket	1.393.818.202	100%	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.24	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	1 Satuan Pendidikan	100.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	152 Satuan Pendidikan	16.630.000.000	0 Satuan Pendidikan	-	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.276.908.216	7 Ruang	2.136.940.060	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah		346	26.729.652.680	291	15.775.359.272	84%	59%	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	31.614.450	1 Ruang	31.577.450	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	147.500.200	1 Ruang	147.500.200	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Kelas Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.213.648.800	5 Ruang	1.134.341.325	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	10 Ruang	3.782.694.500	10 Ruang	3.516.761.245	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	2.005.817.985	10 Unit	1.857.447.127	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	3.415.341.445	10 Unit	3.167.369.325	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	1.401.426.000	4 Ruang	1.298.858.050	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	773.543.000	4 Ruang	722.481.650	100%	93%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	772.570.000	3 Ruang	723.571.650	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	446.076.000	3 Ruang	417.436.650	100%	94%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	253.420.000	2 Unit	233.718.000	100%	92%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.25	Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Pkt	225.000.000	3 Pkt	224.614.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2 Pkt	150.000.000	2 Pkt	149.772.300	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	550.000.000	200 Peserta Didik	550.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Pkt	100.000.000	1 Pkt	99.900.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Org	1.330.000.000	30 Org	1.330.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1 Satuan Pendidik	150.000.000	1 Satuan Pendidik	150.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidik	9.960.990.000	0 Satuan Pendidik	-	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1 Lap	20.010.300	1 Lap	20.010.300	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		29	5.193.110.800	29	1.335.284.827	100%	26%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	397.820.500	2 Unit	388.470.175	100%	98%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.02	Pembanguna Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	680.491.000	4 Unit	672.165.352	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.12	Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	175.000.000	2 Paket	174.650.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	99.999.300	1 Satuan Pendidikan	99.999.300	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20 Satuan Pendidikan	3.839.800.000	0 Satuan Pendidikan	-	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 Satuan Pendidikan	12.540.000	0 Satuan Pendidikan	-	0%	0%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	1 Satuan Pendidikan	12.540.000	0 Satuan Pendidikan	-	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1.489	87.523.670.368	1.459	54.425.410.388	98%	61%	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA		171	14.635.739.667	171	14.401.367.887	100%	98%	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	288.516.000	8	288.516.000	100%	100%	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dok	200.000.000	4 Dok	199.855.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Lprn	400.000.000	4 Lprn	400.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		90	11.225.625.148	90	11.075.402.777	100%	98%	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang	10.370.825.148	80 Orang	10.220.602.777	100%	98%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	246.000.000	1 Dok	246.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dok	188.800.000	4 Dok	188.800.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester an SKPD	4 Lap	200.000.000	4 Lap	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	220.000.000	1 Dok	220.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30	600.000.000	30	600.000.000	100%	100%	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	250.000.000	4 Dok	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	22 Lap	100.000.000	22 Lap	100.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Lprn	250.000.000	4 Lprn	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		16	688.800.000	16	686.900.000	100%	99%	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dok	200.000.000	4 Dok	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	4 Dok	288.800.000	4 Dok	287.800.000	100%	99%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.07.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Pegawai	200.000.000	8 Pegawai	199.100.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		15	794.592.904	15	792.786.000	100%	99%	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	1 Paket	199.497.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	110.868.904	2 Paket	110.412.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lprn	483.724.000	12 Lprn	482.877.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5 Unit	268.703.164	5 Unit	249.221.614	100%	92%	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	43.160.000	1 Unit	42.560.000	100%	99%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	225.543.164	4 Unit	206.661.614	100%	92%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Lap	400.018.451	3 Lap	339.362.496	100%	85%	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpebihnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lpr	19.983.800	1 Lpr	18.975.000	100%	95%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpebihnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lpr	200.034.651	1 Lpr	140.387.496	100%	70%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpebihnya Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	1 Lpr	180.000.000	1 Lpr	180.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Unit	58.000.000	4 Unit	57.840.000	100%	99%	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	54.000.000	2 Unit	53.840.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Luncur)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	4.000.000	2 Unit	4.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.015	72.039.405.741	985	39.202.817.541	97%	54%	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		53	22.876.059.180	53	22.199.929.974	100%	97%	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3 Unit	440.000.000	3 Unit	381.042.825	100%	86%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DAK)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	4.186.742.000	2 Unit	3.337.661.062	100%	79%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	159.000.000	1 Unit	158.761.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		4 Unit	430.00.000	4 Unit	301.967.760	100%	70%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Luncur)		4 Unit	74.984.000	4 Unit	74.984.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		7 Unit	78.252.000	7 Unit	77.450.000	100%	98%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)		7 Unit	6.350.000.000	7 Unit	6.348.220.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)		22 Unit	3.860.590.180	22 Unit	3.812.987.150	100%	98%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin (DAK)		1 Paket	5.621.360.000	1 Paket	5.617.363.664	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAK)		1 Paket	1.935.131.000	1 Paket	1.919.492.513	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	170.000.000	1 Paket	170.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		896	47.663.346.561	888	15.532.287.567	99%	33%	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	200.000.000	100 Orang	195.500.000	100%	97%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Luncur)	Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	710.367.000	100 Orang	710.367.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	220 Orang	300.000.000	220 Orang	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	220 Orang	200.000.000	220 Orang	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dok	100.000.000	1 Dok	99.500.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	400.000.000	1 Dok	399.600.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dok	400.000.000	2 Dok	398.400.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.02.2.02.36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dok	11.961.295.700	2 Dok	7.108.032.100	100%	59%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.38	Operasional Pelayanan Puskesmas (DAK)	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dok	32.039.002.861	22 Dok	5.221.988.467	100%	16%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.39	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DAK)	Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	4 Unit	452.681.000	0 Unit	-	0%	0%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		220 Org	200.000.000	220 Org	198.900.000	100%	99%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		44	1.100.000.000	44	1.070.600.00	100%	99%	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	22 Dok	700.000.000	22 Dok	670.600.000	100%	96%	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22 Puskesmas	400.000.000	22 Puskesmas	400.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/		22 Unit	400.000.000	0 Unit	400.000.000	0%	100%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kota								
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	22 Unit	400.000.000	0 Unit	400.000.000	0%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		300 Orang	250.000.000	300 Orang	250.000.000	100%	100%	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		300 Orang	250.000.000	300 Orang	250.000.000	100%	100%	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Tepenuhinya pendistribusian serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas	300 Orang	250.000.000	300 Orang	250.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		2 Dok	473.524.960	2 Dok	471.224.960	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	100%	100%	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		1 Dok	273.524.960	1 Dok	271.224.960	100%	99%	
1.02.04.2.03.01	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan		1 Dok	273.524.960	1 Dok	271.224.960	100%	99%	Dinas Kesehatan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DAK)								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1 Dok	125.000.000	1 Dok	100.000.000	100%	80%	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dok	125.000.000	1 Dok	100.000.000	100%	80%	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dok	125.000.000	1 Dok	100.000.000	100%	80%	Dinas Kesehatan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN		197	36.747.936.566	197	36.535.984.824	100%	99%	RSUD Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BIDANG KESEHATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH KABUPATEN/KOTA		169	9.616.906.747	169	9.409.260.034	100%	99%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		139 Orang	8.118.374.555	139 Orang	7.915.305.835	100%	97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		139 Orang	8.118.374.555	139 Orang	7.915.305.835	100%	97%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		23	550.661.200	23	546.263.777	100%	99%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	24.993.730	100%	99%	RSUD Bula
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	148.837.800	3 Paket	148.647.734	100%	99%	RSUD Bula
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.201.500	1 Paket	20.166.033	100%	99%	RSUD Bula
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Paket	201.841.900	3 Paket	201.702.400	100%	99%	RSUD Bula
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Lap	154.780.000	15 Lap	150.753.880	100%	97%	RSUD Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Paket	61.380.568	1 Paket	61.310.000	100%	99%	
	Pengadaan Mebel		1 Paket	61.380.568	1 Paket	61.310.000	100%	99%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Lap	779.461.424	4 Lap	779.392.524	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	330.860.424	1 Lap	330.860.424	100%	100%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	55.000.000	1 Lap	54.932.100	100%	99%	RSUD Bula
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	393.601.000	2 Lap	393.600.000	100%	100%	RSUD Bula
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	107.029.000	2 Lap	106.987.898	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Lap	107.029.000	2 Lap	106.987.898	100%	99%	RSUD Bula
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		17	26.947.398.819	17	26.943.093.790	100%	99%	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3	250.001.000	3	249.980.000	100%	99%	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1 Paket	50.000.000	1 Paket	49.980.000	100%	99%	RSUD Bula
	Pengadaan Bahan Habis Pakai		1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	100%	100%	RSUD Bula
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	100%	100%	RSUD Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12 Dok	26.620.549.619	12 Dok	26.616.301.800	100%	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dok	627.029.165	4 Dok	626.944.906	100%	99%	RSUD Bula
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dok	10.409.589.223	6 Dok	10.409.248.998	100%	100%	RSUD Bula
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1 Dok	15.279.967.831	1 Dok	15.279.600.000	100%	100%	RSUD Bula
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Dok	303.963.400	1 Dok	300.507.896	100%	98%	RSUD Bula
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		1 Dok	43.391.100	1 Dok	43.391.100	100%	100%	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dok	43.391.100	1 Dok	43.391.100	100%	100%	RSUD Bula
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/		1 Dok	33.457.100	1 Dok	33.420.890	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kota								
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1 Dok	33.457.100	1 Dok	33.420.890	100%	99%	RSUD Bula
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		11 Org	183.631.000	11 Org	183.631.000	100%	100%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		11 Org	183.631.000	11 Org	183.631.000	100%	100%	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		11 Org	183.631.000	11 Org	183.631.000	100%	100%	RSUD Bula
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		313	8.882.077.452	313	8.583.267.307	100%	96%	RSUD Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		304	6.999.455.004	304	6.940.804.420	100%	99%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		202 Org	4.574.345.498	202 Org	4.527.636.370	100%	98%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Org	4.574.345.498	202 Org	4.527.636.370	100%	98%	RSUD Pulau Gorom
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Org	101.216.000	4 Org	101.216.000	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Org	101.216.000	4 Org	101.216.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		86	1.630.500.706	86	1.618.993.150	100%	99%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.828.156	1 Paket	34.909.500	100%	81%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	422.734.000	6 Paket	421.830.250	100%	99%	RSUD Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3 Paket	51.900.000	3 Paket	51.900.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	427.789.550	6 Paket	427.459.650	100%	99%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.825.000	2 Paket	25.469.750	100%	91%	RSUD Pulau Gorom
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Lap	168.660.000	2 Lap	168.660.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Lap	488.764.000	66 Lap	488.764.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9	533.792.800	9	533.358.900	100%	99%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	163.920.000	2 Unit	163.920.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Pengadaan Mebel		2 Paket	119.646.800	2 Paket	119.458.200	100%	99%	RSUD Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	150.226.000	4 Unit	149.980.700	100%	99%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	109.600.000	2 Lap	109.600.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	13.600.000	1 Lap	13.600.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	96.000.000	1 Lap	96.000.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100%	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100%	100%	RSUD Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		9	1.882.622.488	7	1.642.462.887	78%	87%	
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		7	1.027.786.048	5	816.426.487	71%	79%	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	187.744.278	0 Unit	-	0%	0%	RSUD Pulau Gorom
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0%	0%	RSUD Pulau Gorom
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	1 Paket	230.000.000	1 Paket	229.633.500	100%	99%	RSUD Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan							
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	390.041.770	1 Paket	390.041.770	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	3 Paket	196.751.535	100%	98%	RSUD Pulau Gorom
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 Dok	854.836.400	2 Dok	826.036.400	100%	97%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dok	247.386.400	1 Dok	247.386.400	100%	100%	RSUD Pulau Gorom
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1 Dok	607.450.000	1 Dok	578.650.000	100%	95%	RSUD Pulau Gorom
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		546	125.242.877.074	546	112.095.986.332	100%	89%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		127	22.473.745.091	127	18.003.615.839	100%	80%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	30.000.000	2 Dok	30.000.000	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15.000.000	1 Dok	15.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		65	3.503.604.976	65	3.443.994.046	100%	98%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	3.477.504.976	63 Orang	3.417.894.046	100%	98%	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	11.100.000	1 Lap	11.100.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11	293.076.400	11	293.076.400	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		4 Pkt	193.076.400	4 Pkt	193.076.400	100%	100%	Dinas PUPR
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13	2.037.343.000	13	2.035.371.629	100%	99%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Pkt	690.166.200	7 Pkt	689.272.350	100%	99%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	25.026.500	1 Pkt	24.497.421	100%	97%	Dinas PUPR
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Pkt	25.471.300	1 Pkt	25.399.858	100%	99%	Dinas PUPR
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Lap	49.560.000	1 Lap	49.550.000	100%	99%	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap	1.247.119.000	3 Lap	1.246.652.000	100%	99%	Dinas PUPR
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20	12.805.837.700	20	11.929.391.631	100%	93%	
	Pengadaan Mebel		1 Pkt	90.196.000	1 Pkt	90.160.000	100%	99%	Dinas PUPR
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	196.000.000	1 Unit	195.000.000	100%	99%	Dinas PUPR
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	11.819.641.700	14 Unit	10.944.231.631	100%	92%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	450.000.000	2 Unit	450.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	250.000.000	2 Unit	250.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Lap	275.355.840	4 Lap	271.782.133	100%	98%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap	100.320.000	2 Lap	96.754.527	100%	96%	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	175.035.840	2 Lap	175.027.606	100%	98%	Dinas PUPR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Unit	3.528.527.175	12 Unit	3.190.730.783	100%	77%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	80.000.000	1 Unit	79.580.000	100%	99%	Dinas PUPR
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 Unit	3.448.527.175	11 Unit	3.111.150.783	100%	90%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		42	15.851.621.766	41	14.840.709.598	99%	95%	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		38 Paket	15.601.621.766	37 Paket	14.590.804.414	99%	95%	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	16 Paket	4.284.998.750	16 Paket	3.881.477.453	100%	90%	Dinas PUPR
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 Paket	170.421.650	1 Paket	155.194.850	100%	91%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	21 Paket	11.316.623.016	21 Paket	10.709.327.161	100%	94%	Dinas PUPR
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Dok	250.000.000	4 Dok	249.905.184	100%	100%	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	4 Dok	250.000.000	4 Dok	249.905.184	100%	99%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		12	4.462.698.740	12	3.920.295.850	100%	87%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		12	3.162.698.740	12	2.703.397.010	100%	85%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		2 Dok	200.000.000	2 Dok	200.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	9 Paket	2.837.698.740	9 Paket	2.378.397.010	100%	83%	Dinas PUPR
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM		1 Paket	125.000.000	1 Paket	125.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		4 Paket	1.300.000.000	4 Paket	1.216.898.840	100%	93%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		4 Paket	1.300.000.000	4 Paket	1.216.898.840	100%	93%	
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4 Paket	1.300.000.000	4 Paket	1.216.898.840	100%	93%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		10 Paket	2.481.853.050	10 Paket	2.407.735.210	100%	97%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota		10 Paket	2.481.853.050	10 Paket	2.407.735.210	100%	97%	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10 Paket	2.481.853.050	10 Paket	2.407.735.210	100%	97%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		40 Paket	8.257.744.025	40 Paket	7.904.976.330	100%	95%	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		40 Paket	8.257.744.025	40 Paket	7.904.976.330	100%	95%	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	40 Paket	8.257.744.025	40 Paket	7.904.976.330	100%	95%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		24 Paket	69.959.792.752	24 Paket	60.097.820.192	100%	85%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		24 Paket	69.959.792.752	24 Paket	60.097.820.192	100%	85%	
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 Paket	1.200.422.500	3 Paket	1.115.275.000	100%	92%	Dinas PUPR
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15 Paket	49.337.192.251	15 Paket	43.519.341.872	100%	88%	Dinas PUPR
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 Paket	4.312.733.000	1 Paket	3.961.532.450	100%	91%	Dinas PUPR
	Pemeliharaan Rutin Jalan		1 Paket	500.000.000	1 Paket	500.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1 Paket	12.160.045.001	1 Paket	8.733.989.920	100%	71%	Dinas PUPR
	Rehabilitasi Jembatan		3 Paket	2.449.400.000	3 Paket	2.267.683.950	100%	92%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		285 Orang	700.000.000	285 Orang	699.854.080	100%	100%	
	Kegiatan Pengawasan Tertip Usaha, Tertip Penyelenggaraan dan Tertip Pemanfaatan Jasa Konstruksi		285 Orang	700.000.000	285 Orang	699.854.080	100%	100%	
	Bimbingan Teknis tentang Tertip Usaha, Tertip Penyelenggaraan dan Tertip Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	285 Org	700.000.000	285 Org	699.854.080	100%	99%	Dinas PUPR

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG		2 Dok	850.000.000	2 Dok	840.053.600	100%	99%	
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>		2 Dok	885.000.000	2 Dok	840.053.600	100%	99%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dok	800.000.000	1 Dok	790.053.600	100%	98%	Dinas PUPR
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	100%	100%	Dinas PUPR
				85.000.000		85.000.000			
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		350	17.693.580.325	350	16.027.333.059	100%	90%	
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		211	2.887.542.759	211	2.827.986.575	100%	97%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dok	31.664.792	3 Dok	31.664.792	100%	100%	
01.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	12.400.492	1 Dok	12.400.492	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD		2 Dok	19.264.300	2 Dok	19.264.300	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25	1.402.589.269	25	1.380.269.450	100%		
01.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	1.389.992.669	20 Orang	1.367.673.350	100%	98%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lpr	12.596.600	1 Lpr	12.596.600	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 lap	5.555.000	1 lap	5.555.000	100%		
01.04.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	5.555.000	1 Lap	5.555.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		171	282.375.000	171	282.285.000	100%	99%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Pkt	32.375.000	1 Pkt	32.375.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		170 Org	250.000.000	170 Org	249.910.000	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		93	780.473.340	93	777.225.740	100%	99%	
01.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Unit	135.920.240	7 Unit	135.794.140	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2.403.600	12 Bulan	2.403.600	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	25.047.500	12 Bulan	24.968.000	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	6.010.000	12 Bulan	6.010.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	611.092.000	50 Lap	608.050.000	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38 Unit	180.481.438	38 Unit	172.510.000	100%	96%	
	Pengadaan Mebel		30 Unit	136.043.538	30 Unit	135.890.000	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	44.437.900	8 Unit	36.620.000	100%	82%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36	102.460.100	36	76.701.350	100%	75%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bln	4.890.000	12 Bln	4.890.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln	15.734.100	12 Bln	13.975.350	100%	89%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bln	81.836.000	12 Bln	57.836.000	100%	71%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		13	101.943.820	13	101.775.243	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan	59.140.000	12 Bulan	59.139.243	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Paket	42.803.820	1 Paket	42.636.000	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		3	444.700.000	3	382.040.950	100%	86%	
01.04.02.2.02	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		2 Unit	418.600.000	2 Unit	356.240.950	100%	85%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.04.02.2.02.03	Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	2 Unit	418.600.000	2 Unit	356.240.950	100%	85%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1 Lap	26.100.000	1 Lap	25.800.000	100%	98%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1 Lap	26.100.000	1 Lap	25.800.000	100%	98%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		83	2.052.599.800	83	2.050.599.800	100%	99%	
01.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		5 Lap	249.999.800	5 Lap	247.999.800	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah		5 Lap	249.999.800	5 Lap	247.999.800	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		78	1.802.600.000	78	1.802.600.000	100%	100%	
01.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	70 Unit	1.421.000.000	70 Unit	1.421.000.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Lap	106.000.000	1 Lap	106.000.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	7 Dok	275.600.000	7 Dok	275.600.000	100%	100%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		6 Paket	450.000.000	6 Paket	448.043.467	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		6 Paket	450.000.000	6 Paket	448.043.467	100%	99%	
01.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6 Paket	450.000.000	6 Paket	448.043.467	100%	99%	Dinas Perumahan dan Pemukiman
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		47 Paket	11.858.737.766	47 Paket	10.318.662.267	100%	87%	
01.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		47 Paket	11.858.737.766	47 Paket	10.318.662.267	100%	87%	
01.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	47 Paket	11.858.737.766	47 Paket	10.318.662.267	100%	87%	Dinas Perumahan dan Pemukiman

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		366	9.170.977.385	366	9.025.041.729	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		356	6.781.817.485	356	6.690.042.929	100%	98%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dok	49.498.400	3 Dok	49.498.400	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	12.000.000	1 Dok	12.000.000	100%	100%	satpol
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD		1 Dok	17.499.500	1 Dok	17.499.500	100%	100%	satpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	19.998.900	1 Dok	19.998.900	100%	100%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42	5.133.177.059	42	5.078.962.029	100%	99%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang	5.113.177.959	30 Orang	5.058.962.929	100%	98%	satpol
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	19.999.100	12 Bulan	19.999.100	100%	100%	satpol
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		182 Orang	548.600.000	182 Orang	529.721.000	100%	97%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut		182 Orang	548.600.000	182 Orang	529.721.000	100%	97%	satpol
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		64	775.657.100	64	759.582.700	100%	98%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Unit	52.292.900	6 Unit	52.292.900	100%	100%	satpol
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Unit	59.550.300	18 Unit	59.550.300	100%	100%	satpol
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	59.998.900	12 Bulan	59.827.500	100%	99%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	59.992.000	12 Bulan	59.539.000	100%	99%	satpol
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Lap	543.823.000	16 Lap	528.373.000	100%	97%	satpol
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23 Unit	69.822.100	23 Unit	69.700.000	100%	99%	
	Pengadaan Mebel		4 Unit	53.322.100	4 Unit	53.200.000	100%	99%	satpol
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		19 Unit	16.500.000	19 Unit	16.500.000	100%	100%	satpol
	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah		36 Bulan	50.815.826	36 Bulan	48.333.800	100%	95%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	9.991.900	12 Bulan	9.950.000	100%	99%	satpol
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	13.138.026	12 Bulan	10.733.900	100%	81%	satpol
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	27.685.900	12 Bulan	27.649.900	100%	99%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6	154.247.000	6	154.245.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	140.555.000	5 Unit	140.553.000	100%	100%	satpol
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 paket	13.692.000	1 paket	13.692.000	100%	100%	satpol
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		9	3.206.989.800	9	619.160.800	100%	96%	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5	569.161.300	5	569.161.300	100%	100%	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	3 keg	352.100.000	3 keg	352100.000	100%	100%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 keg	124.999.100	1 Keg	124.999.100	100%	100%	satpol
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		1 keg	92.062.200	1 keg	92.062.200	100%	100%	satpol
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		4 Kec	99.998.600	4 Kec	99.998.600	100%	100%	
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.		2 Kec	49.999.100	2 Kec	49.999.100	100%	100%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Kec	49.999.500	2 Kec	49.999.500	100%	100%	satpol
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAM, PENYALAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1 Unit	1.720.000.000	1 Unit	1.715.838.000	100%	99%	
	Pencegahan dan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	1.720.000.000	1 Unit	1.715.838.000	100%	99%	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.		1 Unit	1.720.000.000	1 Unit	1.715.838.000	100%	99%	satpol

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		125	6.004.423.810	123	5.954.055.262	98%	99%	
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		96	2.909.971.361	94	2.859.602.813	98%	98%	
01.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30	1.812.638.237	28	1.762.269.689	93%	97%	
01.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	1.798.419.857	28 Orang	1.748.051.309	93%	97%	BPBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Lap	14.218.380	2 Lap	14.218.380	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		27	297.314.520	27	297.314.520	100%	100%	
01.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	10.197.520	24 Paket	10.197.520	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap.	287.117.000	3 Lap.	287.117.000	100%	100%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	14.848.500	1 Unit	14.848.500	100%	100%	
01.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.848.500	1 Unit	14.848.500	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Lap	54.876.000	4 Lap	54.876.000	100%	100%	
01.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap.	23.676.000	2 Lap.	23.676.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap.	31.200.000	2 Lap.	31.200.000	100%	100%	BPBD
01.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		34	730.294.104	34	730.294.104	100%	100%	
01.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Lap	137.420.000	30 Lap.	137.420.000	100%	100%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lapangan								
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 Unit	592.874.104	4 Unit	592.874.104	100%	100%	BPBD
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		29	3.094.452.449	29	3.094.452.449	100%	100%	
01.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		16	2.679.029.849	16	2.679.029.849	100%	100%	
01.05.03.2.01.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	JumlahPeralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	100%	100%	BPBD
01.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Verifikasi Pasca Bencana Di	8 Paket	2.419.046.849	8 Paket	2.419.046.849	100%	100%	BPBD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kecamatan							
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		7 Org	109.983.000	7 Org	109.983.000	100%	100%	BPBD
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		13 Dok	415.422.600	13 Dok	415.422.600	100%	100%	
01.05.03.2.03.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	13 Dok	415.422.600	13 Dok	415.422.600	100%	100%	BPBD
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		1.842	11.011.693.631	595	10.940.032.241	32%	99%	
106.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		161	2.500.321.231	134	2.462.578.056	83	99%	
106.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dok	34.000.000	7 Dok	34.000.000	100%	100%	
106.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	34.000.000	7 Dok	34.000.000	100%	100%	Dinas Sosial

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27 Orang	1.722.893.812	27 Orang	1.687.481.306	100%	98%	
106.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	1.722.893.812	27 Orang	1.687.481.306	100%	98%	Dinas Sosial
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		65	335.062.000	53	335.059.750	82%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		50 Paket	30.000.000	50 Paket	29.997.750	100%	99%	Dinas Sosial
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		15 Dok	305.062.000	15 Dok	305.062.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		36	280.377.816	27	280.280.300	75%	100%	
106.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.852.816	12 Paket	26.763.900	100%	99%	Dinas Sosial
106.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.759.000	12 Paket	21.750.400	100%	99%	Dinas Sosial
106.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	231.766.000	12 Lap	231.766.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.207	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Lap	86.258.103	18 Lap	84.027.700	75%	97%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106.01.207.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Lap	50.818.203	9 Lap	48.670.700	75%	95%	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Lap	15.439.900	9 Lap	35.357.000	75%	22%	Dinas Sosial
106.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Unit	41.729.500	2 Unit	41.729.000	100%	100%	
106.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.765.500	1 Unit	20.765.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.964.000	1 Unit	20.964.000	100%	100%	Dinas Sosial
106.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		364	4.041.301.900	146	4.037.801.400	40%	100%	
106.02.201	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		281 KK	2.179.471.500	110 KK	2.176.215.950	39%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106.02.201.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KPM Kominitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif/BahanPerm- akanan	53 KK	1.319.740.000	19 KK	1.318.255.300	36%	99%	Dinas Sosial
106.02.209.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah KPM pendampingan Kominitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapat bantuan KUBE dan sembako	228 KK	859.731.500	91 KK	857.960.650	40%	99%	Dinas Sosial
106.02.203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		83	1.861.830.400	36	1.861.585.450	43%	100%	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Org	801.538.000	20 Org	801.538.000	100%	100%	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		51 Org	760.300.000	51 Org	760.065.250	100%	100%	Dinas Sosial

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
106.02.203.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan potensi organisasi kepemudaan/masya- rakat	12 KK	299.992.400	12 KK	299.982.200	100%	100%	Dinas Sosial
106.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		684	1.676.240.500	119	1.671.089.450	17%	99%	
106.04.201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		679	1.325.240.000	118	1.320.089.450	17%	99%	
	Kegiatan Penyediaan Permakanan		436 org	780.620.000	95 org	777.173.950	22%	99%	Dinas Sosial
106.04.201.05	Penyediaan Sandang	Penyedian bantuan sandang dan pangan kepada PMKS	243 Org	544.620.000	23 Org	542.915.500	9%	99%	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		5	351.000.500	1	351.000.500	20%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		5 Dok	351.000.500	5 Dok	351.000.500	100%	100%	Dinas Sosial
106.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		482	2.388.170.000	165	2.376.762.035	34	99%	
106.05.202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		482	2.388.170.000	165	2.376.762.035	34	99%	
106.05.202.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	216 KK	535.160.000	0 KK	533.420.490	100%	100%	Dinas Sosial
106.05.202.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	222 KK	1.023.310.000	131 KK	1.021.170.350	100%	100%	Dinas Sosial
106.05.202.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	44 Org	829.700.000	34 Org	822.171.195	100%	100%	Dinas Sosial
106.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		151 Orang	405.660.000	31 Orang	391.801.300	21%	96%	
106.06.202	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		151 Orang	405.660.000	31 Orang	391.801.300	21%	96%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Makanan		150 Org	255.460.000	30 Org	252.271.300	100%	98%	Dinas Sosial
106.06.202.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Bantuan Sosial bagi kelompok rentan	1 Org	150.200.000	1 Org	139.530.000	100%	92%	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		13.262	3.538.425.023	90	3.474.237.386	1%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		39	439.182.082	39	438.990.721	100%	99%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32 Orang	2.025.518.903	32 Orang	1.961.331.266	100%	96%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Org	2.025.518.903	32 Org	1.961.331.266	100%	96%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah		1 Paket	15.675.000	1 Paket	15.675.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	15.675.000	1 Paket	15.675.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	335.638.085	4	335.446.724	100%	99%	
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.640.625	1 Paket	44.640.625	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyediaan Bahan Logis Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.274.460	1 Paket	9.274.460	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	1 Paket	29.808.639	100%	99%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	251.723.000	1 Laporan	251.723.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	87.868.997	2 Lap	87.868.997	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	37.873.291	1 Laporan	37.873.291	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.995.706	1 Laporan	49.995.706	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		1 Lembaga	51.522.000	1 Lembaga	51.522.000	100%	100%	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		1 Lembaga	51.522.000	1 Lembaga	51.522.000	100%	100%	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1 Lembaga	51.522.000	1 Lembaga	51.522.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		24	71.632.500	24	71.632.500	100%	100%	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		12 Orang	58.363.000	12 Orang	58.363.000	100%	100%	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12 Orang	58.363.000	12 Orang	58.363.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		12 Bln	13.269.500	12 Bln	13.269.500	100%	100%	
	Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Passar kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Bln	13.269.500	12 Bln	13.269.500	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		13.198	950.569.538	26	950.569.538	0,2%	100%	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		16	911.918.688	16	911.918.688	100%	100%	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi perusahaan		15 Perusahaan	14.577.988	15 Perusahaan	14.577.988	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Lap	897.340.700	1 Lap	897.340.700	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		13.182	38.650.850	10	38.650.850	0,08%	100%	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Lap	21.510.000	1 Lap	21.510.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buru serta Non Afiliasi		1 Lap	8.020.850	1 Lap	8.020.850	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	Pengembangan palaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		13.180 orang	9.120.000	8 orang	9.120.000	0,06%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		77	2.880.516.056	77	2.821.174.942	100%	97%	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		76	2.732.593.256	76	2.673.252.142	100%	97%	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	2.042.302.638	12 Bulan	1.987.127.984	100%	97%	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.042.302.638	12 Bulan	1.987.127.984	100%	97%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Paket	31.680.000	1 Paket	31.680.000	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	31.680.000	1 Paket	31.680.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		27	538.100.650	27	534.103.690	100%	99%	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	63.490.000	1 Paket	59.890.000	100%	94%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang Disediakan							Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.300.650	1 Paket	48.275.690	100%	99%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.876.000	1 Paket	14.876.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	55.220.000	12 Lap	55.220.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	356.214.000	12 Lap	355842000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Lap	56.249.968	24 Lap	56.080.468	100%	99%	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	32.524.968	12 Lap	32.355.468	100%	99%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	23.725.000	12 Lap	23.725.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	64.260.000	12 Bulan	64.260.000	100%	100%	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Di	12 Bulan	64.260.000	12 Bulan	64.260.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		1 Kegiatan	147.922.800	1 Kegiatan	147.922.800	100%	100%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Kegiatan	147.922.800	1 Kegiatan	147.922.800	100%	100%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		1 Kegiatan	147.922.800	1 Kegiatan	147.922.800	100%	100%	Dinas Pemberdayaan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		95	6.451.608.503	95	6.362.236.119	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		83	3.487.568.043	83	3.400.194.119	100%	97%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7	389.398.400	7	389.387.000	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dpl	82.547.400	5 Dpl	82.538.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1		1 Dok	20.501.000	1 Dok	20.499.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	286.350.000	1 Lap	286.350.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27	2.057.735.507	27	1.996.898.469	100%	97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25 Org	2.054.842.807	25 Org	1.994.057.469	100%	97%	Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Lap	2.892.700	2 Lap	2.841.000	100%	98%	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Paket	10.500.000	1 Paket	10.500.000	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	10.500.000	1 Paket	10.500.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		31	594.933.180	31	594.788.000	100%	99%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4 Paket	72.310.700	4 Paket	72.180.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	40.014.480	1 Paket	40.013.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan		2 Paket	27.885.000	2 Paket	27.885.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Lap	454.723.000	24 Lap	454.710.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 unit	78.814.306	7 unit	76.410.000	100%	97%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	35.960.000	1 Unit	33.600.000	100%	93%	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Mebel		6 Unit	42.854.306	6 Unit	42.810.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8	119.842.650	8	99.842.650	100%	83%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Lap	2.445.000	4 Lap	2.445.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 Lap	53.397.650	2 Lap	33.397.650	100%	62%	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2 Lap	64.000.000	2 Lap	64.000.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Unit	236.344.000	2 Unit	232.368.000	100%	98%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya		1 Unit	206.344.000	1 Unit	202.368.000	100%	98%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		7	1.581.466.000	7	1.580.026.100	100%	99%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan		5	381.885.200	5	380.777.000	100%	99%	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dok	277.199.400	1 Dok	276.242.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		4 Unit	104.685.800	4 Unit	104.535.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2	1.199.580.800	2	1.199.249.100	100%	99%	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok	215.370.000	1 Dok	215.299.100	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lap	984.210.800	1 Lap	983.950.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		3	962.126.060	3	961.567.500	100%	99%	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 Dok	250.413.825	1 Dok	250.260.000	100%	99%	
	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan		1 Dok	250.413.825	1 Dok	250.260.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		2	711.712.235	2	711.307.500	100%	99%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		1 Lap	499.469.035	1 Lap	499.437.500	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	212.243.200	1 Dok	211.870.000	100%	99%	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		2 Dok	420.448.400	2 Dok	420.448.400	100%	100%	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		2 Dok	420.448.400	2 Dok	420.448.400	100%	100%	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	205.235.400	1 Dok	205.235.400	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah/bupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	215.213.000	1 Dok	215.213.000	100%	100%	Dinas Ketahanan Pangan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		3.935	5.625.162.366	3.928	5.260.226.052	98%	93%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		65	2.441.182.066	58	2.261.085.752	89%	92%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	15.057.300	3	15.030.000	100%	99%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	4.998.100	1 Dok	4.997.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Lap	5.011.000	1 Lap	5.000.000	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	5.048.200	1 Lap	5.033.000	100%	99%	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23 Orang	1.535.522.728	23 Orang	1.492.111.052	100%	97%	
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		23 Orang	1.535.522.728	23 Orang	1.492.111.052	100%	97%	Dinas Lingkungan Hidup
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13	332.864.000	13	329.233.693	100%	98%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.500.000	1 Paket	13.499.693	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	319.364.000	12 Lap	315.734.000	100%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 Unit	304.295.650	3 Unit	195.000.000	43%	64%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		7 Unit	304.295.650	3 Unit	195.000.000	43%	64%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14 Lap	216.332.388	14 Lap	204.411.502	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	36.343.300	1 Lap	33.436.950	100%	92%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	13.794.330	12 Lap	10.026.552	100%	72%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	166.194.758	1 Lap	160.948.000	100%	96%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 Unit	37.110.000	2 Unit	25.299.505	40%	68%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	37.110.000	2 Unit	25.299.505	40%	68%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		1 Dok	600.000.000	1 Dok	420.000.000	100%	70%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		1 Dok	600.000.000	1 Dok	420.000.000	100%	70%	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		1 Dok	600.000.000	1 Dok	420.000.000	100%	70%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2 Dok	185.471.000	2 Dok	181.551.000	100%	97%	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2 Dok	185.471.000	2 Dok	181.551.000	100%	97%	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dok	35.471.000	1 Dok	31.551.000	100%	88%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	198.000.000	100%	100%	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota		12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	198.000.000	100%	100%	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	198.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		1 Lap	121.900.000	1 Lap	121.900.000	100%	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Lap	121.900.000	1 Lap	121.900.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Lap	121.900.000	1 Lap	121.900.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000		100%	
	<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</i>		1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000		100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		33	349.489.300	33	349.489.300	100%	98%	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		33	349.489.300	33	349.489.300	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lmbg	150.000.000	1 Lmbg	150.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		1 Dok	44.490.000	1 Dok	44.490.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		30 Orang	54.999.300	30 Orang	54.199.300	100%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat		1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		3.820	1.684.120.000	3.820	1.684.000.000	100%	100%	
	Pengelolaan Sampah		3.820	1.684.120.000	3.820	1.684.000.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.780 Ton	1.609.120.000	3.780 Ton	1.609.120.000	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	40 Unit	75.000.000	40 Unit	74.880.000	100%	98%	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		12.121	2.834.673.145	12.121	2.767.900.072	100%	98%	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		121	2.684.194.145	121	2.617.421.072	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33 Orang	2.038.166.242	33 Orang	1.972.100.989	100%	97%	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS		33 Orang	2.038.166.242	33 Orang	1.972.100.989	100%	97%	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		70	387.728.200	70	387.680.380	100%	99%	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Paket	145.450.000	2 Paket	145.449.280	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.187.200	12 Paket	15.187.200	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	14.477.000	5 Paket	14.441.900	100%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 Lap	212.614.000	51 Lap	212.602.000	100%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	202.050.000	3 Unit	201.400.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	202.050.000	3 unit	201.400.000	100%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Lap	153.290.274	24 Lap	149.247.297	100%	97%	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	60.041.874	12 Lap	56.000.297	100%	93%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	93.248.400	12 Lap	93.247.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15 Unit	56.249.703	15 Unit	56.239.703	100%	99%	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.560.000	1 unit	34.550.000	100%	99%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6 unit	3.500.000	6 unit	3.500.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan Mebel		6 unit	8.521.878	6 unit	8.521.878	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	9.667.825	2 unit	9.667.825	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		7.000 Lap	88.300.000	7.000 Lap	88.300.000	100%	100%	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		7.000 Lap	88.300.000	7.000 Lap	88.300.000	100%	100%	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	7000 Lap	88.300.000	7000 Lap	88.300.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		5000 Lap	62.179.000	5000 Lap	62.179.000	100%	100%	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil		5000 Lap	62.179.000	5000 Lap	62.179.000	100%	100%	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5000 Lap	62.179.000	5000 Lap	62.179.000	100%	100%	Dinas Kependudukan dan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		260	2.211.522.730	260	2.208.460.730	99%	99%	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		220	977.641.630	220	976.118.630	99%	99%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		220	977.641.630	220	976.118.630	99%	99%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		2 Dok	110.740.010	2 Dok	109.380.010	99%	98%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		2 Lap	199.960.620	2 Lap	199.960.620	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa		198 Desa	199.995.600	198 Desa	199.995.600	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									Desa, PPPA
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		3 Dok	118.294.800	3 Dok	118.294.800	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15 Kec	348.650.600	15 Kec	348.487.600	100%	99%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		40	1.233.881.100	40	1.232.342.100	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam		40	1.233.881.100	40	1.232.342.100	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah kabupaten/Kota								
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		2 Lap	58.620.500	2 Lap	57.121.500	100%	97%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Lap	151.130.000	20 Lap	151.130.000	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		3 Paket	24.988.100	3 Paket	24.988.100	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	15 Kec	99.142.500	15 Kec	99.102.500	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, PPPA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keluarga	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		20.577	7.622.818.114	20.181	7.399.980.276	98%	97%	
2.14.01	Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		45	2.085.984.113	45	2.028.477.276	100%	97%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Lap	15.000.000	2 Lap	15.000.000	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Lap	15.000.000	2 Lap	15.000.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25 Orang	1.707.244.153	25 Orang	1.649.769.276	100%	96%	
2 14 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	1.707.244.153	25 Orang	1.649.769.276	100%	96%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 14 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	262.219.500	6	262.218.200	100%	100%	
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 keg	6.610.500	1 keg	6.609.200	100%	99%	DPPKB
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 keg	6.109.000	1 keg	6.109.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Lap	249.500.000	4 Lap	249.500.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100%	100%	
2 14 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	100%	100%	DPPKB
2 14 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8 Lap	12.380.460	8 Lap	12.349.800	100%	99%	
2 14 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lap	6.380.460	4 Lap	6.349.800	100%	99%	DPPKB
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	4	6.000.000	4	6.000.000	100%	97%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap		Lap				
2 14 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	39.140.000	3 Unit	39.140.000	100%	100%	
2 14 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	39.140.000	3 Unit	39.140.000	100%	100%	DPPKB
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		24	595.100.001	24	595.100.001	100%	100%	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		24	595.100.001	24	595.100.001	100%	100%	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		15 Dok	144.000.001	15 Dok	144.000.001	100%	100%	DPPKB
	Pengolahan dan Pelaporan Data pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		1 Dok	150.500.000	1 Dok	150.500.000	100%	100%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (DAK)		2 Lap	64.200.000	2 Lap	64.200.000	100%	100%	DPPKB
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK)		4 Lap	146.400.000	4 Lap	146.400.000	100%	100%	DPPKB
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB (DAK)		2 Dok	90.000.000	2 Dok	90.000.000	100%	100%	DPPKB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		18.504	3.184.474.000	18.504	3.124.793.000	100%	98%	
	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</i>		4 Lap	132.000.000	4 Lap	132.000.000	100%	100%	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		4 Lap	132.000.000	4 Lap	132.000.000	100%	100%	DPPKB
	<i>Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah</i>		4 Lap	145.000.000	4 Lap	145.000.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
	Pembinaan Terpadu Kampung KB		4 Lap	145.000.000	4 Lap	145.000.000	100%	100%	DPPKB
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		6.457	1.327.250.000	6.457	1.326.701.000	99%	100%	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja (DAK)		500 Orang	80.000.000	500 Orang	80.000.000	100%	100%	DPPKB
	Promosi dan KIE Program bangga kencana (pembangunan keluarga, Kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang (DAK)		3 Paket	150.000.000	3 Paket	150.000.000	100%	100%	DPPKB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program		1.800 Orang	195.000.000	1.800 Orang	194.820.000	100%	99%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KKBPK, Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RAKORCAM), Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES) dan Miniloka Karya (MINILOK) (DAK)								
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)		3.750 Orang	722.250.000	3.750 Orang	721.881.000	100%	99%	DPPKB
	Pengendalian Program KKBPK (DAK)		404 Orang	180.000.000	404 Orang	180.000.000	100%	100%	DPPKB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)		3.880 Orang	776.000.000	3.880 Orang	776.000.000	100%	100%	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (DAK)		1.900 Orang	380.000.000	1900 Orang	380.000.000	100%	100%	DPPKB
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)		1.980 Orang	396.000.000	1980 Orang	396.000.000	100%	100%	DPPKB
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta		319	314.724.000	319	255.902.000	100%	81%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengendalian Pendistribuan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)		138 Orang	20.700.000	138 Orang	20.700.000	100%	100%	DPPKB
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK)		75 Orang	76.742.000	75 Orang	75.542.000	100%	98%	DPPKB
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK)		16 Unit	203.182.000	16 Unit	145.560.000	100%	71%	DPPKB
	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya (DAK)		90 Orang	14.100.000	90 Orang	14.100.000	100%	100%	DPPKB
	Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah		7.840 Orang	489.500.000	7.840 Orang	489.190.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB (DAK)		90 Orang	9.000.000	90 Orang	9.000.000	100%	100%	DPPKB
	Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB (DAK)		7.750 Orang	480.500.000	7.750 Orang	480.190.000	100%	99%	DPPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		2.004	1.757.260.000	1.608	1.651.610.000	80%	93%	
2.14.04.2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		2.004	1.757.260.000	1.608	1.651.610.000	80%	93%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Lap	149.860.000	4 Lap	149.860.000	100%	100%	DPPKB
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK_R, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK)		20 Paket	360.000.000	20 Paket	352.500.000	100%	97%	DPPKB
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)(BKB, BKR, PIK_R, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (DAK)		1.980 Orang	1.247.400.000	1.584 Orang	1.149.250.000	80%	92%	DPPKB

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		131	24.131.583.397	126	19.472.265.929	96%	80%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		123	3.181.352.245	119	3.093.832.076	97%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37 Orang	2.936.522.880	37 Orang	2.284.689.031	100%	98%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	2.331.299.489	37 Orang	2.284.689.031	100%	98%	Dinas Perhubungan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	37.000.750	2	37.000.750	100%	100%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	27.000.750	1 Paket	27.000.750	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		31	517.328.100	27	487.398.050	87%	46%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.246.700	1 Paket	8.220.000	100%	99%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.385.900	1 Paket	56.990.050	100%	95%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.767.500	1 Paket	10.220.000	100%	31%	Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Lap	416.928.000	24 Lap	411.968.000	100%	98%	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Unit	65.012.000	2 Unit	65.012.000	100%	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	65.012.000	2 Unit	65.012.000	100%	100%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48 Lap	112.466.906	48 Lap	101.624.045	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	37.766.906	12 lap	27.299.699	100%	72%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	36 lap	74.700.000	36 lap	74.324.346	100%	99%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Unit	118.245.000	3 Unit	118.108.300	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.245.000	3 Unit	118.108.300	100%	99%	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		7 Unit	19.132.610.947	6 Unit	14.594.294.035	86%	76%	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		2 Unit	4.997.211.450	2 Unit	4.723.017.550	100%	94%	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	4.869.211.450	1 Unit	4.600.874.050	100%	94%	Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	128.000.000	1 Unit	122.143.500	100%	95%	Dinas Perhubungan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2 Unit	399.973.301	2 Unit	399.446.876	100%	99%	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Unit	399.973.301	2 Unit	399.446.876	100%	99%	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Unit	13.735.426.196	2 Unit	9.471.829.609	67%	69%	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	13.735.426.196	2 Unit	9.471.829.609	67%	69%	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		1 Unit	1.817.620.205	1 Unit	1.784.139.718	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		1 Unit	1.817.620.205	1 Unit	1.784.139.718	100%	98%	
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	1 Unit	1.817.620.205	1 Unit	1.784.139.718	100%	98%	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		170	5.076.613.198	170	4.878.939.147	100%	96%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		107	2.337.111.402	107	2.243.050.351	100%	95%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27 Orang	1.655.683.902	27 Orang	1.619.347.451	100%	97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang	1.655.683.902	27 Orang	1.619.347.451	100%	97%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		52	442.577.500	52	384.853.500	100%	86%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		2 Paket	54.000.000	2 Paket	54.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Paket	28.607.500	12 Paket	26.716.500	100%	93%	Dinas Komunikasi

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									dan Informatika
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Paket	50.000.000	12 Paket	28.367.000	100%	56%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Lap	4.970.000	12 Lap	4.970.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Lap	200.000.000	12 Lap	170.800.000	100%	85%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		2 Paket	105.000.000	2 Paket	100.000.000	100%	95%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	100%	100%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1 Unit	120.000.000	1 Unit	120.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 Lap	88.100.000	24 Lap	88.100.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Lap	64.100.000	12 Lap	64.100.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Lap	24.000.000	12 Lap	24.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Unit	30.750.000	3 Unit	30.750.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Unit	25.750.000	2 Unit	25.750.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		56	2.589.501.796	56	2.485.888.796	100%	96%	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		56	2.589.501.796	56	2.485.888.796	100%	96%	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dok	174.999.700	1 Dok	174.999.700	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pelayanan Informasi Publik		20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Layanan Hubungan Media		20 Layanan	1.093.400.000	20 Layanan	1.089.787.000	100%	99%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		5 Dok	199.999.400	5 Dok	99.999.400	100%	50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota		10 Unit	1.001.102.696	10 Unit	1.001.102.696	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		7	150.000.000	7	150.000.000	100%	100%	
	Pengelolaan E-Govemet Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7	150.000.000	7	150.000.000	100%	100%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		6 PD	84.500.000	6 PD	84.500.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Paket	65.500.000	1 Paket	65.500.000	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		116	5.962.099.192	130	7.506.879.962	112%	97%	
2-17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	106	3.482.439.192	105	3.532.420.287	97%	95%	
2-17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan	2 Dok	13.000.000	2 Dok	15.000.000	100%	100%	
2-17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	13.000.000	2 Dok	15.000.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi keuangan perangkat daerah	49 Orang	2.817.012.107	49 Orang	2.743.510.949	100%	97%	
2-17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	2.817.012.107	49 Orang	2.743.510.949	100%	97%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat daerah	15	499.238.085	15	493.843.000	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2-17.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.831.085	1 Paket	59.736.000	100%	93%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000	1 Paket	12.500.000	100%	98%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.362.000	1 Paket	19.362.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	403.545.000	12 Lap	402.245.000	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	5.589.000	1 Paket	5.589.000	100%	100%	
2-17.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebbeleur Kantor	1 Paket	5.589.000	1 Paket	5.589.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	36 Lap	68.328.000	36 Lap	59.305.000	100%	86%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah							
2-17.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	24.528.000	12 Lap	15.505.000	100%	63%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	8.400.000	12 Lap	8.400.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	35.400.000	12 Lap	35.400.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	79.272.000	2 Unit	79.259.000	67%	99%	
2-17.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.140.000	1 Unit	39.127.000	50%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2-17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	40.132.000	1 Unit	40.132.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2-17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wira Usaha	10 Paket	2.479.660.000	25 Paket	2.479.660.000	250%	100%	
2-17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	10 Paket	2.479.660.000	25 Paket	2.479.660.000	250%	100%	
2-17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25 Paket	2.479.660.000	25 Paket	2.479.660.000	100%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		273	3.582.222.123	273	3.501.803.826	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		42	2.846.933.323	42	2.767.402.826	100%	97%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	8.239.500	2 Dok	8.237.000	100%	99%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	8.239.500	2 Dok	8.237.000	100%	99%	DPMPTSP
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33 Orang	2.031.624.570	33 Orang	1.959.139.866	100%	96%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang	2.031.624.570	33 Orang	1.959.139.866	100%	96%	
2.18.01.2.06.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	618.855.058	4	615.232.460	100%	97%	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.790.858	1 Paket	49.513.960	100%	99%	DPMPTSP
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.560.200	1 Paket	37.770.500	100%	93%	DPMPTSP
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.875.000	1 Paket	19.875.000	100%	100%	DPMPTSP

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	508.629.000	1 Lap	508.073.000	100%	99%	DPMPSTP
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	149.074.195	2 Lap	145.661.500	100%	97%	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	26.919.995	1 Lap	23.516.500	100%	87%	DPMPSTP
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	122.154.000	1 Lap	122.145.000	100%	99%	DPMPSTP
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Unit	39.140.000	1 Unit	39.132.000	100%	99%	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.140.000	1 Unit	39.132.000	100%	99%	DPMPSTP
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1 Dok	30.600.000	1 Dok	30.600.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	30.600.000	1 Dok	30.600.000		100%	
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	30.600.000	1 Dok	30.600.000	100%	100%	DPMPTSP
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		30 Pelaku Usaha	123.081.600	30 Pelaku Usaha	122.234.000	100%	93%	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		30 Pelaku Usaha	123.081.600	30 Pelaku Usaha	122.234.000	100%	93%	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30 Pelaku Usaha	123.081.600	30 Pelaku Usaha	122.234.000	100%	99%	DPMPTSP

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		200	581.607.200	200	581.567.000	100%	100%	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		200	581.607.200	200	581.567.000	100%	100%	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	188 Pelaku Usaha	436.267.200	188 Pelaku Usaha	436.265.000	100%	100%	DPMPTSP
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Keg Usaha	145.340.000	12 Keg Usaha	145.302.000	100%	100%	DPMPTSP
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		5	2.038.495.450	4	1.838.491.610	80%	90%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1 Dok	1.125.000.000	1 Dok	1.025.000.000	100%	91%	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Dok	1.125.000.000	1 Dok	1.025.000.000	100%	91%	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok	1.125.000.000	1 Dok	1.025.000.000	100%	91%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		2	613.495.450	2	613.491.610	100%	100%	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		1 Unit	163.495.450	1 Unit	163.491.610	100%	100%	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	1 Unit	163.495.450	1 Unit	163.491.610	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Raga Kabupaten/Kota	Termanfaatkan							Olahraga
2.19.04.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1 Organisasi	450.000.000	1 Organisasi	450.000.000	100%	100%	
2.19.04.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	450.000.000	1 Organisasi	450.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		2 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000	50%	66%	
2.19.04.2.01	Pembinaan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2 Unit	300.000.000	1 Unit	200.000.000	50%	66%	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	100%	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		1 Unit	100.000.000	0 Unit	-	0%	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		4	1.398.500.000	4	973.767.500	100%	69%	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		3	1.248.500.000	3	823.887.500	100%	65%	
	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		1 Objek	70.000.000	1 Objek	50.000.000	100%	71%	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		1 Objek	70.000.000	1 Objek	50.000.000	100%	71%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	1.178.500.000	2	773.887.500	100%	65%	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat		1 Lembaga	98.500.000	1 Lembaga	50.000.000	100%	51%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		1 Unit	1.080.000.000	1 Unit	723.387.500	100%	66%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1 Lembaga	150.000.000	1 Lembaga	149.880.000	100%	99%	
	<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>		1 Lembaga	150.000.000	1 Lembaga	149.880.000	100%	99%	
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Lembaga	150.000.000	1 Lembaga	149.880.000	100%	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		153	3.698.848.145	153	3.634.538.889	100%	98%	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		82	2.752.587.745	82	2.691.277.260	100%	97%	
02.23.01.2.01	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		25 Orang	1.677.960.174	25 Orang	1.623.728.163	100%	96%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
02.23.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	1.677.960.174	25 Orang	1.623.728.163	100%	96%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		21	699.356.000	21	697.764.830	100%	99,9%	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.129.100	1 Paket	56.129.100	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.060.198	1 Paket	58.060.198	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	31.249.730	1 Paket	31.249.730	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	1 Paket	37.358.000	1 Paket	37.308.946	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Lap	516.379.000	17 Lap	515.016.856	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	100%	99,7%	
2.23.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Lainnya	Bangunan Lainnya yang disediakan							
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24	230.095.171	24	225.621.538	100%	98%	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	56.095.171	12 Bulan	51.621.538	100%	92%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	174.000.000	12 Laporan	174.000.000	100%	100%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		11 Paket	96.176.400	11 Paket	94.162.729	100%	98%	
2.17.2.17.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Paket	52.676.400	10 Paket	52.595.522	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	42.500.000	1 Paket	41.567.207	100%	97%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
22.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		69	890.640.900	69	887.643.629	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10	575.820.500	10	574.259.200	100%	99%	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik (DAK)		1 Paket	304.834.000	1 Paket	304.468.200	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	80.820.500	5 Perpustakaan	80.270.000	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		3 Lokus	136.880.000	3 Lokus	136.280.000	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
	Pengembangan Bahan Pustaka		1 Paket	53.286.000	1 Paket	53.241.000	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		59	314.820.400	29	313.384.429	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	12 Perpustakaan	184.899.800	12 Perpustakaan	183.620.943	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2..23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	47 Lokus	129.920.600	47 Lokus	129763.486	100%	99%	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		2 Eksamplar	55.619.500	2 Eksamplar	55.619.500	100%	100%	
2.23.03.2.01	<i>Pelestarian Naska Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>		2 Eksamplar	55.619.500	2 Eksamplar	55.619.500	100%	100%	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksamplar	55.619.500	2 Eksamplar	55.619.500	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		24	267.448.400	24	267.215.200	100%	99%	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		9 Lokus	164.238.000	9 Lokus	164.225.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		4 Lokus	85.205.000	4 Lokus	85.200.000	100%	100%	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Lokus	85.205.000	4 Lokus	85.200.000	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		5 Lokus	79.033.000	5 Lokus	79.025.000	100%	100%	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN		5 Lokus	79.033.000	5 Lokus	79.025.000	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		15 Lap	103.210.400	15 Lap	102.990.200	100%	99%	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		10 Lap	52.438.000	10 Lap	52.225.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Lap	52.438.000	10 Lap	52.225.000	100%	99%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		5 Lap	50.772.400	5 Lap	50.765.200	100%	100%	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	5 Lap	50.772.400	5 Lap	50.765.200	100%	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		346	11.330.807.399	346	11.231.998.361	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		155	4.039.901.849	155	3.945.970.911	100%	97%	
3 25 01 2 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		55	3.292.733.223	55	3.199.362.911	100%	97%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		53 Orang	3.265.269.223	53 Orang	3.171.907.911	100%	97%	
3 25 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lap	27.464.000	2 Lap	27.455.000	100%	99%	Dinas Perikanan
	Adminitrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah		91	169.175.800	91	169.125.800	100%	99%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dok	107.150.000	1 Dok	107.100.000	100%	99%	Dinas Perikanan
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		90 Orang	62.025.800	90 Orang	62.025.800	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	427.715.300	4	427.619.892	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 25 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.950.000	1 Paket	14.950.000	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.168.000	1 Paket	22.132.892	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.047.300	1 Paket	10.047.300	100%	100%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	380.550.000	1 Lap	380.490.000	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	32.857.526	2 Lap	32.812.808	100%	99%	
3 25 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	20.857.526	1 Lap	20.812.808	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	100%	100%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 25 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Unit	117.420.000	3 Unit	117.049.500	100%	99%	
3 25 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	117.420.000	3 Unit	117.049.500	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		180 Unit	6.729.205.550	180 Unit	6.724.782.950	100%	99%	
3 25 03 2 01	Pengelolaan Penangkap Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		180 Unit	6.729.205.550	180 Unit	6.724.782.950	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 03 2 01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	414.188.000	30 Unit	414.102.150	100%	99%	Dinas Perikanan
3 25 03 2 01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan	150 Unit	6.315.017.550	150 Unit	6.310.680.800	100%	99%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tangkap	Tersedia							
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1 Unit	200.000.000	1 Unit	199.933.200	100%	99%	
3 25 04 2 04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1 Unit	200.000.000	1 Unit	199.933.200	100%	99%	
3 25 04 2 04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan)	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	200.000.000	1 Unit	199.933.200	100%	99%	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		2 Lap	61.700.000	2 Lap	61.700.000	100%	100%	
	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>		2 Lap	61.700.000	2 Lap	61.700.000	100%	100%	
	Sub Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,		2 Lap	61.700.000	2 Lap	61.700.000	100%	100%	Dinas Perikanan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		8	300.000.000	8	299.611.300	100%	99%	
	<i>Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		8	300.000.000	8	299.611.300	100%	99%	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	100%	100%	Dinas Perikanan
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		7 Pelaku Usaha	200.000.000	7 Pelaku Usaha	199.611.300	100%	99%	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN		118	3.997.360.058	118	3.935.183.840		98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BIDANG PARIWISATA								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		100	3.080.360.058	100	3.019.371.840	100%	98%	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Dok	15.000.000	3 Dok	15.000.000	100%	100%	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	15.000.000	3 dok	15.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35	2.151.902.491	35	2.092.471.876	100%	97%	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	2.097.662.491	32 Orang	2.038.231.876	100%	97%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dok	54.240.000	3 dok	54.240.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8	366.600.600	8	366.600.600	100%	100%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		6 Orang	210.999.600	6 Orang	210.999.600	100%	100%	Dinas Pariwisata
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2 Orang	155.601.000	2 Orang	155.601.000	100%	100%	Dinas Pariwisata

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		35	315.885.499	35	314.392.250	100%	99%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3 Paket	16.619.100	3 Paket	16.617.600	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.567.800	12 Paket	30.001.550	100%	98%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.038.600	12 Paket	25.032.100	100%	99%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Lap	243.659.999	8 Lap	242.741.000	100%	99%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	53.972.600	3 Unit	53.972.600	100%	95%	
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	53.972.600	3 Unit	53.972.600	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14	46.998.868	14	46.998.868	100%	39%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bln	22.998.868	12 Bln	22.998.868	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	24.000.000	2 Lap	24.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Unit	130.000.000	2 Unit	129.935.646	100%	99%	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.000.000	1 Unit	29.935.646	100%	99%	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		3	447.000.000	3	445.912.000		99%	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3	447.000.000	3	445.912.000		99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata		1 Paket	200.000.000	1 Paket	198.912.000	100%	99%	Dinas Pariwisata
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 lokasi	147.000.000	1 lokasi	147.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1 Lap	220.000.000	1 Lap	219.900.000	100%	99%	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		1 Lap	220.000.000	1 Lap	219.900.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Lap	220.000.000	1 Lap	219.900.000	100%	99%	Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		14 Orang	250.000.000	14 Orang	250.000.000	100%	100%	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		14 Orang	250.000.000	14 Orang	250.000.000	100%	100%	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		7 Orang	150.000.000	7 Orang	150.000.000	100%	100%	Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		88	17.477.963.742	88	17.321.581.962	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	69	5.676.3113242	69	5.609.904.232	100%	98%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	956.506.000	5 Lap	956.506.000	100%	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	956.506.000	5 Lap	956.506.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53 Orang	3.461.746.121	53 Orang	3.404.924.792	100%	98%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	3.461.746.121	53 Orang	3.404.924.792	100%	98%	Dinas pertanian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	336.700.340	4	336.700.340	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	25.336.800	1 paket	25.336.800	100%	100%	Dinas pertanian

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	33.689.540	1 paket	33.689.540	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	257.674.000	1 paket	257.674.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	99.218.201	3	95.470.000	100%	96%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	61.098.201	2 Unit	57.350.000	100%	93%	Dinas pertanian
	Pengadaan Mebel		1 paket	38.120.000	1 paket	38.120.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tewujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Keg	41.097.000	2 Keg	41.097.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Keg	11.361.000	1 Keg	11.361.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Keg	29.736.000	1 Keg	29.736.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	781.045.580	2	775.206.100	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.000.000	1 Unit	34.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Keg	747.045.580	1 Keg	741.206.100	100%	99%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terwujudnya Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	5	4.904.730.000	5	4.904.730.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terwujudnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2	2.073.780.000	2	2.073.780.000	100%	100%	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 paket	1.991.780.000	1 paket	1.991.780.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 paket	82.000.000	1 paket	82.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Keg	424.500.000	1 Keg	424.500.000	100%	100%	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Keg	424.500.000	1 Krg	424.500.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Populasi Ternak	1 Keg	219.725.000	1 Keg	219.725.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1 Keg	219.725.000	1 Keg	219.725.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Perkebunan yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Keg	2.186.725.000	1 Keg	2.186.725.000	100%	100%	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Keg	2.186.725.000	1 Keg	2.186.725.000	100%	100%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terwujudnya Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian	12	5.557.301.500	12	5.483.992.080	100%	98%	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya Pengembangan Prasarana Pertanian	3	3.678.100.000	3	3.674.715.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 paket	3.064.300.000	1 paket	3.060.915.000	100%	99%	Dinas pertanian
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B		1 Dok	332.000.000	1 Dok	332.000.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		1 Dok	281.800.000	1 Dok	281.800.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terwujudnya Pembangunan Prasarana Pertanian	9 Unit	1.879.201.500	9 Unit	1.809.277.080	100%	98%	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	9 Unit	1.879.201.500	9 Unit	1.809.277.080	100%	98%	Dinas pertanian
	PROGRAM PENYULUHAN	Terwujudnya SDM Penyuluh Pertanian	2 Keg	1.339.619.000	2 Keg	1.323.119.000	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PERTANIAN								
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2 Keg	1.339.619.000	2 Keg	1.323.119.000	100%	98%	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Keg	263.022.000	1 Keg	263.022.000	100%	100%	Dinas pertanian
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Keg	1.076.597.000	1 Keg	1.060.097.000	100%	98%	Dinas pertanian
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		4	621.723.779	3	614.119.215	75%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	3	56.723.779	1	49.861.800	33%	87%	
3-30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	3	56.723.779	1	49.861.800	33%	87%	
3-30.03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket	6.848.715	1 paket	0	100%	0%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.03.2.01.002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Lap	49.875.064	2 Lap	49.861.800	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP/pusat pembelanjaan	1 Lap	565.000.000	1 Lap	564.257.415	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-30.04.2.02	<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab. Kota</i>	1 Lap	565.000.000	2 Lap	564.257.415	200%	99%	
3-30.04.2.02.003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Lap	565.000.000	1 Lap	564.257.415	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-30.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1 keg	42.800.000	2 Kec	42.600.000	200%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2	403.104.136	11	402.672.450	550%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3-31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Ripim yang ditetapkan dalam RPIKI	2	403.104.136	11	402.672.450	550%	99%	
3-31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	2	403.104.136	11	402.672.450	550%	99%	
3-31.02.2.01.002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Lap	40.000.000	1 Lap	40.000.000	80%	100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3-31.02.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Paket	363.104.136	1 Paket	362.672.450	100%	99%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		3	240.299.000	3	240.299.000	100%	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		1	115.164.000	1	115.164.000	100%	100%	
2 2 01	<i>Pencanangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi</i>		1 kawasan	115.164.000	1 kawasan	115.164.000	100%	100%	
2 2 01 2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan	115.164.000	1 Kawasan	115.164.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		1 Keg	112.700.000	1 Keg	112.700.000	100%	100%	
	<i>Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Satu Daerah Kabupaten Kota</i>		1 Keg	112.700.000	1 Keg	112.700.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3 2 01	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	1 Keg	112.700.000	1 keg	112.700.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		1 Keg	12.435.000	1 Keg	12.435.000	100%	100%	
	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Pemantapan		1 Keg	12.435.000	1 Keg	12.435.000	100%	100%	
3 2 02 01	Penguatan SDM dalam Rangka kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	1 Keg	12.435.000	1 Keg	12.435.000	100%	100%	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		11.148	67.915.844.939	11.148	43.579.272.343	97%	64%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.148	67.915.844.939	11.148	43.579.272.343	97%	64%	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan		12 Bulan	51.9960.000	12 Bulan	51.9960.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	519.960.000	12 Bulan	519.960.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		339 Orang	45.315.627.714	339 Orang	22.021.177.995	100%	48%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		339 Orang	45.315.627.714	339 Orang	22.021.177.995	100%	48%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50 Orang	917.050.000	50 Orang	915.605.000	100%	99%	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	917.050.000	50 Orang	915.605.000	100%	99%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		661	12.349.800.000	661	12.305.580.600	100%	99%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 Paket	200.0000.000	1 Paket	197.809.000	100%	99%	Sekretariat Daerah

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bangunan Kantor								
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	932.000.000	5 Paket	918.425.600	100%	98%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	307.800.000	8 Paket	306.132.000	100%	99%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	960.000.000	12 Bulan	934.680.000	95%	97%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	635 Perjalanan	9.950.000.000	635 Perjalanan	9.948.534.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.012	1.000.137.215	9.672	743.648.891	97%	74%	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000 Buah	100.000.500	10.000 Paket	96.600.000	100%	96%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	900.136.715	1 Tahun	647.048.891	100%	71%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		38	3.048.150.010	38	2.643.206.357	100%	88%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	568.400.005	14 Unit	176.421.357	100%	31%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	2.069.750.005	12 Bulan	2.056.785.000	100%	99%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	410.000.000	12 Bulan	410.000.000	100%	100%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		36 Bulan	4.765.120.000	36 Bulan	4.430.093.500	100%	93%	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	2.270.400.000	12 Bulan	2.243.590.500	100%	98%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Bulan	1.458.800.000	12 Bulan	1.307.651.000	100%	89%	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Bulan	1.035.920.000	12 Bulan	878.852.000	100%	84%	Sekretariat Daerah

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		33	9.304.404.800	32	7.103.192.250	97%	76%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		33	9.304.404.800	32	7.103.192.250	97%	76%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	2.145.444.800	15	2.088.761.800	100%	97%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	698.924.800	5 Unit	646908000	100%	92%	Bagian Umum
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Set	1.446.520.000	10 Set	1441853800	100%	99%	Bagian Umum
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13	5.417.647.800	12	3.485.960.600	92%	64%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 Unit	3.669.647.800	5 Unit	1.789.500.000	100%	48%	Bagian Umum

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	620.000.000	1 Unit	575.190.000	90%	92%	Bagian Umum
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	698.000.000	4 Unit	692.140.500	100%	99%	Bagian Umum
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	430.000.000	2 Unit	429.130.100	100%	99%	Bagian Umum
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 Unit	1.741.312.200	5 Unit	1.528.469.850	100%	88%	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	1.741.312.200	5 Unit	1.528.469.850	100%	87%	Bagian Umum
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		3	950.022.100	3	949.513.700	100%	99%	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		3	950.022.100	3	949.513.700	100%	99%	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		3	950.022.100	3	949.513.700	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dok	298.910.700	1 dok	298.844.000	100%	99%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 dok	453.197.300	1 dok	452.997.000	100%	99%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 dok	197.914.100	1 dok	197.672.700	100%	99%	Bagian Tata Pemerintahan Setda
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		14 Dok	23.166.750.000	25 Dok	22.823.789.900	179%	99%	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		14 Dok	23.166.750.000	25 Dok	22.823.789.900	179%	99%	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 dok	502.363.200	6 dok	499.859.500	100%	100%	Bagian Kesra Setda

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 dok	22.453.136.800	3 dok	22.112.680.400	100%	99%	Bagian Kesra Setda
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		5 dok	211.250.000	5 dok	211.250.000	100%	99%	Bagian Kesra Setda
			1.023	2.240.000.000	1.023	2.237.148.000	100%	100%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		890	530.000.000	890	530.000.000	100%	100%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		890	530.000.000	890	530.000.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	840 Orang	450.000.000	840 Orang	450.000.000	100%	100%	Bagian Hukum Setda
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	80.000.000	50 Orang	80.000.000	100%	100%	Bagian Hukum Setda
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		133	1.710.000.000	133	1.707.148.000	100%	99%	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		133	1.710.000.000	133	1.707.148.000	100%	99%	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	66 Dok	640.000.000	66 Dokumen	639.348.000	83%	99%	Bagian Hukum Setda
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	620.000.000	1 Kasus	618.453.000	100%	99%	Bagian Hukum Setda
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	66 Dok	450.000.000	66 Dokumen	449.347.000	95%	99%	Bagian Hukum Setda

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			14	1.859.928.750	14	1.854.990.900	100%	99%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3 Unit	70.135.650	3 Unit	69.400.000	100%	98%	
	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		3 Unit	70.135.650	3 Unit	69.400.000	100%	98%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	70.135.650	3 Unit	69.400.000	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN		11 Dok	1.789.793.100	11 Dok	1.785.590.900	100%	99%	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		7 Dok	727.552.900	7 Dok	725.151.000	100%	99%	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Dok	322.867.100	3 Dok	320.465.600	100%	92%	Bagian Perekonomian dan SDA
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		3 Dok	204.747.600	3 Dok	204.747.600	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan BUMD		1 Dok	199.938.200	1 Dok	199.937.800	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		4 Dok	1.062.240.200	4 Dok	1.060.439.900	100%	99%	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dok	145.750.000	2 Dok	145.749.700	100%	100%	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dok	916.490.200	2 Dok	914.690.200	100%	99%	Bagian Perekonomian dan SDA

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			16	1.258.621.083	16	1.258.621.083	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		16	1.258.621.083	16	1.258.621.083	100%	98%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	465.110.915	1 Lap	465.110.915	100%	99%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Lap	465.110.915	1 Lap	465.110.915	100%	99%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Dok	186.387.970	1 Dok	186.252.378	100%	99%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok	186.387.970	1 Dok	186.252.378	100%	95%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Orang	246.992.000	12 Orang	235.528.288	100%	95%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang	246.992.000	12 Orang	235.528.288	100%	99%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penataan Organisasi		2	360.130.198	2	357.050.198	100%	99%	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Lap	75.011.598	1 Lap	72.661.598	100%	96%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Dok	285.118.600	1 Dok	284.388.600	100%	99%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		104	1.355.354.200	104	1.348.946.000	100%	99%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	39.771.200	1 Dok	33.825.000	100%	85%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok	39.771.200	1 Dok	33.825.000	100%	99%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		22 Paket	266.642.000	22 Paket	266.490.000	100%	99%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		10 Paket	187.310.000	10 Paket	187.310.000	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12 Paket	79.332.000	12 Paket	79.180.000	100%	99%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Administrasi Umum		1	181.200.000	1	180.900.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perangkat Daerah		Paket		Paket				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	181.200.000	1 Paket	180.900.000	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		80 Lap	867.741.000	80 Lap	867.731.000	100%	100%	
	Fasilitasi Keprotokolan		30 Lap	363.391.000	30 Lap	363.881.000	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		50 Lap	503.850.000	50 Lap	503.850.000	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		514	1.390.050.000	514	1.384.330.000	100%	99%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		251	380.284.000	251	380.284.000	100%	100%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian		250 Orang	300.284.000	250 Orang	300.284.000	100%	100%	
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	300.284.000	250 Orang	300.284.000	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	100%	100%	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	100%	100%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		263	1.009.766.000	263	1.004.046.000	100%	99%	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		263	1.009.766.000	263	1.004.046.000	100%	99%	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	160 dok	349.588.000	160 dok	346.846.000	100%	99%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 dok	329.000.000	100 dok	326.188.500	100%	99%	Bagian UPBJ - Setda
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	331.178.000	3 Orang	331.011.500	100%	99%	Bagian UPBJ - Setda

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		4	1.199.052.200	4	1.134.602.800	100%	95%	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1 Paket	131.646.800	1 Paket	131.646.800	100%	99%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Paket	131.646.800	1 Paket	131.646.800	100%	99%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	131.646.800	1 Paket	131.646.800	100%	99%	Bagian Adbang
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3	1.021.489.000	3	1.002.956.000	100%	94%	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		3	1.021.489.000	3	1.002.956.000	100%	94%	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	202.700.000	1 Dok	202.700.000	100%	100%	Bagian Adbang
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	296.554.600	1 Lap	296.359.600	100%	93%	Bagian Adbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Lap	522.234.400	1 Lap	503.896.400	100%	91%	Bagian Adbang
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02	SEKRETARIAT DPRD		15.808	41.580.049.675	15.808	39.841.681.856	100%	95%	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.522	23.340.280.694	13.522	22.010.443.856	100%	94%	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35 Orang	2.285.483.158	35 Orang	2.229.896.583	100%	97%	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.285.483.158	35 Orang	2.229.896.583	100%	97%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		31	107.135.000	31	106.535.000	100%	99%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.500.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	104.635.000	30 Orang	104.635.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		13.330	3.088.125.487	13.330	2.925.376.300	100%	95%	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	172.500.000	4 Paket	170.075.000	100%	98%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	611.483.500	10 Paket	610.645.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	857.831.019	2 Paket	778.438.000	100%	90%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	278.259.000	2 Paket	277.754.300	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.311 Org	479.196.000	13.311 Org	401.724.000	99,9%	83%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	688.819.968	1 Lap	686.740.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		9	357.236.500	9	355.570.000	100%	99%	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	237.236.500	6 Paket	236.170.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	120.000.000	3 Unit	119.400.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48	1.581.227.931	48	1.413.112.752	100%	89%	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Lap	658.577.931	6 Lap	491.412.752	100%	74%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	42 Org	922.650.000	42 Org	921.700.000	100%	99%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	1.090.953.600	100	884.891.850	100%	81%	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	455.953.600	4 Unit	420.851.850	100%	92%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Paket	115.000.000	2 Paket	114.600.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Paket	520.000.000	4 Paket	349.440.000	100%	67%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		56	14.094.699.018	56	13.377.341.371	100%	95%	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Org	13.819.146.518	25 Org	13.121.099.838	100%	94%	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	26 Org	250.552.500	26 Org	249.940.000	100%	99%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	5 Org	25.000.000	5 Org	6.301.533	100%	25%	Sekretariat DPRD
	Layanan Administrasi DPRD		3 Paket	735.420.000	3 Paket	717.720.000	100%	98%	
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		3 Paket	735.420.000	3 Paket	717.720.000	100%	98%	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		2.286	18.239.768.981	2.286	17.831.238.000	100%	99%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		1 Paket	60.000.000	1 Paket	42.160.000	100%	70%	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Paket	60.000.000	1 Paket	42.160.000	100%	70%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		2.160	174.960.000	2.160	174.960.000	100%	100%	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	540 Orang	43.740.000	540 Orang	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	540 Orang	43.740.000	540 Orang	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	540 Orang	43.740.000	540 Orang	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	540 Orang	43.740.000	540 Orang	43.740.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		102	371.050.000	102	367.175.000	100%	99%	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18 Lap	105.750.000	18 Lap	105.250.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Lap	73.050.000	24 Lap	70.425.000	100%	96%	Sekretariat DPRD
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesra	20 Lap	59.600.000	20 Lap	58.925.000	100%	98%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Lap	59.600.000	20 Lap	59.250.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang SDA	20 Lap	73.050.000	20 Lap	73.050.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		19 Paket	1.403.614.000	19 Paket	1.403.614.000	100%	100%	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Lap	944.114.000	1 Lap	944.114.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dok	117.500.000	1 Dok	117.500.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Org	90.000.000	3 Org	90.000.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	14 Org	252.000.000	14 Org	252.000.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2	5.430.700.000	2	5.298.518.000	100%	98%	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Lap	2.010.800.000	1 Lap	2.010.600.000	100%	100%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Lap	3.419.900.000	1 Lap	3.278.918.000	100%	95%	Sekretariat DPRD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		2 Dok	10.799.444.981	2 Dok	10.756.192.000	100%	99%	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dok	9.678.168.981	1 Dok	9.636.165.000	100%	99%	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dok	1.121.276.000	1 Dok	120.027.000	100%	10%	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5.01	PERENCANAAN		261	6.679.535.010	261	6.615.391.738	100%	99%	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		92	4.410.154.485	92	4.272.650.409	100%	96%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		62	2.407.742.084	62	2.295.661.765	100%	95%	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	2.359.191.234	43 orang	2.247.110.915	100%	95%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	13 Keg	30.960.000	13 Keg	30.960.000	100%	100%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Lap	17.590.850	6 Lap	17.590.850	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Lap	8.160.000	1 Lap	8.160.000	100%	100%	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	8.160.000	1 Lap	8.160.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13	256.105.900	13	255.605.000	100%	99%	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	6.024.000	1 unit	6.024.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	22.750.000	1 Paket	22.750.000	100%	100%	Bappeda Litbang
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		6 Dok	2.976.900	6 Dok	2.976.900	100%	100%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	224.355.000	5 Orang	223.855.000	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5	1.214.894.309	5	1.213.209.184	100%	99%	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.232.809	1 Paket	63.909.532	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.385.500	1 Paket	49.385.439	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	160.500.000	1 Lap	160.030.000	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	940.776.000	2 Lap	939.884.213	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8 Unit	234.314.200	8 Unit	233.962.000	100%	99%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7 Unit	64.314.200	7 Unit	64.190.000	100%	99%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	170.000.000	1 Unit	169.772.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	254.377.992	2 Lap	231.492.460	100%	91%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	88.840.992	1 Lap	65.955.460	100%	74%	Bappeda Litbang
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	165.537.000	1 Lap	165.537.000	100%	100%	Bappeda Litbang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	34.560.000	1 Unit	34.560.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	34.560.000	1 Unit	34.560.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		161	1.200.152.125	161	1.180.515.429	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		159	995.126.125	159	975.489.429	100%	98%	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	38.626.000	2 BA	37.880.325	100%	98%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	111.498.700	1 BA	110.990.547	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	269.353.700	1 BA	254.546.680	100%	94%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	150 Usulan	213.451.800	150 Usulan	213.451.800	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	5 dok	362.195.925	5 dok	358.620.077	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dok	25.029.000	1 Dok	25.029.000		33%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	25.029.000	1 Dok	25.029.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.02.2.02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Lap	179.997.000	1 Lap	179.997.000	100%	100%	
5.01.02.2.02.04	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Lap	179.997.000	1 Lap	179.997.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		8 Lap	1.069.228.400	8 Lap	1.062.225.900	100%	99%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia		2 Lap	194.025.000	2 Lap	192.825.900	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 lap	61.850.000	1 lap	61.850.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 lap	132.175.900	1 lap	130.975.900	100%	99%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		4	734.731.500	4	730.531.500		100%	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap	314.518.000	1 Lap	314.518.000	100%	100%	Bappeda Litbang
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap	81.800.000	1 Lap	81.800.000	100%	100%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Lap	88.400.000	1 Lap	88.400.000	100%	100%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	250.013.500	1 dok	245.813.500	100%	98%	Bappeda Litbang
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		2 Lap	140.471.000	2 Lap	138.868.500	100%	98%	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Lap	41.784.000	1 Lap	41.784.000	100%	100%	Bappeda Litbang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	98.687.000	1 Lap	97.084.500	100%	98%	Bappeda Litbang
5.02	KEUANGAN		652	238.010.729.279	652	154.306.749.208	100%	65%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA		187	8.006.451.327	187	7.195.992.383	100%	89%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		92	4.513.499.009	92	4.181.177.840	100%	92%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang	4.249.052.338	62 Orang	3.918.272.440	100%	92%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15 Dok	140.511.046	15 Dok	139.975.400	100%	99%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Lap	123.935.625	15 Lap	122.930.000	100%	99%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17	400.000.000	17	386.530.000	100%	96%	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1 Do	150.000.000	1 Dok	141.770.000	100%	94%	BPPKAD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi dan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	250.000.000	16 Orang	244.760.000	100%	97%	BPPKAD
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah		30	1.167.063.778	30	1.057.602.299	100%	96%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.672.500	1 Paket	5.672.500	100%	100%	BPPKAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	256.146.000	1 Paket	245.946.000	100%	96%	BPPKAD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	100%	100%	BPPKAD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.222.778	1 Paket	98.234.978	100%	99%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.765.500	1 Paket	98.964.499	100%	98%	BPPKAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	106.020.000	1 Lap	106.020.000	100%	100%	BPPKAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	589.237.000	1 Lap	492.764.322	100%	83%	BPPKAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7	674.000.000	7	608.907.503	100%	90%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	81.000.000	3 Unit	74.155.203	100%	91%	BPPKAD
	Pengadaan Mebel		1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.870.000	100%	99%	BPPKAD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	200.000.000	1 Unit	192.627.800	100%	96%	BPPKAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2 Unit	293.000.000	2 Unit	242.254.500	100%	82%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		25	1.066.440.540	25	808.939.158	100%	75%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	577.889.540	12 Lap	408.788.158	100%	70%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto		1 Lap	4.951.000	1 Lap	4.951.000	100%	100%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	483.600.000	12 Lap	395.200.000	100%	81%	BPPKAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16 Unit	185.448.000	16 Unit	152.835.583	100%	82%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	129.948.000	3 unit	122.350.000	100%	94%	BPPKAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	12 Unit	33.000.000	12 Unit	8.196.783	100%	24%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	22.500.000	1 Unit	22.288.800	100%	99%	BPPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		395	227.603.776.777	395	144.740.182.650	100%	64%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah		339 Dok	1.805.256.200	339 Dok	1.798.630.200	100%	99%	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	20 Dok	247.383.100	20 Dok	246.588.100	100%	99%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	20 Dok	260.856.000	20 Dok	260.856.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	78 Dok	8.391.000	78 Dok	8.391.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	78 Dok	9.000.000	78 Dok	9.000.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dok	13.000.000	47 Dok	13.000.000	100%	100%	BPPKAD
	koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dok	25.445.000	47 Dok	25.445.000	100%	100%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	20 Dok	554.107.000	20 Dok	552.526.000	100%	99%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	20 Dok	572.174.100	20 Dok	567.924.100	100%	99%	BPPKAD
	koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok	38.200.000	3 Dok	38.200.000	100%	100%	BPPKAD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dok	38.200.000	2 Dok	38.200.000	100%	100%	BPPKAD
	Koordinasi Perencanaan Anggaran belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dok	38.500.000	4 Dok	38.500.000	100%	100%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan		11 Dok	658.386.500	11 Dok	639.829.000	100%	97%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah								
	Koordinasi dan Pengelolaan KAS Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8 Dok	212.376.400	8 Dok	208.376.400	100%	98%	BPPKAD
	koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan efaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	23.331.800	2 Dok	23.331.800	100%	100%	BPPKAD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran KAS Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan [pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dok	422.678.300	1 Dok	408.120.800	100%	96%	BPPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		40	972.043.420	40	971.071.936	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	20 Lap	426.895.100	20 Lap	426.379.436	100%	99%	BPPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20 Dok	545.148.320	20 Dok	544.692.500	100%	99%	BPPKAD
	Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah		2 Lap	223.938.090.657	2 Lap	141.101.437.514	100%	63%	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Lap	222.738.090.657	2 Lap	141.101.437.514	100%	63%	BPPKAD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Lap	1.200.000.000	0 Lap	-	0%	0%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		3 Dok	230.000.000	3 Dok	229.214.000		99%	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	3 Dok	230.000.000	3 Dok	229.214.000	100%	99%	BPPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		48	975.000.000	48	968.590.000	100%	99%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah		48	975.000.000	48	968.590.000	100%	99%	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang di Susun	40 Dok	164.922.100	40 Dok	164.922.100	100%	100%	BPPKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Lap	349.024.100	1 Lap	345.024.100	100%	98%	BPPKAD
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	195.093.400	1 Lap	195.093.400	100%	100%	BPPKAD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan		6 Dok	265.960.400	6 Dok	263.550.400	100%	99%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penghapusan Barang Milik Daerah								
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		22	1.425.501.175	22	1.401.984.175	100%	98%	
	Pegelolaan Pendapatan Daerah		22	1.425.501.175	22	1.401.984.175	100%	98%	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokuemen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	288.128.000	1 Dok	282.561.000	100%	98%	BPPKAD
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Paket	725.105.375	1 Paket	724.955.375	100%	99%	BPPKAD
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak Daerah	1 Lap	94.043.000	1 Lap	94.043.000	100%	100%	BPPKAD
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Lap	80.741.000	1 Lap	80.741.000	100%	100%	BPPKAD
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	237.483.800	1 Dok	219.683.800	100%	92%	BPPKAD

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			1.360	6.408.158.998	1.240	6.349.511.557	91%	99%	
5,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN		135	4.211.660.595	135	4.153.052.157	100%	98%	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		2 Dok	135.331.100	2 Dok	135.331.100	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dok	135.331.100	2 Dok	135.331.100	100%	100%	BKPSDM
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		46	2.644.369.923	46	2.586.148.067	100%	98%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN		45 Orang	2.644.369.923	45 Orang	2.586.148.067	100%	98%	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lap	15.575.650	1 Lap	15.575.650	100%	100%	BKPSDM
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		15 Dok	487.504.100	15 Dok	487.503.134	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		15 Dok	487.504.100	15 Dok	487.503.134	100%	100%	BKPSDM
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		32	509.231.100	32	509.231.100	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 Paket	85.000.000	1 Paket	85.000.000	100%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		1 Paket	24.231.000	1 Paket	24.231.000	100%	100%	BKPSDM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		30 Lap	400.000.000	30 Lap	399.566.000	100%	99%	BKPSDM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Paket	298.000.000	2 Paket	298.000.000	100%	100%	
	Pengadaan Mebel		1 Paket	198.000.000	1 Paket	198.000.000	100%	100%	BKPSDM
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	100%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36 Lap	86.649.272	36 Lap	86.643.656	100%	99%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Lap	1.700.000	12 Lap	1.700.000	100%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Lap	35.940.072	12 Lap	35.940.072	100%	100%	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Lap	49.459.200	12 Lap	49.459.200	100%	100%	BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Unit	50.575.200	2 Unit	50.575.200	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	33.127.200	1 Unit	33.127.200	100%	100%	BKPSDM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	17.448.000	1 Unit	17.448.000	100%	100%	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		1.225	2.196.498.400	1.105	1.984.268.400	90%	100%	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		53	677.376.200	53	677.376.200	100%	100%	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Lap	269.967.000	1 Lap	269.967.000	100%	99,97%	BKPSDM
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	50 Dok	70.746.000	50 Dok	70.746.000	100%	99,97%	BKPSDM
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dok	336.663.200	2 dok	336.663.200	100%	100%	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		822	1.156.533.900	702	944.303.900	85%	81%	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	800 dok	356.533.900	800 dok	356.533.900	100%	100%	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	9 orang	800.000.000	9 orang	587.770.000	100%	73%	BKPSDM
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		150 Dok	195.522.000	150 Dok	195.522.000	100%	100%	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Dok	195.522.000	150 Dok	195.522.000	100%	100%	BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		200 Orang	167.066.300	200 Orang	167.066.300	100%	100%	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		75 Orang	53.537.500	75 Orang	53.537.500	100%	100%	BKPSDM
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		125 Orang	113.528.800	125 Orang	113.528.800	100%	100%	BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		50 Dok	201.635.100	50 Dok	201.635.100	100%	99,99%	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		50 Dok	201.635.100	50 Dok	201.635.100	100%	100%	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		50 Dok	201.635.100	50 Dok	201.635.100	100%	100%	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	50 Dok	201.635.100	50 Dok	201.635.100	100%	100%	BKPSDM

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun							
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		1.123	9.368.924.634	1.123	9.068.496.734		96%	
6.01,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		520	2.095.021.502	520	4.794.593.602	100%	94%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23 Lap	159.040.000	23 Lap	159.040.000	100%	100%	
	koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24 Lap	55.080.000	24 Lap	55.080.000	100%	100%	Inspektorat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lap	103.960.000	1 Lap	103.960.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		34 Orang	2.562.597.946	34 Orang	2.430.254.411	100%	94%	
6.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Orang	2.562.597.946	34 Orang	2.430.254.411	100%	94%	Inspektorat
6.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		450 Orang	405.977.100	450 Orang	405.977.100	100%	100%	
	sosialisasi peraturan perundang-undangan		250 orang	200.024.100	250 orang	200.024.100	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	205.953.000	200 orang	205.953.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		16	1.039.307.200	16	1.039.307.200	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 paket	61.297.400	1 paket	61.297.400	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	132.987.800	1 paket	132.987.800	100%	100%	Inspektorat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.2.06.06	Belanja cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	74.007.000	1 paket	74.007.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	64.460.000	1 Lap	64.460.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	706.555.000	12 Lap	706.555.000	100%	100%	Inspektorat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	800.000.000	1 Unit	631.915.635	100%	80%	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	800.000.000	1 Unit	631.915.635	100%	80%	Inspektorat
6.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		25 Lap	65.283.456	25 Lap	65.283.456	100%	100%	
6.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	19.234.000	1 Lap	19.234.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	36.049.456	12 Lap	36.049.456	100%	100%	Inspektorat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	100%	100%	Inspektorat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		4 Unit	62.815.800	4 Unit	62.815.800	100%	100%	
	penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3 Unit	59.100.000	3 Unit	59.100.000	100%	100%	Inspektorat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		1 Unit	3.715.800	1 Unit	3.715.800	100%	100%	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		568	4.226.723.132	568	4.226.723.132	100%	100%	
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		554	3.709.873.132	554	3.709.873.132	100%	100%	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan pemerintah daerah (Penutupan Kas /uang lembur)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	236 Lap	1.514.600.000	236 Lap	1.514.600.000	100%	100%	Inspektorat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja (Reviu LPPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Lap	84.250.000	10 Lap	84.250.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan (Reviu LKPD, Reviu PBJ & Reviu DAK)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Lap	337.000.000	25 Lap	337.000.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	198 Lap	604.450.000	198 Lap	604.450.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	237.824.000	1 Kesepakatan	237.824.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	84 Dok	931.749.132	84 Dok	931.749.132	100%	100%	Inspektorat
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		14 Lap	516.850.000	14 Lap	516.850.000	100%	100%	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah		1 Lap	301.800.000	1 Lap	301.800.000	100%	100%	Inspektorat
	Pengawasan dengan tujuan tertentu		13 Lap	215.050.000	13 Lap	215.050.000	100%	100%	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1 Keg	47.180.000	1 Keg	47.180.000	100%	100%	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		1 Keg	47.180.000	1 Keg	47.180.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.03.2.02.03	koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 keg	47.180.000	1 keg	47.180.000	100%	100%	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAAN								
	Kecamatan Bula		246	2.439.888.630	246	2.389.968.812	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		6	2.175.448.230	6	2.125.528.412	100%	98%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	12.084.900	1 Dok	12.084.900	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	12.084.900	1 Dok	12.084.900	100%	100%	Kecamatan Bula
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36 Orang	2.062.745.130	36 Orang	2.012.825.312	100%	98%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	2.062.745.130	36 Orang	2.012.825.312	100%	98%	Kecamatan Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	50.000.000	1 Orang	50.000.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2	32.444.200	2	32.444.200	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.444.200	1 Paket	14.444.200	100%	100%	Kecamatan Bula
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	18.000.000	1 Lap	18.000.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	11.280.000	2 Lap	11.280.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	7.200.000	1 Lap	7.200.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	4.080.000	1 Lap	4.080.000	100%	100%	Kecamatan Bula



kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	6.894.000	1 Unit	6.894.000	100%	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	6.894.000	1 Unit	6.894.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	29.985.000	200 Orang	29.985.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala		200 Orang	29.985.000	200 Orang	29.985.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah								
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	29.985.000	100 Orang	29.985.000	100%	100%	Kecamatan Bula
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	100 Orang	47.855.100	100 Orang	47.855.100	100%	100%	Kecamatan Bula

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Lokal, Regional, dan Nasional							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		2 Dok	219.455.400	2 Dok	219.455.400	100%	100%	
	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		2 Dok	219.455.400	2 Dok	219.455.400	100%	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	199.999.600	1 Dok	199.999.600	100%	100%	Kecamatan Bula
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	19.455.800	1 Dok	19.455.800	100%	100%	Kecamatan Bula
	Kecamatan Bula Barat		190	1.402.863.099	190	1.368.187.775	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		38	1.362.434.597	38	1.328.716.775	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21 Orang	1.256.219.297	21 Orang	1.222.502.775	100%	98%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	1.256.219.297	21 Orang	1.222.502.775	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	80.309.300	15	80.309.300	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.269.400	1 Paket	5.269.400	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.069.900	1 Paket	5.069.900	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	3.720.000	1 Lap	3.720.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	66.250.000	12 Lap	66.250.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	8.112.000	1 Lap	8.112.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	8.112.000	1 Lap	8.112.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		1 Unit	17.794.000	1 Unit	17.794.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	17.794.000	1 Unit	17.794.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150 Orang	18.410.000	150 Orang	18.410.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		150 Orang	18.410.000	150 Orang	18.410.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	100 Orang	8.900.000	100 Orang	8.900.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	9.510.000	50 Orang	9.510.000	100%	100%	Kecamatan Bula Barat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		2 Dok	22.018.502	2 Dok	21.061.000	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		2 Dok	22.018.502	2 Dok	21.061.000	100%	100%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	1 Dok	199.999.641	1 Dok	199.999.641	100%	100%	Kecamatan Bula Barat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		<i>Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>							
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	1 Dok	22.018.502	1 Dok	21.061.000	100%	96%	Kecamatan Bula Barat
	Kecamatan Teluk Waru		146	1.884.531.188	144	1.804.641.235	99%	96%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		44	1.658.923.188	43	1.589.843.235	98%	96%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26 Orang	1.546.046.188	26 Orang	1.494.627.835	100%	97%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	1.546.046.188	26 Orang	1.494.627.835	100%	97%	Kecamatan Teluk Waru
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	87.662.500	15	87.662.500	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.513.000	1 Paket	11.385.800	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.123.500	1 Paket	11.123.500	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.089.000	1 Paket	3.089.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	2.400.000	1 Lap	2.400.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	71.050.000	12 Lap	71.050.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	14.854.500	2 Lap	7.552.900	100%	51%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	10.954.500	1 Lap	3.652.900	100%	33%	Kecamatan Teluk Waru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	3.900.000	1 Lap	3.900.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	Penataan Organisasi		1 Dok	10.360.000	0 Dok	-	0%	0%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	1 Dok	10.360.000	0 Dok	-	0%	0%	Kecamatan Teluk Waru

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laksana							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Lap	199.998.000	1 Lap	199.998.000	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Lap	199.998.000	1 Lap	199.998.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	199.998.000	1 Lap	199.998.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Orang	14.800.000	100 Orang	14.800.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Orang	14.800.000	100 Orang	14.800.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	100 Orang	14.800.000	100 Orang	14.800.000	100%	100%	Kecamatan Teluk Waru

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	10.810.000	0 Dok	-	0%	0%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	10.810.000	0 Dok	-	0%	0%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	10.810.000	0 Dok	0	100%	0%	Kecamatan Teluk Waru
	Kecamatan Tutuk Tolu		130	892.075.264	130	869.370.057	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		28	863.760.664	28	841.055.457	100%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Orang	698.000.164	12 Orang	675.294.957	100%	97%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang	698.000.164	12 Orang	675.294.957	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	158.267.500	15	158.267.500	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.917.900	1 Paket	30.917.900	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.230.500	1 Paket	10.230.500	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.506.500	1 Paket	6.506.500	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	4.800.000	1 Paket	4.800.000	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	136.731.000	12 Lap	136.731.000	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	7.493.000	1 Unit	7.493.000	100%	100%	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	7.493.000	1 Unit	7.493.000	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Lap	14.194.600	1 Lap	14.194.600	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Lap	14.194.600	1 Lap	14.194.600	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	14.194.600	1 Lap	14.194.600	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Orang	7.270.000	100 Orang	7.270.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Orang	7.270.000	100 Orang	7.270.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	7.270.000	100 Orang	7.270.000	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	6.850.000	1 Dok	6.850.000	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	6.850.000	1 Dok	6.850.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	6.850.000	1 Dok	6.850.000	100%	100%	Kecamatan Tutuk Tolu
	Kecamatan Kian Darat		22	382.237.619	22	374.033.678	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4 Orang	364.177.119	4 Orang	355.973.678	100%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4 Orang	234.623.094	4 Orang	227.506.378	100%	96%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4 Orang	234.623.094	4 Orang	227.506.378	100%	96%	Kecamatan Kian Darat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	117.409.400	15	116.324.050	100%	99%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.841.900	1 Paket	17.757.300	100%	94%	Kecamatan Kian Darat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.107.500	1 Paket	10.103.750	100%	99%	Kecamatan Kian Darat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Paket	2.850.000	1 Paket	2.850.000	100%	100%	Kecamatan Kian Darat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Tamu							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	85.610.000	12 Lap	85.610.000	100%	100%	Kecamatan Kian Darat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	12.144.625	1 Lap	12.143.250	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	12.144.625	1 Lap	12.143.250	100%	100%	Kecamatan Kian Darat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	2.379.150	0 Unit	-	0%	0%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.379.150	0 Unit	-	0%	0%	Kecamatan Kian Darat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	18.060.500	1 Dok	18.060.500	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	18.060.500	1 Dok	18.060.500	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	18.060.500	1 Dok	18.060.500	100%	100%	Kecamatan Kian Darat
	Kecamatan Siritaun Wida Timur		131	914.851.901	130	882.842.443	99	96%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		30	873.807.501	29	841.798.043	96	96%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Orang	770.815.501	12 Orang	738.924.043	100%	95%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	770.815.501	12 orang	738.924.043	100%	95%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	94.880.000	15	94.762.000	100%	99%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.480.000	1 Paket	5.480.000	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Paket	9.000.000	1 Paket	8.932.000	100%	99%	Kecamatan Siritaun Wida Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	78.400.000	12 Lap	78.350.000	100%	99%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	8.112.000	1 Lap	8.112.000	20%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	8.112.000	1 Lap	8.112.000	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	2.220.700	0 Lap	-	0%	0%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	3.541.000	1 Unit	3.541.000	100%	100%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	3.541.000	1 Unit	3.541.000	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 Orang	13.605.000	100 Orang	13.605.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Orang	16.605.000	100 Orang	16.605.000	100%	100%	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	13.605.000	100 Orang	13.605.000	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	27.439.400	1 Dok	27.439.400	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	27.439.400	1 Dok	27.439.400	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	27.439.400	1 Dok	27.439.400	100%	100%	Kecamatan Siritaun Wida Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan Seram Timur		201	1.238.398.910	201	1.227.275.998	100%	99%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		34	1.051.874.610	34	1.040.962.998	100%	99%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	14.398.950	1 Dok	14.398.950	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	14.398.950	1 Dok	14.398.950	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16 Orang	888.599.035	16 Orang	877.688.698	100%	99%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	888.599.035	16 Orang	877.688.698	100%	99%	Kecamatan Seram Timur
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	124.608.425	15	124.608.300	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.316.300	1 Paket	7.316.300	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.542.125	1 Paket	8.542.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	9.400.000	1 Paket	9.400.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	99.350.000	12 Lap	99.350.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap	24.268.200	2 Lap	24.268.200	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	8.668.200	1 Lap	8.668.200	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	15.600.000	1 Lap	15.600.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		16 Lembaga	75.046.400	16 Lembaga	75.046.400	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		16 Lembaga	75.046.400	16 Lembaga	75.046.400	100%	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	75.046.400	16 Lembaga	75.046.400	100%	100%	Kecamatan Seram Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150 Orang	82.815.000	150 Orang	82.815.000	100%	100%	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		150 Orang	82.815.000	150 Orang	82.815.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	32.800.000	100 Orang	32.800.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50.015.000	50 Orang	50.015.000	100%	100%	Kecamatan Seram Timur
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	28.662.900	1 Dok	28.662.900	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	28.662.900	1 Dok	28.662.900	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	28.662.900	1 Dok	28.662.900	100%	99%	Kecamatan Seram Timur
	Kecamatan Werinama		60	1.923.654.446	60	1.879.526.642	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		59	1.909.312.446	59	1.865.184.642	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KABUPATEN/KOTA								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30 Orang	1.723.938.746	30 Orang	1.679.810.942	100%	97%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	1.723.938.746	30 Orang	1.679.810.942	100%	97%	Kecamatan Werinama
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		28	179.883.700	28	179.883.700	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.853.700	1 Paket	27.853.700	100%	100%	Kecamatan Werinama
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.230.000	1 Paket	1.230.000	100%	100%	Kecamatan Werinama
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	150.800.000	12 Lap	150.800.000	100%	100%	Kecamatan Werinama
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	5.490.000	1 Lap	5.490.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	5.490.000	1 Lap	5.490.000	100%	100%	Kecamatan Werinama
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	14.342.000	1 Dok	14.342.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	14.342.000	1 Dok	14.342.000	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	14.342.000	1 Dok	14.342.000	100%	100%	Kecamatan Werinama
	Kecamatan Siwalalat		191	1.840.975.046	191	1.778.905.421	100%	97%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		39	1.674.152.546	39	1.612.083.421	100%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23 Orang	1.524.501.846	23 Orang	1.462.433.421	100%	96%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN		23 Orang	1.524.501.846	23 Orang	1.462.433.421	100%	96%	Kecamatan Siwalalat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	141.068.600	15	141.068.600	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.325.700	1 Paket	8.325.700	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1 Paket	5.145.000	1 Paket	5.145.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Disediakan							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.573.600	1 Paket	6.573.600	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	12.150.000	1 Lap	12.150.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	117.200.000	12 Lap	117.200.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	8.582.100	1 Lap	8.582.100	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	8.582.100	1 Lap	8.582.100	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1 Lap	125.000.000	1 Lap	125.000.000	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Lap	125.000.000	1 Lap	125.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	1 Lap	125.000.000	1 Lap	125.000.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		150 Orang	17.920.000	150 Orang	17.920.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		150 Orang	17.920.000	150 Orang	17.920.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 Orang	8.410.000	100 Orang	8.410.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	9.510.000	50 Orang	9.510.000	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	23.902.500	1 Dok	23.902.500	100%	100%	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	23.902.500	1 Dok	23.902.500	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	23.902.500	1 Dok	23.902.500	100%	100%	Kecamatan Siwalalat
	Kecamatan Pulau Panjang		247	1.350.085.211	247	1.325.729.579	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		46	1.256.505.211	46	1.232.149.579	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	25.978.200	1 Dok	25.978.200	100%	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	25.978.200	1 Dok	25.978.200	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Orang	850.117.311	14 Orang	830.209.279	100%	98	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	850.117.311	14 Orang	830.209.279	100%	98%	Kecamatan Pulau Panjang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		28	315.012.300	28	315.012.300	100%	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.992.500	1 Paket	34.992.500	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.313.800	1 Paket	8.313.800	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 Paket	12.206.000	1 Paket	12.206.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Disediakan							
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	12.400.000	1 Lap	12.400.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Lap	247.100.000	24 Lap	247.100.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	28.442.400	1 Lap	28.442.400	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	28.442.400	1 Lap	28.442.400	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	25.615.000	1 Unit	25.615.000	100%	100%	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.615.000	1 Unit	25.615.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Penataan Organisasi		1 Dok	11.340.000	1 Dok	11.340.000	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	1 Dok	11.340.000	1 Dok	11.340.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Publik dan Tata Laksana	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	51.330.000	200 Orang	51.330.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		200 Orang	51.330.000	200 Orang	51.330.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 Orang	29.330.000	100 Orang	29.330.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	22.000.000	100 Orang	22.000.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	42.250.000	1 Dok	42.250.000	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	42.250.000	1 Dok	42.250.000	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	42.250.000	1 Dok	42.250.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Panjang
	Kecamatan Pulau Gorom		239	1.439.396.381	239	1.408.987.963	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		26	1.283.255.381	26	1.257.848.963	100%	98%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21 Orang	1.097.874.981	21 Orang	1.072.469.963	100%	98%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	1.097.874.981	21 Orang	1.072.469.963	100%	98%	Kecamatan Pulau Gorom
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	185.380.400	4	185.380.400	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.963.400	1 Paket	9.963.400	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.167.000	1 Paket	9.167.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	6.000.000	1 Lap	6.000.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	160.250.000	1 Lap	160.250.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	8.478.200	1 Lap	8.478.200	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	8.478.200	1 Lap	8.478.200	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		yang Disediakan							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		12	117.850.100	11	112.849.000	99%	96%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 Lap	96.350.100	1 Lap	96.349.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	96.350.100	1 Lap	96.349.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0%	0%	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	0 Unit	-	0%	0%	Kecamatan Pulau Gorom
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		10 Keluarga	16.500.000	10 Keluarga	16.500.000	100%	100%	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	10 Keluarga	16.500.000	10 Keluarga	16.500.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	21.250.000	200 Orang	21.250.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		200 Orang	21.250.000	200 Orang	21.250.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	100 Orang	12.890.000	100 Orang	12.890.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Indonesia	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	8.360.000	100 Orang	8.360.000	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	17.040.900	1 Dok	17.040.900	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	17.040.900	1 Dok	17.040.900	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	17.040.900	1 Dok	17.040.900	100%	100%	Kecamatan Pulau Gorom

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan Gorom Timur		216	789.731.756	216	764.826.871	100%	97%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15	757.665.256	15	732.760.371	100%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10 Orang	647.844.056	10 Orang	622.939.171	100%	96%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	647.844.056	10 Orang	622.939.171	100%	96%	Kecamatan Gorom Timur
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	109.821.200	4	109.821.200	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.011.700	1 Paket	6.011.700	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.309.500	1 Paket	5.309.500	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	8.100.000	1 Lap	8.100.000	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	90.100.000	1 Lap	90.100.000	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	8.112.000	1 Lap	8.018.000	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	8.112.000	1 Lap	8.018.000	100%	99%	Kecamatan Gorom Timur
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	12.255.000	200 Orang	12.255.000	100%	100%	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>200 Orang</i>	<i>12.255.000</i>	<i>200 Orang</i>	<i>12.255.000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	100 Orang	4.660.000	100 Orang	4.660.000	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daearah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	7.595.000	100 Orang	7.595.000	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	19.811.500	1 Dok	19.811.500	100%	100%	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	19.811.500	1 Dok	19.811.500	100%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	19.811.500	1 Dok	19.811.500	100%	100%	Kecamatan Gorom Timur
	Kecamatan Kilmuri		235	1.468.803.370	235	1.447.561.946	100%	99%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		20	1.353.803.370	20	1.332.561.946	100%	98%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16 Orang	969.003.370	16 Orang	947.761.946	100%	98%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	969.003.370	16 Orang	947.761.9468	100%	98%	Kecamatan Kilmuri
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	384.800.000	4	384.800.000	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.832.000	1 Paket	48.832.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.777.000	1 Paket	19.777.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	296.191.000	1 Lap	296.191.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		14 Lembaga	15.000.000	14 Lembaga	15.000.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		14 Lembaga	15.000.000	14 Lembaga	15.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga	15.000.000	14 Lembaga	15.000.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	70.000.000	200 Orang	70.000.000	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		200 Orang	70.000.000	200 Orang	70.000.000	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	100 Orang	20.000.000	100 Orang	20.000.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	50.000.000	100 Orang	50.000.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	100%	100%	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	100%	100%	Kecamatan Kilmuri

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Partisipatif	rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif							
	Kecamatan Kesui Watubela		18	970.590.982	18	943.615.929	100%	97%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17	941.032.182	17	914.057.127	100%	97%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			770.591.282		743.756.129		96%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		770.591.282		743.756.129	100%	97%	Kecamatan Kesui watubela
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		15	157.358.400	15	157.239.400	100%	99%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Dalam Keg. Penyediaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	9.622.900	1 Paket	9.622.900	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket penyediaan Bahan Cetak	1 Paket	5.854.500	1 Paket	5.854.500	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Dalam Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	7.280.000	1 Lap	7.280.000	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	12 Lap	134.601.000	12 Lap	134.482.000	100%	99%	Kecamatan Kesui watubela

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	7.842.000	1 Lap	7.842.000	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penggunaan Listrik	1 Lap	7.842.000	1 Lap	7.842.000	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	5.240.500	1 Unit	5.219.600	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Partisipan/Orang Dalam Keg. Musrenbang Kecamatan	1 Unit	5.240.500	1 Unit	5.219.600	100%	99%	Kecamatan Kesui watubela
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		200 Orang	19.338.200	200 Orang	19.338.200	100%	100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		200 Orang	19.338.200	200 Orang	19.338.200	100%	100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 Orang	14.388.200	100 Orang	14.388.200	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	4.950.000	100 Orang	4.950.000	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1 Dok	10.220.600	1 Dok	10.220.600	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		1 Dok	10.220.600	1 Dok	10.220.600	100%	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dok	10.220.600	1 Dok	10.220.600	100%	100%	Kecamatan Kesui watubela
	Kecamatan Teor		186	1.130.362.078	186	1.105.297.164	100%	98%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23	698.187.978	23	673.350.164	100%	96%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dok	2.926.100	1 Dok	2.925.000	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	2.926.100	1 Dok	2.925.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7 Orang	505.363.078	7 Orang	480.528.164	100%	95%	
	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7 Orang	505.363.078	7 Orang	480.528.164	100%	95%	Kecamatan Teor

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		14	184.200.100	14	184.199.000	100%	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.020.100	1 Paket	13.019.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	3.680.000	1 Lap	3.680.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	167.500.000	12 Lap	167.500.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Lap	5.698.700	1 Lap	5.698.700	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	5.698.700	1 Lap	5.698.700	100%	100%	Kecamatan Teor
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Lap	250.000.000	2 Lap	250.000.000	100%	100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	100%	100%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	100%	100%	Kecamatan Teor

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1 Lap	50.000.000	1 Lap	50.000.000	100%	100%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap	50.000.000	1 Lap	49.774.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		10 Lembaga	16.864.100	10 Lembaga	16.864.100	100%	100%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		10 Lembaga	16.864.100	10 Lembaga	16.864.100	100%	100%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10 Lembaga	16.864.100	10 Lembaga	16.864.100	100%	100%	Kecamatan Teor

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Pembangunan di Desa							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		151	165.310.000	151	165.310.000	100%	100%	
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>151</i>	<i>165.310.000</i>	<i>151</i>	<i>165.310.000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	100 Orang	8.080.000	100 Orang	8.080.000	100%	100%	Kecamatan Teor

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kesatuan Republik Indonesia							
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	7.230.000	50 Orang	7.230.000	100%	100%	Kecamatan Teor
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	100%	100%	Kecamatan Teor
8,01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		99	22.017.184.758	99	17.095.703.788	100%	77%	
8,01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35	2.560.441.715	35	2.514.335.745	100%	98%	
8,01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24 Orang	1.654.491.715	24 Orang	1.614.444.995	100%	97%	
8,01.01.2.02.05	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	24 Orang	1.654.491.715	24 Orang	1.614.444.995	100%	97%	Badan Kesatuan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Tunjangan ASN							Bangsa dan Politik
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Paket	32.698.750	1 Paket	32.698.750	100%	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya		1 Paket	32.698.750	1 Paket	32.698.750	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4	586.487.125	4	584.345.500	100%	99%	
8.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.799.525	1 Paket	7.799.500	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.06.06	Belanja cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.862.600	1 Paket	7.788.000	100%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	13.480.000	1 Lap	13.480.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	557.345.000	12 Bulan	555.278.000	100%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 Paket	154.075.000	2 Paket	154.075.000	100%	97%	
	Pengadaan Mebel		1 Paket	74.075.000		74.075.000			
8.01.2.07.02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3 Paket	83.609.125	3 Paket	80.212.500	100%	95%	
8.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Paket	3.260.000	1 Paket	3.260.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket	19.149.125	1 Paket	15.752.500	100%	82%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.200.000	1 Paket	61.200.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Unit	49.080.000	1 Unit	48.559.000	100%	98%	
8.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.080.000	1 Unit	48.559.000	100%	98%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		2	967.500.000	2	967.500.000	100%	100%	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2	967.500.000	2	967.500.000	100%	100%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 Keg	950.000.000	1 Keg	950.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Kec	17.500.000	1 Kec	17.500.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		31	16.529.143.043	31	11.679.143.043	100%	70%	
8.01.03.2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,</i>		3	16.529.143.043	3	11.679.143.043	100%	70%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	<i>serta Pemantauan Situasi Politik</i>								
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dok	16.029.143.043	1 Dok	11.179.143.043	100%	67%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Lap	200.000.000	1 Lap	200.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	1 Lap	300.000.000	1 Lap	300.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		36	1.195.000.000	36	1.170.000.000	100%	97%%	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		36	1.195.000.000	36	1.170.000.000	100%	97%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Kec	120.000.000	4 Kec	120.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32 OKP	1.075.000.000	32 OKP	1.050.000.000	100%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		15 Kec	80.000.000	15 Kec	80.000.000	100%	100%	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		15 Kec	80.000.000	15 Kec	80.000.000	100%	100%	

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Kec	15.000.000	5 Kec	15.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Kec	65.000.000	10 Kec	65.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		35	685.100.000	35	684.725.000	100%	100%	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		35	685.100.000	35	684.725.000	100%	100%	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di BidangKewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Lap	200.000.000	5 Lap	200.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Lap	7.500.000	5 Lap	7.500.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikutipelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 Orang	65.000.000	9 Orang	64.625.000	100%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	250.000.000	10 Orang	250.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15 Lap	105.000.000	15 Lap	105.000.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja Anggaran Tahun Belanja yang di Evaluasi Tahun 2023		Realisasi capaian kinerja RKPD dan Anggaran RKPD 2023 s/d Triwulan IV		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 s.d Triwulan IV %		Perangkat Daerah
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	57.600.000	1 Dok	57.600.000	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan.

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2023, beberapa permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan.

Masih cukup tingginya kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 21,08 persen, naik 0,35 persen dari Tahun 2022.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Di sisi lain permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah akan memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi

sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka.

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Seram Bagian Timur dinilai belum memadai yang ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di peringkat ke-7 dari 11 Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan ukuran usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan. Selain derajat kesehatan, kebugaran menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Peran perempuan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur juga memegang peranan penting terutama sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Meskipun demikian pemberdayaan perempuan di Kabupaten Seram Bagian Timur masih perlu perhatian yang ditunjukkan dari beberapa variabel indeks pemberdayaan gender Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih rendah.

Selain itu kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur juga dilihat dari aspek tenaga kerja dimana daya saing tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur belum optimal.

Permasalahan ini dapat dilihat dari karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur yang didominasi oleh lulusan SD sebanyak 21.436 orang di tahun 2023. Sementara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang sebesar 1.959 orang justru didominasi oleh penduduk usia kerja lulusan SMA, dan terendah adalah lulusan SMK. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian, karena persaingan tenaga kerja di era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi agar kesejahteraan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur semakin meningkat.

3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023 menurun sebesar 0,19 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 4,1 turun di tahun 2023 menjadi sebesar 3,91 persen. Perekonomian di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami perlambatan dipengaruhi oleh 3 sektor lapangan usaha yang berperan besar terhadap perekonomian yaitu sector pertanian, kehutan dan perikanan, Pertambangan dan Administrasi Pemerintahan. Sektor Pertanian, kehutan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi paling dominan (leading sector) terhadap perekonomian mengalami perlambatan disebabkan fenomena El Nino yakni gangguan musim tanam, penurunan kualitas tanaman di bidang pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan sebab kekeringan.

4. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan global, perlu dioptimalkan implementasi reformasi birokrasi antara lain percepatan pelayanan publik yang tepat sasaran, penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan yang sesuai proses bisnis, kapasitas dan pola pikir sumber daya aparatur yang semakin adaptif dan terbuka, serta birokrasi yang kolaboratif, yang kesemuanya didukung dengan digitalisasi pemerintahan.

Reformasi birokrasi ditunjukkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), namun yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi tidak hanya tentang administrasi namun lebih mendorong agar dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kabupaten. Identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan urusan yang menyangkut dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Terhadap masalah Urusan Pendidikan, masih terdapat sejumlah permasalahan diantaranya :

- a. Ketersediaan tenaga pendidik belum merata, dimana rasio murid-guru yang belum ideal untuk semua jenjang pendidikan.

- b. Ketersediaan sarana pendidikan belum memadai, dapat dilihat masih ada kondisi ruang kelas yang rusak sedang/berat, selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah.
- c. Masih kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan termasuk proses pendaftaran akreditasi dan/atau reakreditasi kelembagaan;
- d. Penyelesaian pendidikan kesetaraan yang masih perlu ditingkatkan;
- e. Penguatan Digitalisasi Sekolah;
- f. Penguatan Assesmen Kopentensi Siswa Indonesia (AKSI) khususnya kopetensi siswa membaca, sains, dan matematika;
- g. Penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan; dan
- h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketrampilan dan keahlian terutama dalam mendukung kawasan prioritas Major Project dan sector prioritas (pariwisata dan kelautan, perikanan dan pertanian) termasuk produk unggulan daerah.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan pada Urusan Kesehatan, antara lain :

- a. Masih terdapat Fasyankes milik pemerintah (Puskesmas/RSUD) yang belum terpenuhi jumlah tenaga kesehatan sesuai standard;
- b. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah yang perlu terus ditingkatkan termasuk perumusan standar penyelenggaraan kesehatan daerah;
- c. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap Pandemi Covid-19 untuk peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan; dan

- d. Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain :

- a. Masih belum optimalnya implementasi dokumen RTRW dalam perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya infrastruktur pengendalian banjir;
- c. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; (iv) belum terpenuhinya media informasi penataan ruang melalui peta digital dan peta analog;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah;
- e. Belum adanya regulasi pada kawasan strategis cepat tumbuh;
- f. Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang; dan
- g. Masih belum optimalnya pengaturan terhadap kawasan strategis cepat tumbuh.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain :

- a. Masih adanya kondisi Rumah Tidak Layak Huni;
- b. Masih terbatasnya sinergi dan integrasi penanganan kawasan kumuh;
- c. Masih perlunya pembenahan dan/atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman;
- d. Masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana seperti halnya penyediaan air bersih, sanitasi dan untuk beberapa wilayah yang rentan bencana (banjir, abrasi dan gempa) untuk bangunan yang sesuai dengan standar bencana;
- e. Meningkatnya potensi bencana alam dan proses alih fungsi lahan serta pemenuhan standar lingkungan permukiman

terutama dikawasan konservasi (mangrove dan sepan dan sungai/pantai); dan

- f. Perlu adanya pengawasan terhadap kesesuaian peruntukan kawasan sesuai dengan arahan dan pemanfaatan ruang dan kawasan sesuai dengan RTRW.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat

Permasalahan pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. Masih terdapat ancaman konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- b. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; dan
- c. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku.

6. Urusan Sosial

Permasalahan di Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- b. Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejateraan sosial dan pelayanan sosial; dan
- c. Ketersediaan data dan informasi terkait dengan PMKS.

B. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan di Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan menejemen usaha, permodalan dan pemasaran;

- b. Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

2. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah; dan
- b. Masih perlunya peningkatan sistim pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional.

3. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kurang meratanya sarana dan prasarana olah raga yang tersedia (dan dalam kondisi baik), terutama pada kampung kampung; dan
- b. Perlunya peningkatan olah raga pendidikan dan prestasi serta pencarian bakat olah raga.
- c. Perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya kepemudaan untuk peningkatan pendidikan karakter dan budaya lokal daerah;
- d. Perlunya peningkatan program program pembinaan kepemudaan sesuai dengan karakter kebangsaan dan budaya lokal atau kearifan masyarakat.
- e. Perlunya meningkatkan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan dan pemuda dalam program pemberdayaan masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok pemuda; dan
- g. Pelibatan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengawasan partisipatif khususnya dalam pengawasan dana desa.

4. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya indentifikasi dan pengembangan kawasan sejarah/ budaya yang ada di daerah;
- b. Perlu adanya pengembangan kelompok seni budaya tradisonal daerah;
- c. Masih belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal dan upaya mendorong nilai nilai kearifan lokal masyarakat dan nilai nilai kebangsaan;
- d. Perlunya penyegaran budaya dan kearifan sosial masyarakat melalui even even dan/atau festival daerah
- e. Perlunya pemenuhan standar pelayanan dalam pengelolaan dan/atau pengembangan kawasan sejarah/budaya sebagai media/sarana edukasi bagi masyarakat, memperkuat jati diri bangsa dan budaya lokal masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Revitalisasi bangun dan/atau kawasan budaya sejaran masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Urusan Perpustakaan

Permasalahan Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat; dan
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.

6. Urusan Kearsipan

Permasalahan Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan; dan
- b. Implementasi pengelolaan arsip digital.

7. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan pada Urusan koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha koperasi yang kurang variatif dan masih rendah minat masyarakat untuk bergabung dalam keanggotaan koperasi;
- b. Masih diperlukan upaya peningkatan daya saing produk produk lokal;
- c. Perlunya peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan potensi unggulan lokal daerah; dan
- d. Kurangnya penguatan terhadap entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki UKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.

8. Urusan Statistik

Permasalahan pada Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral dikarenakan belum optimalnya data terstruktur yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan terinput sesuai jadwal update pada portal satu data.
- b. Masih minimnya kesadaran perangkat daerah tentang pentingnya data dalam pengambilan keputusan, sehingga data yang dimiliki tidak tersusun rapi dan tidak tercatat dengan baik;
- c. Perlunya penguatan menuju implementasi Satu Data baik terhadap perencanaan maupun hasil pembangunan; dan
- d. Perlunya validasi data dan akurasi data dan penggunaan digital data.

9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan anak dan perempuan;
- b. Pemberdayaan perempuan disektor ekonomi belum sepenuhnya optimal; dan

- c. Perlunya peningkatan partisipasi perempuan.

10. Urusan Pangan

Permasalahan pada Urusan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan ketahanan pangan masyarakat terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk pemanfaatan pangan lokal daerah;
- b. Perlu peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH); dan
- c. Perlu inventarisasi ahli fungsi lahan untuk implementasi program Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan.

11. Urusan Pertanahan

Permasalahan pada Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan proses pengumpulan dan verifikasi data;
- b. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar papan, patok karena masih belum jelas batas dan kelengkapan administrasi lainnya; dan
- c. Perlunya adanya koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan terkait dengan Hak Ulayat dan Penegasan Batas Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

12. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Masih diperlukan upaya mengoptimalkan ketersediaan dan/atau fungsi Ruang Terbuka Hijau;
- b. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R (system pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompas yang lebih efektif dan efisien);

- c. Masih memerlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kersihan dan lingkungan; dan
- d. Perlu adanya Manejemen Pengelolaan Lingkungan (Upaya Terpadu dalam penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup).

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal yang tidak sesuai dengan KK/KTP;
- b. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlunya pengawasan terhadap SOP dalam memproses dokumen administrasi kependudukan pada semua kecamatan; dan
- d. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia termasuk dukungan saran dan prasarana dibidang pelayanan yang masih belum optimal (kurang).

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Masalah penguatandan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa;
- b. Penataan Desa dan Desa Adat;
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desadan pengawasan terhadap dana desa;
- d. Penguatan kerjasama dengan APH dan APIP dalam rangka pengawasan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa;
- e. Mendorong percepatan dan penyelesaian Hak Hak Masyarakat Hukum Adat melalui konsolidasi pertanahan untuk hak hak ulayat dan petuanan;

- f. Mendorong pemberdayaan masyarakat desa untuk penguatan ketahanan pangan dan produk unggulan desa;
- g. Pembentukan Desa Wisata.
- h. Penataan pemeritahan desa untuk penyiapan Desa Adat, Desa Wisata, Desa Budaya, Desa Kreatif, Desa Sadar Hukum, Desa Keluarga Berencana (KB), Desa Literasi, dan Desa Tanggap Bencana
- i. Penyelesaian masalah penyelenggaraan pemilihan kepada desa dan perangkat perangkat desa;
- j. Optimalisasi pengembangan potensi desa dan produk unggulan desa;
- k. Peningkatan Indeks Pembangunan Desa; dan
- l. Penguatan kapasitas aparatur (perangkat) desa dalam penyusunan dokumen perencanaan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya antisipasi terhadap dampak bonus demografi khususnya bagi kelompok usia produktif dan kelompok usia lanjut;
- b. Perlunya peningkatan jumlah Kader KB yang berkualitas;
- c. Perlunya penguatan program KB dan Keluarga Sejahtera bagi remaja dan siswa sekolah; dan
- d. Perlunya adanya sosialisasi bagi pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan yang tidak terpenuhi kebutuhan KB.

16. Urusan Perhubungan

Permasalahan pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan layanan di bidang perhubungan khususnya Terminal;
- b. Perlunya pembentukan UPTD Terminal untuk memaksimalkan fungsi dan pelayanan bagi masyarakat;

- c. Perlu adanya peningkatan fasilitas kelengkapan jalan serta sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan angkutan moda transportasi perairan dan/atau pulau; dan
- e. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran bagi peningkatan sarana dan prasarana transportasi perhubungan laut antar pulau dan/atau antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan infomatika adalah sebagai berikut:

- a. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta jaringan utilitas untuk menjaga sistim informasi perkotaan;
- b. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Sistim Satu Data dan Satu Peta; dan
- c. Perlunya mengalokasikan anggaran untuk membangun Aplikasi (Industri 4.0) yang dapat menampung data skala kabupaten yang hasil pengelolaanya biasa digunakan untuk berbagai kepentingan (informasi pembangunan daerah, investasi dan penanaman modal).

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada Urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil kelautan dan perikanan;
- b. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- c. Belum optimalnya alokasi pemilihan jenis ikan, produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap;

- d. Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
- e. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan;
- f. Perlu perhatian terhadap pengembangan dan pengelolaan wisata pantai dan bahari;
- g. Perlunya pembatasan waktu daerah tangkap terutama ikan julung yang ada pada wilayah pesisir;
- h. Perlu adanya manajemen terhadap sumber daya perairan;
- i. Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM para tenaga pendamping/penyuluh dan nelayan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk budidaya dan pengelolaan;
- j. Pendampingan dan penguatan terhadap budidaya rumput laut serta usaha pengelolaannya; Optimalisasi dan peningkatan investasi dalam pengelolaan potensi perikanan;
- k. Masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan termasuk pengembangan wisata bahari;
- l. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan serta belum optimalnya pengelolaan produk unggulan hasil perikanan;
- m. Belum maksimalnya peranan kelembagaan perikanan; dan
- n. Belum optimalnya pengembangan perencanaan pembangunan berbasis pulau/kepulauan dan/ atau gugus pulau termasuk dalam menghadapi implementasi Lumbung Ikan Nasional;

2. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada UrusanPariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya inovasi untuk memaksimalkan potensi wisata lokal daerah dan mengantisipasi menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan Pandemi Covid-19;
- b. Perlunya menguatkan dan/atau menggerakkan kembali Desa Wisata dan Desa Budaya;

- c. Masih belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata;
- d. Masih rendahnya pelaku usaha kreatif; dan
- e. Kurangnya promosi pariwisata yang sinergi dan lemahnya manajemen tata kelola daya tarik wisata.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan pada Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian;
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian;
- c. Belum optimalnya kualitas mutu, produk, komoditas, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan non aparatur serta sarana dan prasarana pertanian;
- d. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat;
- e. Masih rendahnya pola kemitraan kelembagaan petani dan/atau pengembangan usaha pertanian;
- f. Masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
- g. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya;

- b. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal;
- c. Masih diperlukan penerapan protokol kesehatan sector perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal; dan
- d. Masih kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal UMKM karena kurang promosi dan pemasaran.

D. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

1. Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal;
- b. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas wilayah terutama akibat kondisi pandemi covid-19 karena diperlukan koordinasi intensif dan pengecekan lapangan bersama dengan masyarakat;
- d. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat;
- e. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik sesuai standar; dan
- f. Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat.

2. Urusan Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

- a. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
- b. Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;
- c. Perlu menerapkan e-government dan SIPD yang terintegrasi;
- d. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan;
- e. Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan
- f. Belum optimalnya komponen pengukuran kinerja disebabkan kurang efektifnya koordinasi perencanaan dengan Bappeda Kabupaten/Kota, keselarasan antar Kementerian dan kebijakan Kementerian yang kurang konsisten serta kurangnya SDM terhadap urusan perencanaan; dan
- g. Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data.

3. Urusan Keuangan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan.
- c. Belum optimalnya manajemen aset daerah.

4. Urusan Pengawasan

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah;
- b. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah;
- c. Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.
- d. Perlunya peningkatan pengawasan internal pemerintah daerah (APIP) dalam kerangka pengawasan dana desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Perlunya pengembangan pengawasan partisipatif dengan melibatkan stakeholder pembangunan;
- f. Peningkatan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar lembaga penegak hukum;
- g. Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai;
- h. Perlunya penguatan kapasitas APIP; dan
- i. Perlunya penyusunan instrument pengawasan dan SOP pengawasan terhadap aparatur pemerintah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

5. Urusan Kepegawaian

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan Urusan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum terbangunnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan instansi pusat.
- b. Belum optimalnya penerapan sistem merit dan pengisian jabatan JPT yang masih diisi oleh Pjs;
- c. Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai;



- d. Perlu adanya pedoman pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyusunan road map reformasi birokrasi.

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Asumsi Kebijakan Ekonomi Nasional

Analisis terhadap asumsi kebijakan ekonomi nasional diperlukan sebagai referensi atau gambaran dari keseluruhan pembangunan nasional yang merupakan landasan bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di lingkup daerah. Sesuai amanat Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Sebagai implementasi dari kesatuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Asumsi kebijakan ekonomi nasional diuraikan dalam tiga tahapan, yaitu evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prakiraan kinerja tahun berjalan, dan perencanaan untuk tahun mendatang. Asumsi kebijakan ekonomi makro nasional sebagaimana dimaksud diuraikan dalam sejumlah indikator yaitu, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks pembangunan manusia, penurunan emisi gas rumah kaca, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

A. Evaluasi Pembangunan Tahun 2023

Kebijakan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kinerja pencapaian yang positif telah terlihat pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, namun demikian perlu dibarengi dengan upaya akseleratif dalam mendorong

pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai target yang diharapkan pada tahun 2024.

Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menunjukkan perbaikan positif, namun terdapat sejumlah indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional; (2) rasio kewirausahaan nasional; (3) pertumbuhan produk domestik bruto pertanian; (4) pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan; (5) kontribusi produk domestik bruto pariwisata; (6) pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto); (7) pertumbuhan ekspor industri pengolahan; serta (8) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa.

Capaian kinerja ekonomi makro tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar III.1 Capaian Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2023



Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, termasuk di dalamnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif seperti (1) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial mencapai 95,75 persen pada tahun 2023; (2) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi mencapai 62,13 persen pada tahun 2023; (3) Indeks Pembangunan Keluarga dari 54,01 pada tahun 2021 menjadi 61,43 pada tahun 2023; dan (5) Indeks

Kerukunan Umat Beragama dari 72,39 pada tahun 2021 menjadi 76,02 pada tahun 2023.

Indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; (2) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (3) insidensi tuberkulosis; (4) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta; (5) nilai rata-rata hasil program for international student assessment: membaca, matematika, dan sains; (6) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (7) harapan lama sekolah; (8) Indeks Perlindungan Anak; (9) Indeks Pembangunan Pemuda; (10) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; (11) Indeks Revolusi Mental; (12) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila; (13) Indeks Pembangunan Kebudayaan; (14) Indeks Pembangunan Masyarakat; dan (15) nilai budaya literasi.

Pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menunjukkan perbaikan positif. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain

(1) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia; serta (2) produk domestik regional bruto dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar menunjukkan beberapa indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; (3) persentase pemenuhan kebutuhan air baku; (4) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; (5) persentase capaian on time performance transportasi udara; (6) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan; (7) rasio elektrifikasi; serta (8) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

B. Prakiraan Tahun 2024

Capaian pada tahun 2023 masih beserta hasil analisis terhadap berbagai tantangan pembangunan, masih sangat membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Kinerja pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2024 perlu mendapatkan penyesuaian dalam hal penargetan maupun dari sisi kebijakan.

Penyesuaian terhadap asumsi ekonomi makro nasional tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel III.1 Proyeksi dan Penyesuaian Target Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Indikator	Capaian				2024		
		2020	2021	2022	2023	RPJMN	RKP	Outlook
Sasaran Pembangunan								
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	3,70	5,31	5,05	6,50	5,20	5,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	5,86	5,32	4,30	5,70	5,0-5,7
3	Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374	0,377	0,381-0,384
4	Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9,57	9,36	7,00	7,50	8,5-9,0
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,81	73,16	73,77	74,39	75,54	74,02	75,09
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	24,46	27,07	27,82	27,02	27,30	27,27	27,27
Indikator Pembangunan								
1	Nilai Tukar Petani	101,65	104,64	107,33	112,46	105,00	108,00	105-108
2	Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	106,45	105,40	107,00	110,00	107-110
3	Laju Inflasi (yoy)	1,68	1,87	5,51	2,61	2,70	2,80	2,70
4	Nilai Tukar Rupiah	14.543	14.296	14.847	15.235	15.000	15.000	15.200

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

C. Perencanaan Tahun 2025

Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun-tahun berikutnya. Adapun tantangan yang masih dihadapi untuk tahun 2025, di antaranya:

- (1) konflik global yang memengaruhi rantai pasok global dan stabilitas perekonomian nasional;
- (2) belum optimalnya pelayanan dasar di wilayah timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) adanya isu perubahan iklim yang berdampak pada kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan;

- (4) terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya produktivitas dan kurang terdistribusinya sumber daya manusia terampil; serta
- (5) rendahnya kapasitas teknologi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Perencanaan tahun 2025 diperhadapkan dengan kondisi faktual bahwa Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 dan Prioritas Nasional sebagai berikut.

Gambar III.2 Tema dan Prioritas RKP Tahun 2025



Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024 dan 2025. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen sedangkan tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3-5,6 persen.

Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan meeting, incentive, convention, and exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk menjawab indikator ekonomi makro pembangunan yaitu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Gambar III.3 Sasaran Kinerja Ekonomi Makro RKP Tahun 2025



3.1.2 Asumsi Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku

Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2025 diarahkan dengan Tema: Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas. Tema ini dielaborasi ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Provinsi Maluku, yaitu:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pengelolaan SDA dan Pengembangan Industri Pengolahan Berkelanjutan
3. Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Mendorong Ekonomi Daerah, Investasi dan Pariwisata
4. Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau

5. Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
6. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
7. Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance

Kebijakan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah:

a. Mewujudkan Tujuan Pembangunan peningkatan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

Sasaran strategis yang diupayakan adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dan 2) Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan. Strategi umum yang dilaksanakan adalah pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan, dengan arah kebijakannya meliputi: 1) Penguatan industri daerah berbasis komoditas unggulan dan 2) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

b. Mewujudkan Tujuan Pembangunan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran strategis yang diupayakan adalah 1) Meningkatnya pendapatan masyarakat, 2) Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dan 3) Terkendalinya harga kebutuhan pokok; 4) Meningkatnya kesempatan kerja yang berkualitas dan 5) Meningkatnya keterampilan, kompetensi SDM dan penciptaan lapangan kerja.

Strategi utama yang dilaksanakan adalah Percepatan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan 1) Peningkatan daya beli masyarakat; 2) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); 3) Ketersediaan pangan daerah; dan 4) Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan tema, prioritas pembangunan dan uraian kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2025, maka ditetapkan sasaran strategis Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar III.4 Sasaran Kinerja Ekonomi Makro RKPD Provinsi Maluku



3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi

yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kabupaten berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

A Struktur Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan (Syafrizal, 1999).

Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan besarnya peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB suatu daerah, maka dapat dilihat arah kecenderungan struktur ekonomi daerah tersebut. Berkembangnya perekonomian suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan peranan setiap sektor berakibat perubahan struktur ekonomi daerah tersebut. Struktur perekonomian yang terjadi pada umumnya bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri selanjutnya ke sektor jasa. Proses struktural ini dapat berhasil dengan baik dengan memperlihatkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif yang akan menjadi prioritas dalam perekonomian. Perencanaan pembangunan sebagai landasan membuat kebijakan pembangunan harus memperhatikan kondisi riil perekonomian, terutama kondisi sektor-sektor ekonomi yang ada, sehingga akan dapat diketahui sektor potensial yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah (Ma'mun dan Irwansyah, 2012).

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir (2021-2023) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur.

Berdasarkan Tabel III.1, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,26 persen (naik 4,09 poin persen dibandingkan tahun 2022), disusul oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,49 persen (turun 9,33 poin persen dibandingkan tahun 2022). Dan berikutnya adalah lapangan usaha Pemerintahan, Administrasi Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,37 persen (naik 1,35 poin persen dibandingkan tahun 2022). Peranan pembentukan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2021-2023 yang dihasilkan oleh lapangan usaha dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel III.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (persen)**

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	27,82	27,17	31,26
Pertambangan dan Penggalian	26,54	28,83	19,49
Industri Pengolahan	1,52	1,56	1,70
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,01	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,07
Konstruksi	7,31	6,90	7,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,31	7,29	8,48
Transportasi dan Pergudangan	2,68	2,75	3,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,46	0,54
Informasi dan Komunikasi	0,62	0,59	0,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	1,81	1,91
Real Estate	0,33	0,31	0,34
Jasa Perusahaan	0,13	0,12	0,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	16,97	16,02	17,37
Jasa Pendidikan	2,37	2,24	2,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	2,50	2,90
Jasa Lainnya	1,41	1,37	1,55
Total	100	100	100

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Kontribusi Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2021-2023 mencapai 3.509,35 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ADHB ini mengalami penurunan sebesar 128.790 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3.638,14 miliar rupiah. Berbeda dengan tahun sebelumnya nilai PDRB ADHB ini mengalami kenaikan dimana di tahun 2021 nilai PDRB ADHB ini mencapai 3.177,71 miliar rupiah naik di tahun 2022 mencapai 3.638.14 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ADHB di tahun 2023 dipengaruhi oleh turunya produksi di beberapa kategori lapangan usaha dan adanya kenaikan harga. Selanjutnya nilai PDRB ADHB (miliar rupiah)dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2021-2023

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883,97	988,50	1.097,09
Pertambangan dan Penggalian	843,46	1.048,75	684,12
Industri Pengolahan	48,30	56,61	59,70
Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,52	545,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,99	2,13	2,31
Konstruksi	232,20	251,15	270,51
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	232,31	265,39	297,50
Transportasi dan Pergudangan	85,27	99,93	120,57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,11	16,90	18,78
Informasi dan Komunikasi	19,59	21,59	23,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	59,66	65,87	66,90
Real Estate	10,63	11,22	11,89
Jasa Perusahaan	4,13	4,54	4,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	539,25	583,01	609,61
Jasa Pendidikan	75,25	81,44	85,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81,29	90,89	101,86
Jasa lainnya	44,81	49,69	54,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.177,71	3.638,14	3.509,35

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

B Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami perbaikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Setelah berkontraksi pada tahun 2019 sebesar 0,06 persen akibat Covid 19, selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami perlahan mengalami perbaikan dimana di tahun 2020 sebesar 1,06 persen hingga 1,61 persen di tahun 2021 yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia, kinerja perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2022 mengalami perbaikan yang cukup

signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktifitas perekonomian masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022 tercatat mencapai 4,10 persen, namun di tahun 2023 Laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan sebesar 3,19 Persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh 3 sektor lapangan usaha yang berperan besar terhadap perekonomian yaitu sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik III.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) Tahun 2019 – 2023



Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat mengalami perlambatan di tahun 2023 sebesar 3,19 Persen, dari 4,10 Persen di Tahun 2022 dan 1,61 persen di tahun 2021. Meskipun ada beberapa sektor lapangan usaha mengalami kenaikan produksi, namun penurunan laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2023 mengalami

penurunan disebabkan oleh 3 sektor lapangan usaha yang berperan besar terhadap perekonomian yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sektor Pertanian, kehutan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi paling dominan (leading sector) terhadap perekonomian mengalami perlambatan disebabkan fenomena Elnino yakni gangguan musim tanam, penurunan kualitas tanaman di bidang pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan sebab kekeringan. Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2023 adalah pada kategori Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,04 persen, mengalami peningkatan sebesar 4,57 persen dari sebelumnya 5,47 persen pada tahun 2022. Sedangkan Kategori Jasa Keuangan merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2023, dimana pertumbuhannya sebesar negatif 0,19 persen.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seram Bagian Timur di tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4 Laju Pertumbuhan Rill PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen), 2021-2023

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.73	7.13	7.02
Pertambangan dan Penggalian	-4.97	-3.30	-0.27
Industri Pengolahan	1.28	13.31	3.16
Pengadaan Listrik dan Gas	5.71	4.64	2.62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.01	3.59	6.64
Konstruksi	6.50	4.94	4.00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.03	8.34	6.91
Transportasi dan Pergudangan	2.74	5.47	10.04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.29	8.48	7.41
Informasi dan Komunikasi	4.60	7.50	6.16
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.61	0.48	-0.19
Real Estate	1.87	4.02	4.08

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Perusahaan	4.04	6.75	4.22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.72	5.96	1.29
Jasa Pendidikan	3.95	6.31	4.37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.08	8.17	8.23
Jasa lainnya	1.14	6.75	5.38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.61	4.10	3.91

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan ditujukan untuk melihat nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada daerah tertentu. Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010, angka PDRB Seram Bagian Timur tercatat senilai dari 2.047,51 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 2.127,49 miliar rupiah pada tahun 2023. Perlambatan laju pertumbuhan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha, tidak dipengaruhi perubahan harga.

Tabel III. 5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2021-2023

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	561,14	601,14	643,52
Pertambangan dan Penggalian	507,84	491,1	489,77
Industri Pengolahan	28,07	31,81	32,79
Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,37	0,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,67	1,73	1,85
Konstruksi	132,79	139,35	144,42
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	150,01	162,51	173,75
Transportasi dan Pergudangan	54,29	57,26	63,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,23	10,01	10,75
Informasi dan Komunikasi	16,2	17,42	18,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	36,91	37,09	37,02
Real Estate	7,55	7,86	8,18

Lapangan Usaha	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Jasa Perusahaan	3,24	3,46	3,61
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	322,21	341,4	346,12
Jasa Pendidikan	54,12	57,54	60,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52,61	56,91	61,59
Jasa lainnya	28,56	30,49	32,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.966,86	2.047,50	2.127,49

Sumber Data : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2024

C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2022 tercatat mencapai 4,10 persen, namun di tahun 2023 Laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami perlambatan sebesar 3,19 Persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha sebesar 3,19 Persen ini dengan kontribusi pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,26 persen, di susul oleh pertambangan dan Penggalian sebesar 19,49 persen dan administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,37 persen.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Maluku, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 diprioritaskan pada pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur kewilayahan, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, adaptif

dan inovatif, tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, maka perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan dengan memperhatikan pengaruh ekonomi nasional dan ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi:

- 1) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur yang relatif masih tinggi;
- 2) Jumlah stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih relatif tinggi;
- 3) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

- 4) Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat yang relatif tetap dibandingkan dengan tahun lalu;
- 5) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan;
- 6) Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur dapat digambarkan capaian pada tahun 2022, 2023, Target 2024 dan 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2. berikut.

**Tabel III.6 target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Seram Bagian Timur**

No	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	CAPAIAN		TARGET	
			2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,10	3,91	4,12	4,17
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,05	69,84	66,20	73,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,38	3,31	3,26	2,80
4	Presentasi Penduduk Miskin	Persen	20,73	21,08	20,18	18,70
5	Rasio Gini	Indeks	0,242	0,244	0,354	0,234

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang merupakan perwujudan siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) relevansi program dan kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) *Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) *Disiplin Anggaran*

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) *Keadilan Anggaran*

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) *Efisiensi dan Efektivitas*

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD;
- 2) Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD;
- 3) Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total

belanja daerah diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Nilai besaran pajak/retribusi yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penurunan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani.

2. Belum seluruhnya masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
3. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pelestarian Obyek wisata dengan baik yang menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke obyek wisata.
5. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
4. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.
5. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
2. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
3. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak
4. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
5. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
6. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
7. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata)
8. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD.
9. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD
10. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
11. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, dimana dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 kerangka pendanaan yang digunakan menggunakan proyeksi dalam RPJMD di tahun 2025. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut dituangkan dalam Tabel III.6 sebagai berikut :

**Tabel III.7. Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023, Pendapatan 2024 Proyeksi/Target
Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Seram Bagian Timur**

NO	URAIAN	Realisasi APBD TA	Realisasi APBD TA	Target APBD TA	Proyeksi APBD TA	Proyeksi APBD TA
		2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.786.512.035	33.006.030.948	13.667.586.288	20.527.753.458	21.554.141.131
4.1.01	Pajak Daerah	7.999.412.125	7.915.000.000	5.733.962.012	6.863.812.152	7.207.002.760
4.1.02	Retribusi Daerah	1.908.254.900	1.603.254.900	860.000.000	990.746.746	1.040.284.084
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.582.575.052	5.473.186.825	5.473.186.825	4.359.359.683	4.577.327.668

NO	URAIAN	Realisasi APBD TA	Realisasi APBD TA	Target APBD TA	Proyeksi APBD TA	Proyeksi APBD TA
		2022	2023	2024	2025	2026
	yang Dipisahkan					
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.296.269.958	18.014.589.223	1.600.437.451	8.313.834.877	8.729.526.620
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	919.435.983.000	958.419.751.000	924.015.947.000	1.127.618.459.410	1.183.999.382.381
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	907.581.727.000	943.319.751.000	912.161.691.000	1.111.859.976.149	1.167.452.974.957
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.854.256.000	15.100.000.000	11.854.256.000	15.758.483.261	16.546.407.424
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	12.050.795.900	26.136.544.691	27.443.371.926
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan			12.050.795.900	26.136.544.691	27.443.371.926
	Jumlah Pendapatan	950.222.495.035	991.425.781.948	949.734.329.188	1.174.282.757.559	1.232.996.895.438

Dalam dokumen RKPD Tahun 2025, target Pendapatan Daerah Rp. 1.174.282.757.559 mengalami kenaikan sebesar Rp. 224.548.428.371 atau naik 24% jika dibandingkan dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 949.734.329.188, dengan perincian sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 20.527.753.458 dibanding tahun 2024 sebesar Rp. 13.667.586.288 mengalami kenaikan Rp. 6.860.167.170, atau naik sebesar 50%.
- Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebesar Rp. 1.127.618.459.410 sebesar 22% dibanding tahun 2024 sebesar Rp. 924.015.947.000.
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp. 26.136.544.691 dibanding tahun 2024 sebesar 12.050.795.900 mengalami kenaikan sebesar 24%.

3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif.

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2025 ialah untuk menciptakan sinergitas dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk unggulan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja

Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja- belanja tersebut sebagaimana uraian berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan manfaat;

- c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- d. Belanja Subsidi dalam mendukung pelayanan public;
- e. Belanja Hibah. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selaian itu juga pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- f. Belanja Bantuan Sosia. Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomimasyarakat,bantuansosialdiberikankepadakelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak

dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - iii. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - iv. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer tahun 2025 dirinci atas jenis:

- I. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa;
- II. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas

dalam kerangka kesinambungan implementasi money follow priority program. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam maka postur belanja tahun 2025 pada APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.8 Realisasi dan Proyeksi/target Belanja tahun 2022 s/d 2025
Kabupaten Seram Bagian Timur**

NO	URAIAN	Realisasi APBD TA	Realisasi APBD TA	Target APBD TA	Proyeksi APBD TA	Proyeksi APBD TA
		2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	657.306.998.468	685.622.449.336	674.182.630.352	689.847.065.540	724.339.418.817
5.1.01	Belanja Pegawai	331.164.691.583	307.631.615.174	370.375.437.841	373.161.702.740	391.819.787.877
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.370.795.561	302.616.078.537	250.060.193.527	221.814.155.561	232.904.863.339
5.1.04	Belanja Subsidi	2.969.326.000	2.531.396.000	1.400.000.000	12.467.780.169	13.091.169.177
5.1.05	Belanja Hibah	57.007.713.043	42.371.483.043	42.730.266.043	49.014.808.852	51.465.549.295
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.794.472.281	30.471.876.582	9.616.732.941	33.388.618.218	35.058.049.129
5.2	BELANJA MODAL	181.257.470.879	182.875.680.659	53.881.475.336	213.072.915.637	223.726.561.418
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000	450.000.000	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.321.407.891	43.683.720.196	3.029.486.836	43.747.264.717	45.934.627.953
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.030.265.346	41.704.657.447	10.107.797.200	59.257.916.019	62.220.811.820
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.632.797.642	96.654.303.016	40.744.191.300	109.569.377.338	115.047.846.204
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.000.000	383.000.000	-	498.357.563	523.275.441
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.978.607.273	1.200.000.000	5.000.000.000	5.054.572.605	5.307.301.235
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.978.607.273	1.200.000.000	5.000.000.000	5.054.572.605	5.307.301.235
5.4	BELANJA TRANSFER	211.776.357.268	222.738.090.657	216.670.223.500	266.308.203.779	279.623.613.967
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	211.776.357.268	222.738.090.657	216.670.223.500	266.308.203.779	279.623.613.967
Jumlah Belanja		1.073.319.433.888	1.092.436.220.652	949.734.329.188	1.174.282.757.561	1.232.996.895.438

Total rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.174.282.757.561 dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi; Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 689.847.065.540

- b. Belanja Modal; Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 213.072.915.637
- c. Belanja Tidak Terduga; Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 5.054.572.605.
- d. Belanja Transfer; Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 266.308.203.779

3.5. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2025 kemudian dituangkan dalam Tabel III.9 berikut :

**Tabel III.9 Realisasi dan Target/Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 s/d 2025**

NO	URAIAN	Realisasi APBD TA 2022	Realisasi APBD TA 2023	Target APBD TA 2024	Proyeksi APBD TA 2025	Proyeksi APBD TA 2026
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.846.938.853	103.455.938.704	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	127.846.938.853	103.455.938.704	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	127.846.938.853	103.455.938.704	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.750.000.000	2.445.500.000	2.445.500.000	4.600.000.000	4.600.000.000
	Pembiayaan Netto	123.096.938.853	101.010.438.704	-	-	-



BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan Tema Pembangunan Tahun 2025 yaitu **“Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 yang merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagaimana tabel IV.1.

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025	
MISI 1. MENJALANKAN AGENDA REFORMASI DAN TATA KELOLA BIROKRASI;					
Terwujudnya Aparatur (ASN) yang berintegritas dan berkarakter	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Pembentukan Karakter, Sikap dan Perilaku Midset Apartur Birokrasi (ASN) yang profesional	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	B 2,51-3,25	
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur (ASN)		Perbaikan Mutu dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B >60 – 70	
		Tranpransi, Akuntabel, Partisipatif			
Pembangunan Zona Integritas dan Pelayanan Publik Yang Bersih dari KKN			Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Zona Intergritas Pelayana Publik	IPK dan IRB	AB >60 – 70
MISI 2. MENDORONG PENGUATAN EKONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;					
Pengembangan Daya Saing Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Iklim Investasi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif	Indeks Inovasi Daerah (IID)	5,78	
		Pengelolaan SDA dan Potensi Lokal Daerah secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	34.2	
		Meningkatkan produksi dan produktifitas subsektor	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	75,6	
Pengembangan Sektor dan Potensi Unggulan Daerah,			Keterpenuhan akses masyarakat terhadap komoditi unggulan daerah dan peningkatan ketahan pangan	Skor Pola Pangan Harapan(SPPH)	100
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelembagaan	Pertumbuhan PDRB Indeks Gini Rasio	4,17 0,234
			Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	50,23
			Meningakatkan ketahanan	Wirausahaan	10,57

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat		
MISI 3. MENDORONG PENINGKATAN SDM YANG BERBUDAYA, RELIGIUS, NASIONALIS, KOMPETITIF DAN BERDAYA SAING;				
Meningkatkan Karakter Kehidupan Masyarakat Dan Nilai Nilai Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Masyarakat	Gini Ratio	Mewujudkan Kemandirian Seni Budaya Serta Adat Istiadat Dan Kearifan Lokaal Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	87,6
		Pengembangan Senin Budaya Masyarakat Seram Bagian Timur Dan Nilai Nilai Keagamaan		
		Promosi dan Penggelaran Seni, Budaya, dan Festival Adat		
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	tinggi
		Meningkatan kualtias anak, perempuan dan pemuda		73,90
		Meningkatnya pemertaan layanan pendidikan yang berkualitas		
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta peningktan disiplin dan penegakan protocol kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	87,6
		Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan		
MISI 4. MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAERAH DAN PENGUATAN FISKAL DAERAH;				
Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Meningkatnya kapasitas dan daya dukung lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,3-815
		Meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja	Indeks Kinerja Investasi Daerah (IKID)	50,23

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		Menguatkan perencanaan industir daerah	Pertumbuhan PDRB	4,17
Penguatan dan peningkatan pendapatan daerah	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kinerja Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD	Indeks Gini Rasio	0,234
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat	Presentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Terciptanya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kepastian hukum	Indeks Demokrasi (ID)	100
			Indeks Rasa Aman (IRA)	93
Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan	Presentase Kerja sama	Membangunan SDM yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, inovatif, berkepribadian dan kompetitif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	55,5
		Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia	Wirausahaan	10,57
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,5
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	125
MISI 5. MENINGKATKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH;				
Meningkatkan sarana dan prasana wilayah		Mewujudkan konektifitas antara wilayah	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	38,5
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Memadai		
		Presentase panjang jalan kabupaten dan peningkatan status jalan		
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan fasilitas layanan dasar		
Meningkatkan pelayanan tranportasi antar pulau dan/atau kepulauan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pelayanan Transportasi yang handal,	Tingkat Aksesibilitas	55,5

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
		berdaya saing, dan memberikan nilai tambah		
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung		tinggi
MISI 6. MENDORONG PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT;				
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keterpenuhan layanan sosial masyarakat secara berkeadilan	Presentase Penduduk Miskin	Mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dirumuskan Sustainable Development Goals (SDG's) dan Millennium Development Goals (MDGs) serta revolusi industri 4.0	IPKM	76,25
			AHH	73,7
			Gini Rasio	0,234
			IKLH	77,3-81,5
			IPK dan IRB	>60 – 70
			PDRB	4,17
			IRA	93
			IKID	50,23
			ID	100

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 mengacu dan selaras dengan Tema dan Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema RKP Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan tema tersebut, rancangan awal RKP tahun anggaran 2025 menetapkan lima agenda pembangunan. Mulai dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi.

Tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2025. Hal ini meliputi pertumbuhan ekonomi 5,3-5,8 persen, tingkat kemiskinan 7-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia 0,56, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, indikator nilai tukar petani 113-115, dan nilai tukar nelayan 104-100.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pembangunan pusat dan daerah. Maka dari itu, ditetapkan pula target pertumbuhan beserta kontribusi perekonomian pada masing-masing wilayah.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah ***“Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Tema ini berdasarkan pada Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2025. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif;**
- 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;**
- 3. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk;**
- 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;**
- 5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.**

4.2.3. Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat dari DPRD yang diperoleh dari hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui hasil rapat kerja, kunjungan lapangan, hasil jaring aspirasi masyarakat dan hasil reses anggota DPRD pada Daerah Pemilihan I, II dan III, telah terinventarisasi sejumlah persoalan pembangunan daerah yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran dan direkapitulasi dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel IV.2. Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Pembangunan Jalan Setapak	Kecamatan Pulau Gorom Desa Amar Sikaru Dusun Matlean, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Husean Kelilauw
Pembangunan Jembatan Elniu Kilkoda	Kecamatan Gorom Timur Desa Kilkoda, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Husean Kelilauw
Pembangunan Talud Penahan Ombak,	Kecamatan Pulau Gorom Desa Amar Sikaru Desun Matlean, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Husean Kelilauw
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Seram Bagian Timur, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Kesehatan	Husean Kelilauw
Pengadaan Bantuan Perabot Rumah Tangga	Tersebar Di Daerah Pemilihan 2 (Dapil II), Kab Seram Bagian Timur	Dinas Sosial	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Perahu Fiber	Tersebar Di Dapil 2, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Mesin Katinting untuk Nelayan Pesisir	Tersebar Di Dapil 2, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Mesin Air Galong	Kecamatan Seram Timur , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Sosial	Alexander Patty
Pengadaan Bantuan Mesin Parut Sagu	Tesebar Di Daerah Pemilihan 2, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Alexander Patty
Pembangunan Talud penahan ombak	Kecamatan Seram Timur Desa Geser, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Alexander Patty
Pengadaan bantuan Parabola dan TV untuk masyarakat kurang mampu	Tersebar Di Dapil 2, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Sosial	Alexander Patty
Bantuan Dana Monitoring dan Evaluasi	Tersebar Di 15 Kecamatan, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa,	Husean Kelilauw

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Pengukuran pembugaran bagi tenaga ASN di Puskesmas	Tersebar Di Semua Kecamatan, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Kesehatan	Husean Kelilauw
Pembangunan Tanggul penahan Longsor	Kecamatan Gorom Timur Desa Adm Aran, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rudi Rumodar
Bantuan body fiber 15 Pk paket	Kecamatan Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar
Bantuan Dana hibah pembangunan masjid Al Kuba	Kecamatan Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rudi Rumodar
Bantuan Dana Hibah untuk TPQ	Kecamatan Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rudi Rumodar
Pembangunan Air bersih untuk masyarakat	Kecamatan Gorom Timur Desa Adm Tuha, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rudi Rumodar
Bantuan body bobol untuk Nelayan tangkap	Kecamatan Pulau Gorom, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar
Pengadaan bantuan mesin 40 Pk	Kecamatan Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Rudi Rumodar
Pembangunan Jembatan	Kecamatan Gorom Timur. Desa Kilkoda, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rudi Rumodar
Pengadaan mobile Sekolah Dasar SDN 6	Kecamatan Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	Rudi Rumodar
Bantuan bahan bangunan (Semen, Daun Seng dan Keramik) untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Pulau Panjang, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Z. Noval Rumuar

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Bantuan Sembako untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Meski Watubela, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Sosial	Z. Noval Rumuar
Bantuan Pembangunan rumah ibadah/masjid Salagur Kota	Kecamatan Siri taun Wida Timur Desa Salagur Kota, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Z. Noval Rumuar
Bantuan pembangunan masjid Dada	Kecamatan Pulau Gorom Desa Kataloka Dusun Dada, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Z. Noval Rumuar
Pembangunan Rehabilitasi Sekolah Dasar(SD) Negeri Batuasa	Kecamatan Werinama Desa Batuasa, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	Husein Rumadan
Pembangunan Jalan Usaha Tani Sisin 2	Kecamatan Werinama , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Husein Rumadan
Bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid Nurul Fatah	Kecamatan Werinama Desa Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Husein Rumadan
Dana hibah Pembangunan masjid At-Taqwa	Kecamatan Werinama Desa Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Husein Rumadan
Pembangunan Setapak Jalan baru Werinama	Kecamatan Werinama Desa Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Husein Rumadan
Belanja Pengadaan mesin 40 Pk	Tersebar Di Dapil 1, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Husein Rumadan
Pengadaan Alat Bantu penangkapan ikan	Kecamatan Bula, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Husein Rumadan
Pengadaan Alat bantu pemasaran ikan	Kecamatan Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Husein Rumadan

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Pembangunan pagar Sekolah SD Islam	Kecamatan Bula Desa Wailola, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	Ismail Rumbalifar
Pengadaan bantuan ternak Sapi untuk masyarakat kurang mampu	Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Dan Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Ismail Rumbalifar
Pembangunan Jalan Tani	Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Dan Kecamatan Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Ismail Rumbalifar
Pengadaan Perahu Fiber Ketintang	Kecamatan Bula, Kecamatan Teluk Waru Dan Kecamatan Siwalalat, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Ismail Rumbalifar
Bantuan Dana hibah pembangunan masjid	Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, Kecamatan Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ismail Rumbalifar
Pembangunan pagar masjid	Kecamatan Teluk Waru Desa Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ismail Rumbalifar
Bantuan bibit pertanian	Kecamatan Bula, Kecamatan Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Ismail Rumbalifar
Pembangunan Bahu Jalan	Kecamatan Teluk Waru Desa Waru Desa, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas PUPR	Ismail Rumbalifar
Bantuan Body Fiber dan Mesin 15 Pk	Kecamatan Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Ismail Rumbalifar
Bantuan mesin parut sagu dan mesin parut kelapa	Kecamatan Werinama Desa, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Fadli S Elbetan, S.Sos
Belanja Bantuan pakaian Seragam untuk siswa SD	Tersebar Diseluruh Dapil Satu (1) , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga	Fadli S Elbetan, S.Sos

Kegiatan	Lokasi	OPD Penanggung Jawab	Ket
Belanja bantuan sembako	Tersebar Diseluruh Dapil Satu (1) , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Sosial	Fadli S Elbetan, S.Sos
Pembangunan jalan Setapak	Kecamatan Werinama Desa Werinama Desa, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Fadli S Elbetan, S.Sos
Bantuan dana hibah Majelis Taklim/Pengajian Al-Mumtad Darunaim	Kecamatan Bula, Kab. Seram Bagian Timur	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Fadli S Elbetan, S.Sos
Bantuan material bangunan Masyarakat	Kecamatan Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Fadli S Elbetan, S.Sos
Bantuan kelompok Pertanian	Kecamatan Siwalalat, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Fadli S Elbetan, S.Sos
Belanja bantuan kendaraan roda dua untuk pemasaran hasil hasil Nelayan	Tersebar Diseluruh Dapil Satu (1) , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Fadli S Elbetan, S.Sos
Pengadaan Mesin 15 Pk dan body Fiber	Kecamatan Werinama, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
Pengadaan bantuan mesin 15 Pk	Kecamatan Bula, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
Pengadaan perahu Fiber dan mesin ketinting	Kecamatan Siwalalat, Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perikanan	Wa Muhaya
Bantuan bahan bangunan Semen dan Atap Seng	Tersebar Diseluruh Dapil Satu (1) , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Wa Muhaya
Pengadaan bantuan mesin parut kelapa	Tersebar Diseluruh Dapil Satu (1) , Kab. Seram Bagian Timur	Dinas Pertanian	Wa Muhaya

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tahapan dan tata cara analisis isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2025, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada timbulnya permasalahan pembangunan. Melalui identifikasi yang cermat, teliti dan komprehensif terhadap permasalahan pembangunan, diharapkan ditemukan berbagai isu strategis yang pemecahannya memerlukan langkah pendekatan yang terintegrasi satu dengan yang lain. Mengidentifikasi dan selanjutnya menentukan suatu permasalahan pembangunan akan dapat menjadi isu strategis atau tidak. Isu strategis jika tidak segera mendapat respons, dikhawatirkan akan menjadi kendala dan hambatan dalam pembangunan tahun 2025.

Perumusan isu strategis tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memperhatikan lingkungan strategis internal dan eksternal. Isu strategis tahun 2025 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing;**
- 2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif, Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;**
- 3. Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektivitas Antar Wilayah;**
- 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;**
- 5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat.**

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

adalah ***“Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Tema Pembangunan Tahun 2025 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”*** yang dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yakni : (1) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan, (2) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan, (3) Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan.

Agar pembangunan dapat berjalan terarah dan dapat menjawab kebutuhan daerah, ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPJMD tahun 2021-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif;**
- 2. Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;**
- 3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;**
- 4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan;**
- 5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif;**
- 6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan; dan**
- 7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.**



**Tabel IV.3. Keterkaitan antara Isu Strategis dan prioritas Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing	2. Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan
		5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif
2.	Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, Penguatan UKMK dan Pengembangan Ekonomi Inklusif Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif
		3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
3.	Pengembangan Wilayah dan Penguatan Konektifitas Antar Wilayah	4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan
4.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
5.	Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat	7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel IV.4. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1.	Sumber Daya Manusia Berkualitas	4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan 6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	2. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan 5. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif 6. Tata kelola reformasi birokrasi pemerintahan
2.	Infrastruktur Berkualitas	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	4. Peningkatan Aksesibilitas dan infrastruktur kewilayahan 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3.	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	1. Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata 2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan perluasan lapangan kerja 3. Peningkatan produktivitas, nilai tambah produk dan ketahanan pangan	1. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

C.Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan 2 (dua) komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Informasi penting yang perlu dijelaskan sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi adalah bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan strategi.



Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Melalui parameter tertentu, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya berpikir strategi dalam menjamin, bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan langkah-langkah diatas maka, rumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Sasaran dan Prioritas Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel IV.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan penguatan potensi unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Peningkatan produksi, produktivitas serta mutu produk unggulan daerah	Pengembangan sarana prasarana produksi dan mutu produk unggulan daerah	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian
						Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota
					Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian
						Pembangunan prasarana pertanian
					Pengelolaan perikanan tangkap	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota
						Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
					Pengelolaan perikanan budidaya	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Pengelolaan pembudidaya ikan
					Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata	Meningkatkan sarana prasarana destinasi wisata serta penguatan promosi wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota
					Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata
2	Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya pelayanan dasar yang berkualitas	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan	Pengelolaan pendidikan	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar
						Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				kompetensi guru dan siswa		Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				Pemerataan guru pada wilayah terpencil dan terbelakang	Pembinaan perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
						Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
					Pengelolaan arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
			Melestarikan adat, budaya dan sejarah daerah	Pelestarian seni, budaya dan sejarah daerah	Pengembangan kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
					Pengembangan kesenian tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
					Pembinaan sejarah	Pembinaan sejarah lokal dalam satu daerah kabupaten/kota

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
						Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota
						Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
		Meningkatnya pemahaman dan implementasi ajaran agama	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Peningkatan sarana prasarana serta pembinaan keagamaan	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
		Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas dari tindak kekerasan	Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota
					Perlindungan perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
					Perlindungan khusus anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
						Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
				Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada layanan dasar dan	Peningkatan kualitas kesehatan layanan dasar	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			layanan rujukan	dan rujukan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat	masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
						Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
			Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan SDM kesehatan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota
						Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
			Meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota
						Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kabupaten/kota
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
						Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal
						Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
						Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
3	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan sosial	Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
						Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
					Penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota
						Pengelolaan informasi pasar kerja
						Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota
					Hubungan industrial	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
4	Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkatan prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	Penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
					Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota
						Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Penyiapan regulasi dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	Penyediaan dokumen rencana umum tata ruang wilayah		Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota
				Penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RTR) kabupaten/kota	
					Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota
5	Peningkatan SDM Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif	Meningkatnya SDM berdaya saing, kompeten, adaptif dan inovatif	Pengembangan SDM yang inovatif kreatif serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
6	Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
					Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penataan Organisasi
					Pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Penataan Pendaftaran Penduduk
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
					Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan sipil
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
					Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
						Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Meningkatnya kinerja pemerintahan	Meningkatkan manajemen pemerintah membangun open government dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan status pemerintahan desa	Administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
				Perkuatan, keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal
						Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				partisipasi publik termasuk partisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan	Perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan Pendampingan dan asistensi
					Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kinerja pemerintahan	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib	Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku	Pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
						Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
						Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan
					Pengelolaan Pengelolaan barang pendapatan daerah milik daerah	Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
						Pengelolaan barang milik daerah
			Meningkatkan sistem manajemen akuntabilitas berbasis kinerja instansi pemerintah	Membangun sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyusunan perencanaan dan pendanaan
						Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan
						Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan
						Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah
						Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
						Koordinasi perencanaan bidang perekonomian

No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						dan SDA
						Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
					Penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan
						Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
		Meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan SPIP melalui perencanaan dan penganggaran	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur	Pengembangan sumberdaya manusia	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem air limbah	Penyediaan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan keluarga	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota



No	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
			Pengembangan sistem drainase	Peningkatan sistem drainase perkotaan dan perdesaan	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota
			Peningkatan penanganan persampahan	Optimalisasi pengelolaan dan penyediaan prasarana dan sarana persampahan	Pengelolaan persampahan	Pengelolaan sampah



4.3. Kebijakan Pembangunan

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Konstelasi pusat-pusat kegiatan akan diberikan pada rencana sistem pusat pelayanan, sedangkan rencana jaringan prasarana wilayah akan meliputi sistem prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas :

- a. Rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. Rencana sistem jaringan transportasi laut;
- c. Rencana sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi :

- a. Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan;
- b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Rencana sistem jaringan sumberdaya air;
- d. Rencana sistem jaringan persampahan;
- e. Rencana sistem jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan sarana wilayah.

4.3.1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

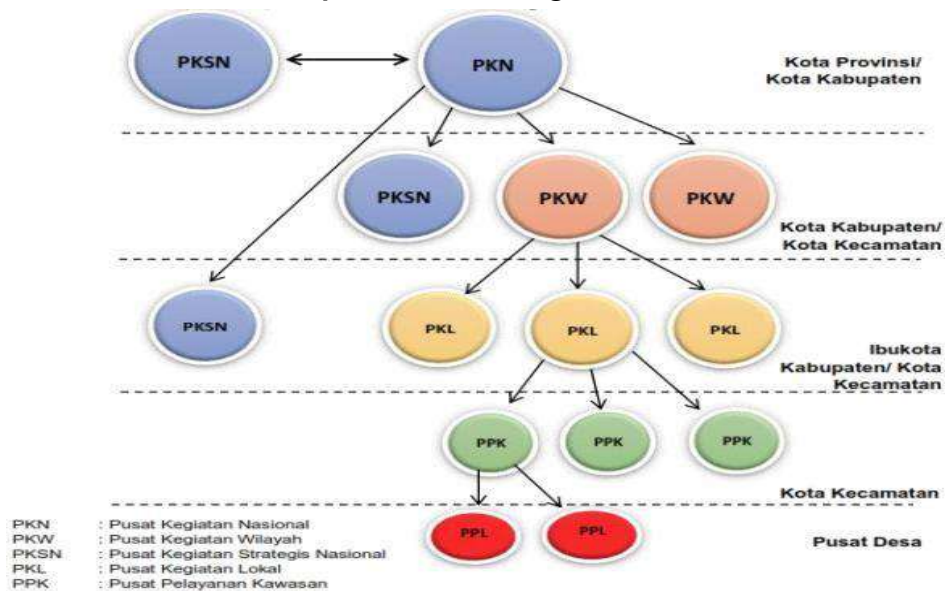
Struktur ruang wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk oleh kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah berdasarkan hirarki, yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan / atau administrasi masyarakat. Struktur ruang wilayah ini bertujuan untuk membentuk ruang sebagai satu kesatuan yang dibentuk oleh unsur-unsur fungsional, dimana satu sama lain mempunyai sifat hubungan timbal balik, dan masing-masing mengembangkan fungsinya sebagai pusat pelayanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Struktur ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada pertimbangan agar didapatkan keterkaitan internal-eksternal yang lebih seimbang, dengan



memperhatikan pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas. Konsep struktur ruang kota untuk Kabupaten Seram Bagian Timur akan terdiri atas PKW, PKL dan PPK dan PPL dijelaskan pada Gambar IV.2.

**Gambar IV.1. Konsep Struktur Ruang Kota
Kabupaten Seram Bagian Timur**



Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah :

1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan / atau ;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) adalah :

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pengembangan jaringan transportasi di Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur dan mendukung struktur perkotaan yang direncanakan. Sistem transportasi yang direncanakan adalah sistem transportasi terintegrasi baik transportasi darat, laut maupun udara dengan pengembangan beberapa pintu gerbang (*multi gate system*).

Pengembangan jaringan prasarana wilayah seperti listrik, air, dan prasarana pengelolaan lingkungan disesuaikan dengan perkembangan penduduk dan struktur kota.

A. Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan dimaksudkan sebagai kebijakan pembangunan agar tingkat pelayanan wilayah lebih efektif dan efisien, baik pelayanan pemerintahan, pelayanan fasilitas kehidupan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah. Sejalan dengan program-program pengembangan/ pembangunan yang telah direncanakan, serta untuk memperpendek rentang pelayanan pemerintah, baik dalam pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pelayanan fasilitas kehidupan.

Pusat-pusat wilayah yang ditunjuk akan menjadi tempat konsentrasi fasilitas pelayanan umum sesuai kebutuhan wilayah belakangnya dan kecamatan-kecamatan yang dibawahinya.

Berdasarkan kondisi wilayah kabupaten seram bagian Timur, Wilayah pengembangan (WP) dibagi menjadi 6 (Enam) yaitu :

1. Wilayah Pengembangan – I, dengan pusat pengembangan di Kota Bula (Kecamatan Bula). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP I meliputi pemerintahan, perkotaan, permukiman, pertanian, peternakan,



- perdagangan, pariwisata, dan pertambangan.
2. Wilayah Pengembangan – II, dengan pusat pengembangan di Kota Werinama (Kecamatan Werinama). Kegiatan yang akan dikembangkan di WP II adalah perkotaan, pemerintahan kecamatan, permukiman, perdagangan, perkebunan, peternakan dan pariwisata.
 3. Wilayah Pengembangan – III, dengan pusat pengembangan di Kota Geser (Kecamatan Seram Timur). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini meliputi pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa dan pariwisata.
 4. Wilayah Pengembangan – IV, dengan pusat pengembangan di Kota Kata loka (Kecamatan P. Gorom). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan perdagangan dan jasa dan pariwisata.
 5. Wilayah Pengembangan – V, dengan pusat pengembangan di Kota Waras-Waras (Kecamatan TutukTolu) Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata.
 6. Wilayah Pengembangan – VI, dengan pusat pengembangan di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela). Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini adalah pemerintahan kecamatan, perkebunan, perikanan, perdagangan & jasa dan pariwisata.

Selain pertimbangan dalam menentukan Wilayah Pengembangan diatas, juga keselarasannya dengan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan yang berlaku di wilayah Seram Bagian Timur. Program - program pembangunan demi kemudahan pengelolaan pelaksanaannya melibatkan proses pelimpahan kewenangan kepada perangkat pemerintah kecamatan. Oleh karena itu pembagian WP sesuai batas-batas kecamatan di wilayah ini diharapkan dapat memudahkan pengukuran pencapaian target-target pembangunan yang direncanakan dalam RTRW kabupaten. Petarencana wilayah pengembangan di

Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilihat pada Gambar IV.3.

**Gambar IV.2. Peta Rencana Wilayah Pengembangan
Kabupaten Seram Bagian Timur**



B. Sistem Perkotaan

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Kabupaten dan berdasarkan hasil analisis dan kecenderungan perkembangan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, sistem hierarki pusat-pusat pertumbuhan atau hirarki perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur akan dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kabupaten, yaitu :

1. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dalam hal ini merupakan kota yang termasuk kedalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (sebagai simpul kedua kegiatan ekspor – impor yang mendukung PKN), berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Untuk Kabupaten Seram Bagian Timur PKW terdapat di Kota Bula dan Kota Werinama;
2. Kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan



kota yang termasuk ke dalam hirarki pusat pelayanan di RTRW Provinsi. Kota ini merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan, merupakan pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan RTRW Provinsi PKL untuk Kabupaten Seram Bagian Timur ditentukan di Dataran Hunimua, Kota Geser dan Kota Kataloka;

Dataran Hunimua adalah ibukota kabupaten definitif yang saat ini berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang akan dipromosikan menjadi *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)*.

3. Kota atau wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK yang ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah di Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-Waras (Kecamatan Tutuk Tolu).
4. Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya. PPL ditetapkan di Kabupaten Seram bagian Timur adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama, Banggoi R, Waru, Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Utta, Lahema dan Teor.

Sistem pusat-pusat permukiman tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang yang ada, karena permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan pada sistem pusat-pusat permukiman.

Pusat kota-kota dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan kota tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya, baik sebagai pusat kegiatan dalam wilayah kota

itu sendiri maupun secara regional atau wilayah kota di sekitarnya.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan kota yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar dan pengembangan wilayah secara umum. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan kota diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten
2. Pusat Pemerintahan Kecamatan
3. Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
4. Pusat Perhubungan dan Komunikasi
5. Pusat Produksi Pengolahan
6. Pusat Pelayanan sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain)

Kelengkapan prasarana dan sarana yang terdapat pada masing-masing kecamatan akan menjadikan kecamatan tersebut sebagai pusat dari wilayah belakangnya. Dipihak lain terdapat pengelompokkan kecamatan yang membentuk fungsi kecamatan berdasarkan lingkup pelayanan administrasi pemerintahan (Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan).

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan masing-masing hierarki pusat pelayanan dan skala pelayanan yang direncanakan dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, maka perlu arahan fungsi untuk masing-masing kota yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2028) dapat dilihat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6.
Rencana Hirarki Pusat Pelayanan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Hierarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
		Fungsi	Kewenangan						
PKW	Bula	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKW	Werinama	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKL	Dataran Hunimua	Regional	Kabupaten	x	x	x	x	x	x
PKL	Geser	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x
PKL	Kataloka	Regional	Kabupaten		x	x	x	x	x

Hierarki Perkotaan	Pusat Permukiman	Skala Pelayanan		A	B	C	D	E	F
		Fungsi	Kewenangan						
PPK	Tamher Timur	Kabupaten	Kecamatan		X	X	X	X	X
PPK	Waras - Waras	Kabupaten	Kecamatan		X	X	X	X	X
PPL	Atiahu	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Batuasa	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kilmuri	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Urung	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kwaos	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Salagor	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Kian	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Danama	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Banggoi R	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Waru	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Amarsekaru	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Miran	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	P.Panjang	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Utta	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Lahema	Kecamatan	Desa			X	X	X	X
PPL	Teor	Kecamatan	Desa			X	X	X	X

Keterangan:

A : Pusat Pemerintahan Kabupaten

B : Pusa Pemerintahan Kecamatan

C : Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran

D : Pusat Perhubungan dan Komunikasi

E : PusatProduksiPengolahan

F : Pusat Pelayanan Sosial (kesehatan, pendidikan dan lain-lain)

Untuk mendukung wilayah tersebut diatas sesuai dengan hierarki kotanya masing-masing seperti:

1. Pusat Perdagangan, jasa dan pemasaranya itu direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti pasar, warung, toko dan bank disetiap wilayah hierarki perkotaan.
2. Pusat Pelayanan Sosial, yaitu :
 - (1) Kesehatan, direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik setiap wilayah hierarki perkotaan. Khusus untuk rumah sakit umum yang semula hanya ada di Kota Bula (Kecamatan Bula), akan dikembangkan di Kota Kataloka (Kecamatan P. Gorom).
 - (2) Pendidikan, direncanakan pembangunan dan atau penambahan fasilitas seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah



keberadaan daerah yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka pengembangan perkotaan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu:

- (1) Pusat Permukiman
- (2) Pusat Perkotaan
- (3) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
- (4) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
- (5) Pusat Produksi Pengolahan
- (6) Pusat Pelayanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan Lain-lain).

Kawasan perkotaan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah wilayah-wilayah yang dimungkinkan untuk berkembang menjadi kota yang dapat menopang seluruh aktivitas yang berhirarki sebagai fungsi pelayanan. Rencana sistem perkotaan berada pada hirarki pusat pelayanan, yaitu :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terdapat pada Kecamatan Bula dan Werinama
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat pada Kecamatan Seram Timur (Geser), Kecamatan Gorom (Kataloka) dan Dataran Hunimua yang akan dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten Definitif.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat pada Kota Tamher Timur (Kecamatan Kesui Watubela) dan Kota Waras-waras (Kecamatan Tutuk Tolu).

D. Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Pengelolaan kawasan perkotaan dalam konteks pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengacu kepada Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, yang menetapkan Pusat-pusat Kegiatan Utama dan Pusat-pusat Pengembangan Wilayah. Pusat-pusat yang



direncanakan merupakan pusat kegiatan atau pusat pelayanan yang nantinya akan memiliki fungsi sebagai kota yang menjadi orientasi perkembangan bagi kawasan disekitarnya. Pengelolaan kawasan perkotaan di Kabupaten Seram Bagian Timur dalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kawasan perkotaan yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan perdagangan, jasa dan industri serta kegiatan sosial ekonomi-budaya lainnya.
- b. Mendorong pihak swasta untuk menanamkan investasinya dalam pengembangan kawasan perkotaan.
- c. Menyusun Rencana Detai Tata Ruang Kawasan dan Rencana Induk Sistem Prasarana agar pengembangan kawasan perkotaan dalam jangka panjang memiliki arah yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya.
- d. Mengembangkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan kawasan lainnya untuk menciptakan sinergi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekitarnya.
- e. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensi sosial-ekonomi dan prospek pengembangan kawasan perkotaan dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.
- f. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perkotaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas terkait) untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

E. Rencana Sistem Kawasan Perdesaan

Sistem Perdesaan tidak bisa dilepaskan dari struktur ruang perkotaan yang ada. Fungsi perdesaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur akan diarahkan sesuai kemampuan desa tersebut dalam mendukung fungsi yang diembannya yaitu sebagai pusat kegiatan dalam wilayah perdesaan itu sendiri.

Penetapan fungsi-fungsi kota tersebut berdasarkan pertimbangan keberadaan desa yang sangat mendukung pengembangan kawasan sekitar. Sesuai dengan fungsinya dalam lingkup wilayah kabupaten seram Bagian Timur, maka pengembangan perdesaan diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan, yaitu:

- (1) Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran
- (2) Pusat Perhubungan dan Komunikasi
- (3) Pusat Produksi Pengolahan
- (4) Pusat Layanan Sosial (Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain)

Adapun wilayah perdesaan yang termasuk di dalam kriteria tersebut adalah Wilayah yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan lingkungan (PPL) yang merupakan Pusat Desa yang skala pelayanannya melayani desa disekitarnya kriteria pusat lingkungan adalah Atiahu, Batuasa, Kilmuri, Urung, Kwaos, Selagor, Kian, Danama, Banggoi R, Waru , Amarsekaru, Miran, Pulau Panjang, Uta, Lahema dan Teor.

Pada Wilayah Pulau Kesui (Kecamatan Kesui Watubela) akan dijadikan sebagai sentral produksi perikanan dengan cluster pengembangan **minapolitan** yang peruntukannya untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan penghasil rumput laut dan Tamher Timur dijadikan Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

F. Rencana Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Dalam UU No. 32 tahun 2004, dinyatakan bahwa pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas



wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pengelolaan kawasan perdesaan adalah:

- a. Untuk mengembangkan kawasan perdesaan yang dapat mendukung kesatuan sistem dan keterkaitan fungsional antara kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan kawasan lainnya.
- b. Untuk menciptakan keserasian perkembangan kegiatan pertanian dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya.
- c. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan keaneka ragaman hayati.
- d. Agar sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e. Untuk mendorong terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, sehat dan aman.

Pengelolaan kawasan perdesaan diwujudkan dalam bentuk:

1. Pengembangan ekonomi perdesaan
2. Penyempurnaan prasarana dan sarana dasar
3. Mengembangkan keterkaitan desa-kota
4. Peningkatan aksesibilitas ke/dari kawasan perdesaan.
5. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggung-jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan perdesaan dengan memperhatikan kondisi, karakteristik dan potensisosial-ekonomi dan sosial-budaya setempat.
6. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan kawasan perdesaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (dinas atau instansi terkait) secara bersama-sama dengan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa untuk menjaga kelestarian

lingkungan, keberlangsungan pembangunan dan tata nilai setempat.

4.3.2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. alam dan sumber daya buatan. Pola ruang kabupaten merupakan gambaran distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

A. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya buatan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
3. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempa dan pantai, sempa dan sungai, kawasan sekitar danau / waduk, dan kawasan sekitar mata air;
4. Kawasan suaka alam dan cagar alam, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, serta



- kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
5. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan
 6. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

B. Rencana Hutan Lindung

Secara umum kawasan hutan lindung di Kabupaten Seram Bagian Timur direncanakan seluas 96.878,54, Hadengan rincian untuk wilayah Kecamatan Bula dengan luas 36.791,13Ha, Kecamatan Werinama dengan luas 37.723,43Ha, Kecamatan Seram Timur dengan luas 16.196,22 Ha, Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas 246,86 Ha, Kecamatan Pulau-Pulau Gorom dengan luas 4.208,20Ha, dan Kecamatan Kesui Watubela dengan luas 1.712,70,Ha dari luas hutan secara keselurahn. Kawasan Hutan Lindung ini meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.

C. Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air yang berada pada seluruh wilayah hutan yang tersebar diseluruh kecamatan.

D. Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

1. Kawasan Sempa dan Pantai

Kasawan Lindung Sempa dan Pantai Meliputi :

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratur) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik



pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2. Kawasan Sempadan dan Sungai

Kawasan lindung sempadan dan sungai, meliputi:

- Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai ; dan
- Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Hal ini penting ditetapkan untuk memperkecil tekanan terhadap kawasan-kawasan sumber air dan sedimen. Perlindungan sempadan dan sungai merupakan upaya untuk menekan proses sedimentasi yang akan terjadi diperairan pesisir.

3. Kawasan Lindung Spiritual

Kawasan Rencana Kawasan Lindung spiritual di Kabupaten Seram Bagian Timur berada di Desa Bati Kecamatan Kian Darat.

4. Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan Lindung kearifan lokal yaitu "Sasi" yang di berlakukan diseluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Gambar IV.4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seram Bagian Timur



Gambar IV.5. Peta Kawasan Lindung Kabupaten Seram Bagian Timur



E. Rencana Kawasan Cagar Alam dan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan hutan mangrove yang terdistribusi di Kecamatan Goromter dapat di Pulau Desa Kataloka, Pulau Panjang, dan



- Danau Sole dengan luas kurang lebih 29.347 Ha;
2. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Seram Timur terdistribusi di Kuamor, Desa Airnanang dan Pulau Keffing dengan luas kurang lebih 7.650 Ha;
 3. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Bula terdistribusi di Desa Bula dan dusun di sekitarnya, Desa Englas dan di Pulau Parang dengan luas kurang lebih 32.492 Ha;
 4. Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Werinama terdapat di Desa Bemo dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 5.719 Ha.
 5. Suaka alam laut di Karang Bais, Pulau Kon dan Pulau Garogos.
 6. Habitat lebah madu yang berada di desa werinama – kecamatan Werinama

Sedangkan kawasan cagar alam meliputi :

- a. Kawasan terumbu karang disepanjang perairan pulau-pulau kecil di Kepulauan Watubela, P. Gorom, Pulau Geser, Pulau Panjang, Pulau Parang dan Pulau Karang Bais.
- b. Kawasan konservasi populasi rusa yang berada pada Desa Atiahu Kecamatan Werinama;
- c. Kawasan Taman Buru pengembangbiakan satwa Rusa yang berada pada Dusun Nif–Desa Dawang Kecamatan Bula
- d. Kawasan Pulau akat yang terdapat populasi Burung Kenari.

F. Kawasan Rawan Bencana Alam

Rencana zonasi menurut UU No. 27 Tahun 2007 adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Pada kawasan zona rawan bencana, pola pengelolaan kawasan dilakukan melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana untuk melindungi manusia dari



bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Tujuan dari pengaturan kegiatan manusia adalah awasan rawan bencana adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan kriteria dan data terkait (Laporan Data dan Analisa), maka diperoleh gambaran wilayah-wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki resiko multi bencana. Resiko multi bencana yang dimaksud adalah resiko bencana gempa, tsunami, banjir dan longsor. Kawasan yang memiliki risiko paling tinggi terdapat di pulau geser.

Hasil identifikasi kawasan-kawasan rawan bencana menunjukkan bahwa ada beberapa potensi rawan bencana yang perlu ditangani secara serius, antara lain : abrasi, kecelakaan laut, banjir, erosi dan sedimentasi. Beberapa lokasi yang teridentifikasi merupakan daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten seram Bagian Timur antara lain :

1. Di muara DAS Masiwang dan Waibobot berpotensi untuk terjadinya banjir yang mengakibatkan sedimentasi di wilayah sekitarnya.
2. Daerah rawan gempa tektonik adalah di Bula, Waru, Masiwang dan kawasan sebelah utara pulau-pulau kecil di Kecamatan Seram Timur yakni Pulau Geser, Gorom, Manawoka dan Madorang.
3. Di bagian selatan yakni di Undur, Kilmuri, Batuasa serta Banda dan sekitarnya yang merupakan daerah batas lempeng tektonik adalah daerah rawan tektonik berskala besar berpeluang terjadi tsunami.
4. Daerah sekitar Pulau Igar, Pulau Kon, Pulau Panjang dan antara Pulau Geser dan Pulau Keffing yang terimbas oleh ruseddies.
5. Daerah muara sungai Masiwang dan Salas berpotensi untuk



terjadinya bencana pelayaran karena adanya "saaru".

6. Daerah rawan abrasi pantai berada di daerah Kepulauan Gorom, Watubela dan Werinama Arah-an dalam

pengelolaan kawasan rawan bencana antara lain :

1. Sosialisasi Kawasan-kawasan rawan bencana kepada publik;
2. Membatasi arah pengembangan pemukiman dan pengembangan fasilitas publik pada kawasan tersebut;
3. Apabila kegiatan pembangunan fisik akan dilakukan pada kawasan ini, sedini mungkin dilakukan peringatan untuk melakukan pembangunan fisik yang memberikan tekanan pada tahap konstruksi;
4. Vitalisasi kelembagaan pemantau dan pengawas dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

G. Rencana Kawasan Lindung Geologi

Rencana kawasan lindung geologi di kawasan sekitar mata air yang tersebar diseluruh mata air di Kabupaten Seram Bagian Timur.

H. Rencana Kawasan Lindung Lainnya

Rencana kawasan lindung lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi :

1. Kawasan Pulau Karau Karang bais, Sebagai Taman Bawah Laut.
2. Kawasan Pulau Kon dan Pulau Garogos, sebagai tempat pelestarian sumber makanan ikan dan taman bawah laut.
3. Kawasan Pulau Akat, sebagai taman bawah laut.
4. Kawasan Pulau Igar, sebagai taman bawah laut.
5. Kawasan Pulau Kurkof sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.
6. Kawasan Pulau Baam sebagai kawasan potensi ikan dan taman bawah laut.

I. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan kegiatan budidaya dilakukan diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pengembangan kawasan budidaya ini dilakukan untuk saling mendukung pengembangan kawasan lindung guna menjaga kelangsungan pengembangan kawasan budidaya. Selain itu rencana pengembangan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan fungsi, sinergi potensi, daya dukung, keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut, dengan strategi pengembangan diantaranya:

1. Menciptakan peluang dan pemerataan pengembangan ekonomi bagi setiap jenis dan golongan usaha, serta mencadangkan bagian bagian tertentu dari kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut untuk kepentingan pelayanan umum;
2. Program pembangunan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah.
3. Meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan kota.

Berikut adalah potensi kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur :

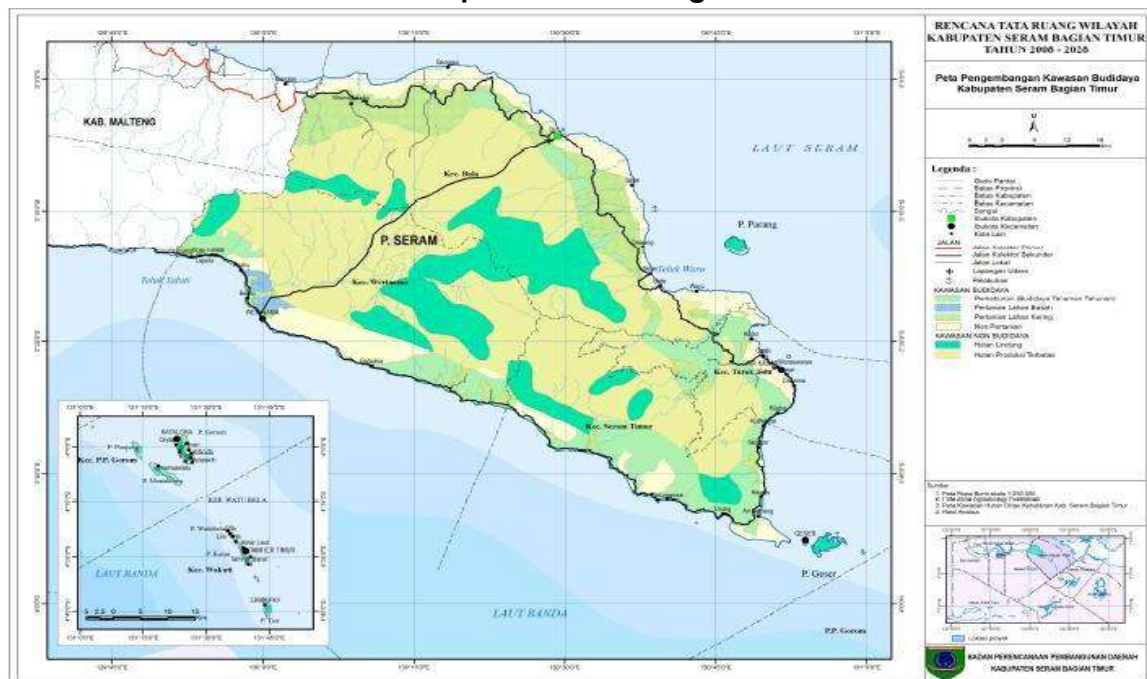
Table IV.7. Potensi Kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
Madu	WP. I	Kec. Werinama	Werinama, Tum, Gusalaut, Osong, Batuasa, Bemo
	WP. II	Kec. Siwalalat	Atiahu, Tunsai, Polin
	WP. III	Kec. Seram Timur	Urung



Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
	WP. IV	Kec. Kilmuri	kilmuri
Gaharu	WP. I	Kec. Werinama	Tersebar di seluruh wilayah hutan werinama
	WP. II	Kec. Seram Timur dan Kec. Kian Darat	Kilmuri, urung, kwaos, kian laut, kian darat
	WP. III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote, banggoi, bula, salas, dawang, belis, waru
	WP. IV	Kec. Tutuk Tolu	Danama, kilbat, sesar, gah (kufar)
	(Dataran Pulau Seram)		
Rotan	WP. I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo, Atiahu, Tunsai, Polin, Elnusa, Lilyama, Hatumeten, Batuasa, Tobo, Osong, Gusalaut Tum
	WP. II	Kec. Seram Timur dan Kec. Kilmuri	Kilmuri, urung
	WP. III	Kec. Bula, Kec. Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Hote, banggoi, salas, dawang, solan, belis, waru
	WP. IV	Kec. Tutuk Tolu	Gah (Kufar), Waras-Waras
	(Dataran Pulau Seram)		
Damar	WP. I	Kec. Werinama	Osong, Tum, Bemo, Werinama (balakeu)
	WP. II	Kec. Bula Barat	Jakarta baru
Karet	WP. I	Kec. Werinama	Bemo/Werinama

Gambar IV.6. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Timur



J. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi, yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi konversi;

1. Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang sesuai dengan kriteria kawasan penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai fungsinya dan eksploitasinya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih.

2. Hutan Produksi Tetap

Merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Hutan Produksi Konversi

Merupakan hutan yang dapat di konversi menjadi kawasan lain seperti kawasan yang diarahkan sebagai kawasan budidaya lainnya yang mempunyai prospek lebih menguntungkan dengan sistem tebang habis tetapi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Luasan kawasan hutan produksi terbatas, tetap dan konversi diuraikan pada Tabel IV.5 berikut.

**Tabel IV.8.
Luasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Kecamatan	LUAS LAHAN (Ha)		
	HP Terbatas	HP Tetap	HP Konversi
Bula	105.391,53	35.599,87	51.517,19
Werinama	96.014,08	1.411,22	29.789,67
Seram Timur	48.447,88	6.543,84	37.616,42
P.Gorom	20.555,32	-	9.061,01
Tutuk Tolu	-	3.225,65	20.401,48
Kesui Watubela	-	-	-

Total	270.408,82	46.780,58	148.385.77

Status lahan yang masuk pada hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) akan di alih fungsikan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena kawasan tersebut sudah dibangun kawasan pemukiman dan infrastruktur lainnya.

Berikut ini usulan alih fungsi hutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain :

Tabel IV.9.
Usulan Alih Fungsi Hutan Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
Desa Hote – Desa Jakarta Baru	HP	1. Pada lokasi sekitar DAS Bobi dan sepanjang pesisir pantai Desa Hote-Banggoi telah didiami oleh pemukiman penduduk lokal 2. Pemukiman transmigrasi UPT.T, UPT.Y, UPT.Z 3. Terdapat areal sawah di Desa Jakarta Baru dan di Desa Waiketam Baru	APL	1. Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah 2. Perkebunan : Telah memperoleh Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemukiman Lokal dan Transmigrasi	13,00
Desa Banggoi – Desa Waimatakabo	HPK	1. Terdapat pemukiman Penduduk Lokal : Desa Banggoi dan Desa Waimatakabo 2. Pemukiman Transmigrasi UPT.R, UPT 12, UPT DT, Waimatakabo, UPT D6. 3. Terdapat areal sawah di Desa Waimatakabo dan Desa Akibobo	APL	Pertanian : Rencana Pengembangan Sawah Perkebunan : Termasuk dalam ijin lokasi Perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Banggoi Internasional Argo	7.745
Desa Bula – Dusun Englas	HPK	1. Lokasi Pemukiman Penduduk 2. Merupakan Areal Wisata Pantai 3. Areal untuk Pinjam Pakai Kawasan		Pemukiman Lokal, Pengembangan Wisata Pantai dan Lokasi Pengembangan Industri	1.041



Lokasi	Status Kawasan	Kondisi Eksisting	Usulan Perubahan Status/Fungsi	Tujuan Peruntukan Lahan	Luas Lahan (Ha)
		Pertambangan a.n. PT. Kuppec			
Desa Nif – Desa Dawang	HP/HPK	Lokasi Pemukiman Penduduk		Areal Pelestarian Rusadan tanaman Wisata Baru	800
Desa Solan	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	366
Desa Belis		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Perkebunan dan Pemukiman	387
Desa Waru		Areal Pemukiman Penduduk	HPK	Perkebunan dan Pemukiman	1.573
Desa Gaa		Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemabangunan Kawasan Bandara SBT	445
Desa Gaa Kec. Tutuk Tolu	HPK	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber ProducersII	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	6.02
	HPT	Areal IUPHHK PT. Mangole Timber ProducersII	APL	Pembangunan Ibu Kota Kabupaten SBT	2.09
Desa Salagor /KianLaut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan Marmer	1.622
Desa Kian Laut	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
Dusun Air Nanang	HP	Areal Hutan Mangrove	Kawasan Konsevasi	Pelesatarian Hutan dan Ekosistem Mangrove	500
Desa Urung	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	1.635
Desa Kilmuri	HP	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	2.846
Dusun Tum /GusaLaut	HP	Areal Pemukiman Penduduk dan IUPHHK PT. Pribumi Sakti daya	APL	Pemukiman, Perkebunan kelapa sawit dan Pengembangan Transmigrasi	
Desa Werinama	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Pertambangan	2.500
Desa Werinama	HPK/HPT	Areal Pemukiman Dan Habitat Lebah Madu alam	Kawasan Konsevasi	Pelesatarian Habitat Lebah Madu	2.000
Desa Bemo	HPK	Areal Pemukiman Penduduk	APL	Pemukiman dan Perkebunan	
DAS Bobot	HPK/HPT	Areal Das Bobot dan Wilayah Pekan Rusa	Kawasan Konsevasi	Areal Pelestarian Rusa dan Areal Taman Wisata Baru	



K. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur meliputi:

1. Kecamatan Bula : Dusun Sesar dan Wailola, Dusun Nif,
2. Kecamatan Teluk Waru: Desa Belis, Desa Waru
3. Kecamatan Bula Barat Desa Banggoi.
4. Kecamatan Seram Timur : Desa Guli-guli, Desa Undur
5. Kecamatan Kilmuri: Desa Kilmury.
6. Kecamatan Kian Darat : Desa Selagor,DusunAruan,DesaKian.
7. Kecamatan Gorom Timur : Desa Miran, Desa Amarwatu, Desa Amar dan Desa Nama.
8. Kecamatan Werinama : Desa Batuasa, Desa Bemo.
9. Kecamatan Siwalalat : Desa Atiahu
10. Kecamatan Tutuk Tolu : Dusun Kufar, Desa Gah, Desa Danama dan Desa Kilga
11. Kecamatan Kesui Watubela : Desa Ilii dan Desa Amarlaut

L. Kawasan Peruntukan Pertanian

Keberadaan kegiatan pertanian ini diarahkan pengembangannya terutama pada wilayah yang mempunyai jenis tanah dengan tingkat kesuburan tinggi serta sebagian besar penduduknya mempunyai budaya bertani. Alokasi pengembangan kegiatan ini diantaranya direncanakan di:

1. Kecamatan Bula dengan komoditas utama tanaman padi;
2. Kecamatan Seram Timur dan Werinama dengan komoditas utama jagung, ketela dan umbi-umbian.

Produk-produk pertanian tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur juga dapat dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku pengolahan agro industri yang bisa dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kegiatan pertanian ini perlu ditingkatkan produksinya bahkan bila memungkinkan produksinya dapat mensuplai kebutuhan ekspor.



Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kawasan budidaya pertanian, maka pengelolaan pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini tidak hanya ditujukan kepada peningkatan produksi tanaman semata, tetapi juga kepada usaha-usaha untuk mempertahankan sumberdaya lahan selama mungkin.

Tabel IV.10. Luas Lahan Kawasan Pertanian

Kecamatan	Luasan (Ha)		Presentase	
	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Basah	Pertanian Lahan Kering
Bula	-	1.797	-	0,76
Werinama	44	1.210	0,01	0,63
Seram Timur	-	273	-	0,28
P. Gorom	-	91	-	0,67
Tutuk Tolu	-	696	-	1,64
Wakate	-	1.110	-	18,25
Total	44	5.176	0,01	0,88

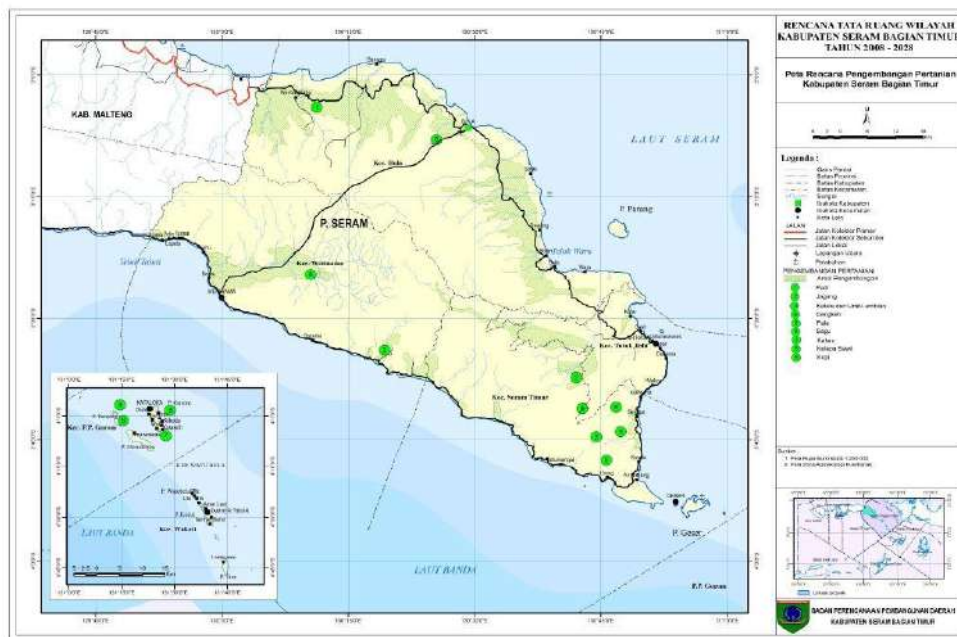
Sedangkan untuk potensi pertanian menyebar di Kecamatan Bula dan Kecamatan Werinama :

1. Waimatakabo
2. Waisamet
3. Akebobo D6
4. Waiketam Baru
5. JakartaBaru
6. Sumber Agung
7. Jembatan Basah
8. Waikudal/Batuasah
9. Kec. Werinama

Sedangkan untuk hortikultura dialokasikan lahan yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan, yang meliputi :

- a. Kecamatan Bula dengan luas kurang lebih 1.525 Ha;
- b. Kecamatan Werinama dengan luas kurang lebih 750 Ha;
- c. Kecamatan Tutuk Tolu dengan luas kurang lebih 250 Ha.

Gambar IV.7. Peta Rencana Kawasan Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur



M. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan dengan jenis komoditi utama berupa aneka buah-buahan dan hasil perkebunan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang baik. Agar jenis tanaman ini mempunyai nilai ekonomis tinggi perlu dilakukan upaya penguasaan teknologi pertanian dan perkebunan, baik melalui pelatihan, bimbingan atau studi banding. Untuk itu diperlukan peranaktif Pemerintah Kabupaten terutama dalam membangun BLK-BLK di sentra – sentra kegiatan pertanian yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi para petani guna meningkatkan kemampuan untuk menguasai teknologi pertanian dan perkebunan.

Pengembangan kawasan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur di alokasikan di Kecamatan Seram Timur (Cengkeh dan Kopi), Bula (kelapa) dan Pulau Gorom (Cengkeh, Kelapa, Pala) serta di lokasi lain yang potensial untuk dikembangkan kegiatan perkebunan. Produk-produk perkebunan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan penduduk juga dipasarkan di Ambon dan



Surabaya.

Pada saat ini kawasan perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Timur baru memproduksi bahan mentah atau bahan baku, dan kedepan diharapkan akan dapat dinaikkan nilai tambahnya menjadi produk olahan yang mampu menyerap tenaga kerja dan pengembangan industri olahan hasil perkebunan. Namun demikian didalam upaya pengembangannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya masukan teknologi (berupa pengetahuan, alat dan metoda) untuk menyediakan lahan perkebunan siap tanam.
2. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal jenis dan kualitas bibit yang akan ditanam.
3. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan tanaman (berupa pemupukan dan penggunaan obat - obatan tanaman).
4. Adanya masukan teknologi secara kontinyu dalam hal perawatan lahan perkebunan, sehubungan dengan teridentifikasikannya sebagian wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai kawasan yang rawan longsor dan rawan gempa.
5. Penggunaan jenis dan kuantitas pupuk dan obatan-obatan tanaman yang ramah lingkungan, untuk mencegah pencemaran terhadap air tanah dan air permukaan / sungai.
6. Adanya masukan teknologi pasca panen secara kontinyu.

**Tabel IV.11.
Luas Lahan Perkebunan**

KECAMATAN	LUASAN LAHAN (Ha)	%
Bula	96.931	30,44
Werinama	119.047	37,39
Seram Timur	1.908	0,59
P.Gorom	70.286	22,07
Tutuk Tolu	29.762	9,35
Wakate	477	0,15
Total	318.411	100

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi Perkebunan dengan komoditas unggulan adalah Pala, Cengkeh, Coklat dan Kelapa, tetapi yang menjadi komoditas unggulan Primer adalah Pala dengan penyebaran lokasi terbesar berada pada kecamatan P.Gorom dan Kesui Watu bela. Berikut ini tabel wilayah sebaran komoditas unggulan (Tabel 4.12)

Tabel IV.12. Wilayah Komoditas

No	Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
1	Pala	WP.I	Kec. Pulau Gorom, Gorom Timur dan Pulau Panjang	Kataloka, Ondor, Day, Mida, Amarwatu, Kota Sirih, Kilkoda, Miran, Rarat, Amarsekaru, Pulau Panjang
		WP.II	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Tamher Warat, Kelangan, Teor
		WP.III	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Polin, Tunsai, Lapela, Hatumeten
		WP.IV	Kec.TutukTolu	Danama, Kilbat, Kilmoy,Sesar, Air Kasar
2	Cengkeh	WP.I	Kec. Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Atiahu, Tunsai Polin Batuasa, Tobo
		WP.II	Kec. TutukTolu	Danam, Kilbat, Kilmoy, Sesar, Air Kasar,
		WP.III	Kec. Kesui Watubela dan Kec. Teor	Utta, Amar laut, kelangan, Tamher Timur, Tamher Warat, Teor (Kilwouw)
		WP.IV	Kec. P. Gorom dan Gorom Timur	Ondor, Kataloka, Amar sekaru, Mida, Day, Amarwatu, Miran, Rarat
3	Coklat	WP.I	Kec. TutukTolu	Gah, Waras - waras
		WP.II	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Atiahu, Werinama, Bemo, Batuasa, Tum, Osong, Elnusa, Abuleta,



No	Jenis Komoditi	Wilayah Pengembangan (WP)		Wilayah Sebaran Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan
4	Kelapa			Lapela, Lilyama, Dihil.
		WP.III	Kec. Bula, Kec.Bula Barat, Kec. Teluk Waru	Waru, Salas, Dawang, Hote, Banggoi
		WP.I	Kec.Werinama dan Kec. Siwalalat	Werinama, Bemo, Atiahu, Elnusa, Lapela, Dihil, Lilyama
		WP.II	Kec.TutukTolu	Waras-waras,Gah
		WP.III	Kec. Kesui Watubela, Kec.Pulau Gorom Kec, Pulau Panjang, dan Kec.Teor	Teor (Rumui, Rumalusi, Kilwouw, Kerkar, Wermaf Lapang), Kesui (Tamher Warat, Tamher Timur, Uтта)
		WP.IV	Kec. Bula, kec. Bula Barat dan Kec.Teluk Waru.	Hote Banggoi, Salas, dawang, Belis, Waru, Karai

N. Kawasan Peruntukan Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kawasan yang baik bagi kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan laut melalui kegiatan penangkapan ikan di wilayah mereka, baik di wilayah Pulau-Pulau Gorom, Seram Timur, Bula maupun Werinama. Sumber daya perikanan yang dimanfaatkan di seluruh wilayah ini terdiri dari empat golongan besar sumber daya perikanan tangkap, yaitu sumber perikanan pelagis, demersal, udang dan karang.

Bila mengacu pada kondisi ideal suatu perairan yang dijadikan sebagai daerah penangkapan, maka kriteria yang dibutuhkan adalah :

Perairan harus memiliki kondisi, dimana ikan datang dengan mudah secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, dan daerah itu merupakan suatu tempat yang baik bagi habitat mereka.

Perairan tersebut akan menjadi tempat dimana nelayan dengan mudah mengoperasikan alat penangkapan ikan. Perairan tersebut akan dialokasikan sebagai suatu tempat yang bernilai ekonomis.



Pemilihan suatu perairan sebagai daerah penangkapan akan dibuat dengan pengertian yang pantas secara efisien, menyenangkan dan penangkapannya bernilai ekonomi. Dengan demikian, lingkungan perairannya harus memadai sesuai dengan tingkah laku ikan berdasarkan data hasil penelitian kondisi oseanografi dan meteorologi, musim penangkapan diperoleh dari akumulasi berbagai pengalaman penangkapan setelah dilakukan operasi penangkapan ikan oleh nelayan, dan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan prinsip ekonomi.

Perairan yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur bila mengacu pada batas wilayah administratif menurut UU No: 32 Tahun 2004 memiliki batas wilayah terjauh adalah 1/3 dari 12 mil laut atau 4 mil laut dari batas surut terendah, bila tidak bersinggungan atau tumpang tindih dengan wilayah perairan Kabupaten atau Provinsi lainnya yang berdampingan. Wilayah ini merupakan daerah penangkapan yang legal dimiliki untuk dimanfaatkan sumberdayanya oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, pada kenyataannya masyarakat setempat terutama nelayan penangkap ikan juga melakukan aktifitas penangkapan ikan sampai di luar batas perairan 4 mil laut tersebut. Luas perairan (daerah penangkapan ikan) per wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur pada batas 0-4 mil laut adalah 5.947,98 Km² dan 4-12 mil laut adalah 11.198,28 Km².

b. Budidaya Perikanan

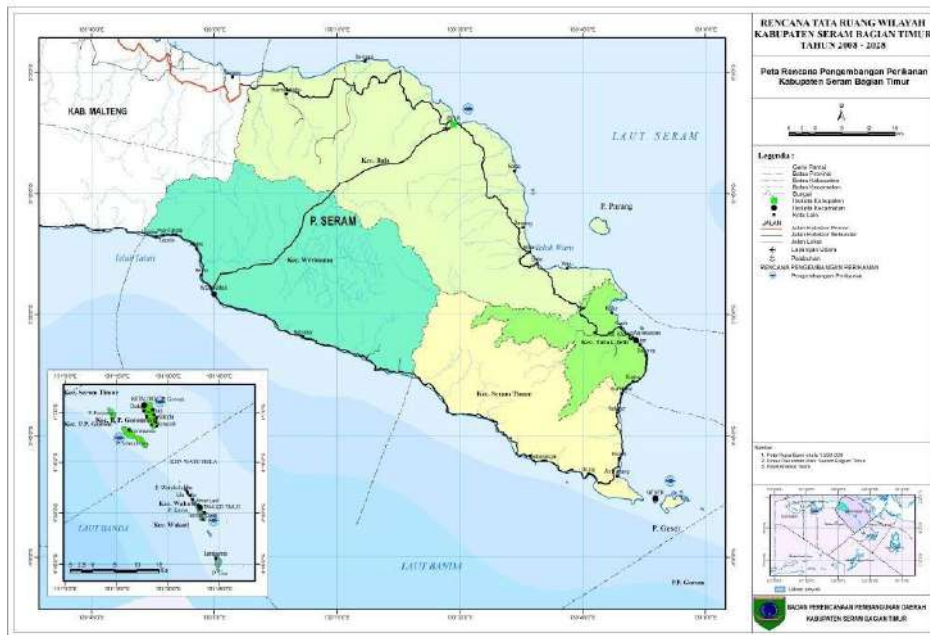
Rencana pengembangan budidaya perikanan yang dapat digunakan untuk kegiatan seluas 8.274,69 ha, luasan tersebut terbagi pada beberapa wilayah perairan yaitu perairan Kecamatan Bula padalokasi Pulau Parang dengan total luas ±536 Ha, Kecamatan Seram Timur pada lokasi P. Keffing, P. Geser, P. Kilwaru, P. Seram Laut, P. Kifar, P. Neding, Desa Kuffar, Desa Urung dengan total luas ± 5.348 Ha

dan Kecamatan Gorom pada lokasi P. Garogos, P. Panjang, P. Manawoka dengan total luas ± 2.391 Ha. Areal terluas yang dapat dimanfaatkan sebagai areal kegiatan usaha budidaya laut adalah perairan Desa Kuffar.

Tabel IV.13. Daerah Potensial Untuk Pengembangan Usaha Budidaya di Perairan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peruntukannya

Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Budidaya
P. Parang	323,43	Ikan Kerapu
P. Parang	119,92	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Parang	92,46	Ikan Kerapu, Rumput laut
P. Keffing	794,66	Rumput laut, Teripang
P. Geser	99,81	Rumput laut
Kilwaru	407,98	Rumput laut
P. Seram Laut	324,87	Rumput laut
P. Kifar	356,80	Rumput laut
P. Neding	356,80	Rumput laut
P. Garagos	315,24	Rumput laut
P. Panjang	1.080,10	Rumput laut, Teripang
Manawoka	254,70	Rumput laut
P. Gorom	733,62	Rumput laut, Ikan
Kufar	2.123,74	Udang
Urung	924,85	Penyu
Jumlah	8.274,69	

**Gambar IV.8. Peta Rencana Kawasan Perikanan
Kabupaten Seram Bagian Timur**



c. Pengolahan Ikan

Rencana pengolahan ikan berada di Desa Kuffar Kecamatan Tutuk Tolu.

O.Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan pertambangan saat ini yang sudah berkembang berupa penambangan Minyak bumi dan menjadi primadona pertambangan dan energi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pertambangan minyak ini berada di Kecamatan Bula telah di eksploitasi sejak jaman Belanda dan kini dikelola oleh swasta. Selain minyak bumi terdapat pula bahan galian C yang telah di kembangkan dan dipasarkan ke kabupaten lain. Di pesisir pantai Kecamatan Bula, Kecamatan Geser dan Kecamatan Werinama diindikasikan terdapat bahan tambang Zirkon. Potensi pertambangan dan energi selain minyak bumi di Kabupaten Seram Bagian Timur dijelaskan pada Tabel IV.14.

**Tabel IV.14. Potensi Pertambangan dan Energi Selain Minyak Bumi
di Kabupaten Seram Bagian Timur**

Jenis Hasil Tambang	Lokasi	Jumlah Cadangan (M ³)	Keterangan
Lempung	1. W. Bobi (Bula) 2. W. Balasai (Bula) 3. Pantai Sisai-Pantai Fufa 4. W. Nief (Bula) 5. Werinam	7.500.000 23.680.000 4.790.000 52.960.000 17.250.000	Bahan baku genteng, bata dan tembikar
Batu Gamping (Marmer)	1. Desa Gah 2. Desa selagor 3. Desa Tah 4. Pulau Kesui	3.987.500.000 3.256.333.333 58.660.000 783.291.666	Bahan baku marmer, semen portland, dan keperluan industri lainnya.
Emas	Kecamatan Bula	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Zirkon	Pesisir Pantai Bula, Geser Dan Werinama	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Batubara	Kecamatan Bula	Belum diketahui	Dalam tahap penelitian
Sirtu	1. W.Bobo 2. W.Matakabo 3. W.Bobi 4. W.Lola Besar 5. W.Fufa 6. W.Bula Besar 7. W.Bolifar 8. W.Kola 9. W.Nief 10.W.Dulak 11.W.Koba 12.W.Nolt 13.W.Mud 14.W.Nawil 15.W.Nusalaut 16.W.Laita 17.W.Bobot	1.210.800 7.548.000 3.666.000 2.454.000 2.254.000 1.048.000 2.054.000 2.188.000 2.880.000 44.580 902.400 829.200 525.800 839.000 226.200 54.720 30.330.000	

Kawasan pertambangan di Kabupaten Seram Bagian Timur di kembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan kondisi geologis yang rawan gempa. Agar kawasan pertambangan ini tidak merusak lingkungan, kegiatan ini perlu diawasi secara ketat perkembangannya dan dibuat aturan yang mengharuskan para investorini untuk menguruk bekas galiannya agar tidak meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang dapat menimbulkan dampak



negatif/kerusakan terhadap lingkungan. Investor juga memiliki kewajiban menanam kembali kawasan yang telah mereka reklamasi dengan pohon-pohon spesies lokal yang pernah ada di kawasan ini sebelumnya. Kegiatan pertambangan galian C pada pulau-pulau kecil yang sangat rentan terhadap perubahan perlu dibatasi, sehingga dapat dihindari terjadinya kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada aspek-aspek pelestarian lingkungan, kegiatan penambangan ini harus dibatasi dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kegiatan penambangan pasir pantai atau sungai yang berada di daerah rawan bencana harus dihentikan. Izin eksploitasi untuk Kuasa Penambangan (KP) diberikan setelah investor melakukan penelitian daya dukung lingkungan terhadap aktivitas pertambangan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah bencana lingkungan yang kerap terjadi di daerah pertambangan dan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Adapun pengelolaan kawasan pertambangan adalah:

- (a) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- (b) Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus di rehabilitasi / reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/ atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- (c) Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*topsoil*) untuk keperluan rehabilitasi / reklamasi lahan bekas penambangan.

Gambar IV.9. Peta Konsesi Minyak Kabupaten Seram Bagian Timur



P. Kawasan Peruntukan Industri

Upaya pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan pengembangannya pada kegiatan industri skala kecil dan menengah yang berbasis pada pengembangan sumber daya alam lokal. Kawasan industri merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (industrial estate) di bawah pembinaan Pemerintah Kabupaten melalui badan / dinas / instansi terkait, atau yang penanganannya pengembangan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten, yang dilengkapi berbagai prasarana dan sarana transportasi, jaringan utilitas, serta fasilitas penunjang lingkungan.

Pengembangan kawasan industri dipengaruhi oleh jenis industri komoditas unggulan dan keterkaitan industri terhadap perekonomian. Keterkaitan kegiatan industri terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Keterkaitan ke belakang adalah hubungan industri tersebut dengan sektor / industri yang menyediakan bahan baku. Keterkaitan ke depan adalah hubungan antara industri tersebut dengan sektor/industri yang menggunakan output industri tersebut. Penentuan



daerah industri berdasarkan potensi daerah masing - masing, mengingat Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan wilayah kepulauan maka penentuan lokasi industri menyebar berdasarkan potensi unggulan daerah setempat :

Tabel IV.15. Jenis Industri berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kecamatan	Industri	Potensi	Pengelola
Bula	Meubel	Kayu	Dinas Koperindag
Werinama	Meubel dan Anyaman	Kayu dan Rotan	Dinas Koperindag
Seram Timur	Pengolahan Ikan, Udang dan Rumput Laut	Perikanan	Dinas Perikanan dan Dinas Koperindag
P. Gorom	Pengolahan ikan, Udang, Rumput Laut, Cengkeh dan Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
Tutuk Tolu	Pengolahan ikan, Udang, Rumput Laut dan Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian
Kesui Watubela	Pengolahan ikan, Udang, Rumput Laut dan Pala	Perikanan dan Perkebunan	Dinas Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pertanian

Untuk menghindari dampak lingkungan, kegiatan industri yang akan dikembangkan perlu di lakukan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan serta memperhatikan pengolahan limbah industri mengikuti baku mutu lingkungan yang berlaku. Sedangkan untuk melayani kegiatan masyarakat yang bekerja / berkunjung di lingkungan industri, padatiap zona / sentra kawasan industri akan dikembangkan pusat pelayanan yang dilengkapi fasilitas dan prasarana yang memadai dengan jenis pelayanan sesuai arahan rencana struktur tata ruang.

Q.Kawasan Pariwisata

Berdasarkan analisis kondisi biofisik, oseanografi dan kehadiran habitat utama dengan disertai keanekaragaman sumberdaya hayati didalamnya rnaka terdapat sejumlah lokasi di perairan pesisir dan laut Kabupaten Seram Bagian Timur yang layak dikembangkan rnenjadi daerah wisata yaitu wisata budaya dan wisata alam. Pariwisata



budaya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan lokasi-lokasi yang menjadi pengembangan wisata alam dimaksud adalah:

1. Kecamatan Seram Timur:
 - Kiffura;
 - Keffing;
 - Urung;
 - Kon;
2. Kecamatan Pulau Gorom
 - Garogos
 - Amarsekaru;
 - Gorom;
 - Wawatu.
3. Kecamatan Werinama
 - Tobo;
 - Hatumeten;
 - Osong;
 - Batuasa.
4. Kecamatan Bula
 - Englas;
 - Sesar;
 - Waihul.
5. Kecamatan Teluk Waru
 - Pulau Parang,
6. Kecamatan Bula Barat
 - Hote;
 - Silihan.
7. Kecamatan Tutuk Tolu
 - Pulau Akat.
8. Kecamatan Kesui Watubela
 - Pulau Igar;
 - Pulau Baam.
9. Kecamatan Teor
 - Pulau Kurkaf.

Seluruh lokasi yang disebut di atas memiliki keindahan pesisir pantai, terumbu karang danke ragaman biota yang cukup tinggi, sehingga memberikan nuansa panorama pesisir dan bawah laut yang unik dan

menarik. Lokasi-lokasi tersebut merupakan spot untuk berenang (*Skin Diving*) dan menyelam (*Scuba Diving*) baru, serta ekowisata yang menarik dan perlu dikembangkan. Berikut ini merupakan potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur yang tersaji dalam Tabel IV.13

Tabel IV.16. Potensi Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Potensi	Desa	Kecamatan
Danau Sole	Wisata Bahari (Karang, Magrove, Ikan, Pasir Putih)	Amar sekaru	Pulau Gorom
Pantai Gumummae	Wisata Bahari (Surfing dan Diving) dan Wisata Alam	Bula	Bula
Karang Bais	Wisata Bahari / Wisata Bawah Laut (Ikan, Terumbu Karang, Surfing, Diving)	Hote	Bula Barat
Pulau Akat	Penyangga Kota Kabupaten Hunimua, Wisata Bahari, Pulau Terapung (Ikan, Burung Kenari, Surfing, Diving)	Air Kasar	Tutuk Tolu
Pulau Madoran, Kidan, Neden	Wisata Bahari	Kian Darat	Kian Darat
Gugus Pulau Nukus, Khon dan Garogos	Wisata Bahari, dan Wisata Alam	Kataloka	Pulau Gorom
Gugus Batu	Wisata Sejarah dan Budaya	Kian Darat	Kian Darat
Penangkaran Rusa	Wisata cagar Alam (dijadikan Taman Perburuan Rusa)	Nif dan Werinama	Bula dan werinama
Air Terjun	Wisata Alam	Gusa Laut	Werinama

Gambar IV.10. Peta Rencana Kawasan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur



R. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan permukiman bertujuan untuk :

- 4.3.2.1.1. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia 2)
Memberikan arah bagi distribusi penduduk dan pertumbuhan wilayah 3) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain. Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah terbentuknya satuan-satuan lingkungan berupa kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Pengembangan kawasan perumahan di upayakan menggunakan konsep *neigh borhood unit* yang dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana pelayanan umum yang memadai, sehingga penduduk yang tinggal di lingkungan perumahan tersebut sudah dapat terlayani kebutuhan pokoknya oleh pusat pelayanannya

Gambar IV.11. Peta Rencana Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur



Pengembangan kawasan perumahan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat dilakukan oleh masyarakat dalam skala kecil yang umumnya tumbuh secara alami dan dibangun secara horisontal sesuai kebutuhan, sedangkan penyediaan fasilitas pelayanan umum dapat dibangun melalui swadaya masyarakat yang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan pengembangan lingkungan perumahan oleh pemerintah kabupaten dititik beratkan pada penataan lingkungan perkampungan, yang dilakukan melalui perbaikan dan peremajaan rumah dan lingkungannya, seperti program perbaikan kampung dengan mengikutsertakan sumberdaya masyarakat setempat.

Pada saat ini Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pengembangan pemukiman transmigrasi memakai Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP) yang tersebar di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Werinama dan Kecamatan Bula.

Tabel IV.17. Penyebaran Lokasi Transmigrasi

Kecamatan	UPT	Lokasi
Kec. Bula Barat	UPT.U	Aki Ternate
	UPT.R	Banggoi
	UPT.T	Jakarta Baru
	UPT.X	Banggoi
	UPT.Y	Hote
	UPT.Z	Hote
Kec.Werinama	UPT.Batuasa	Batuasa

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Indikasi rencana program tahun 2025 didasarkan pada prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Maluku guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 8 (Delapan) Kelompok diantaranya ; 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi dan Nasional Tahun 2025 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2025.

Pada dasarnya, Program kegiatan yang disusun pada level Kabupaten mengacu pada program yang disusun pada level nasional dan provinsi. Ada 7 Prioritas Nasional (PN) yang menjadi acuan bagi Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu:

1. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
2. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik;
5. Berbicara Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; dan
7. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sinkronisasi dan keterkaitan Prioritas Pembangunan tersebut disajikan dalam tabel V.1 berikutini:

**Tabel V.1. Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD
Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Maluku dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
PN.1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas Provinsi Ke : 5 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Prioritas Daerah Ke : 7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
PN. 2 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas Provinsi Ke : 2 Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Prioritas Daerah Ke : 4 Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan
PN. 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Provinsi Ke : 3 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Prioritas Daerah Ke : 1 Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif
PN. 4 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Provinsi Ke : 1 Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Prioritas Daerah Ke : 6 Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan
PN. 5 Berbicara Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Provinsi Ke : 4 Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata	Prioritas Daerah Ke : 3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran
PN. 6 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Prioritas Daerah Ke : 5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif



Prioritas Nasional Tahun 2025	Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
PN. 7 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Prioritas Daerah Ke : 2 Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan

Prioritas RKPD dicapai melalui instrumen program prioritas. Program prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 disajikan dalam tabel V.2. berikut ini.

Tabel V.2 Program Prioritas RKPD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2025

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PEANGGUNG JAWAB
1. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	75,6	1. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan	Dinas Perikanan Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pariwisata Dinas Koperasi Dinas PTSP
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	125	1. Pemetaan Potensi dan Penyusunan Master Plan Pembangunan	
			2. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	
			3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan melalui pemantapan sumber daya alam desa	
			4. Penguatan Ketahanan Pangan	
			5. Pengelolaan Sumberdaya Untuk Pangan	
			6. Ketahanan Pangan Desa	
			7. Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan	
			8. Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya pariwisata bahari	
			9. Pengembangan Kapasitas manajemen dan usaha koperasi dan UMKM	

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PEANGGUNG JAWAB
			10. Kemudahan dan Kesempatan mengembangkan usaha bagi koperasi dan UMKM	
			11. penyelenggaraan pameran investasi	
			12. Penyusunan rencana umum penanaman modal	
			13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			14. Pemantauan Kebijakan sumberdaya alam	
2. Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,5	1. Program Pendidikan Luar Biasa	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan
	Indeks Pelayanan Kesehatan Masyarakat	87,6	1. Program Pengelolaan Pendidikan	
			2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PEANGGUNG JAWAB
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	Tenaga kerja trampil dan sertifikasi	55,5	1. Program rehabilitasi sosial	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2. Perlindungan dan jaminan sosial	
			3. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Lembaga adat di MHA	
			4. Program pengendalian penduduk	
			5. Program pemberdayaan Masyarakat desa	
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan	Indeks Konektifitas Daerah (IKD)	38,5	1. Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Kota Bula	Dinas Penata Ruang dan Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tingkat Aksesibilitas	55,5	1. Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023-2043	
			2. Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kawasan Sesar	
			3. Revitalisasi Kawasan Perkotaan Kota Bula	
			4. Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			5. Penanganan Banjir Kota Bula	

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PEANGGUNG JAWAB
			6. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan, Bandara, dan Terminal	
			7. Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	
			8. Penyediaan Sanitasi Layak	
			9. Penyediaan Internet Desa	
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif	Indeks Pembangunan Manusia	66,5	1. Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	Indeks Inovasi Daerah (IID)	5,78	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			2. Program Riset Dan Inovasi Daerah	
6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	2,51 3,25	1. Program peningkatan sumber daya manusia aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Indeks Presepsi Korupsi (IPK)	2,51 3,25	1. Program peningkatan system pengawasan internal di pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PROGRAM PRIORITAS	OPD PEANGGUNG JAWAB
			2. Program pengembangan inovasi dan teknologi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	
			4. peningkatan kualitas pelayanan publik	
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Fungsi Tata Ruang dan Mitigasi Bencana	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	34,2	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Penata Ruang dan Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2. Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			3. Rehabilitasi Kerusakan Lahan	
			4. Revisi Tata Ruang Kab. Seram Bagian Timur	
			5. Penyusunan RANPERDA Revisi RTRW	
			6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kebencanaan	
			7. Penguatan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025.

Secara lengkap renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah nampak sebagaimana tabel berikut :

**Tabel V.3. Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
DINAS PENDIDIKAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000	160.200.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000.000	
	Program Pengelolaan Pendidikan	141.500.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	56.600.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	53.600.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.100.000.000	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.200.000.000	
	Program Pengembangan Kurikulum	750.000.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	750.000.000	
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.900.000.000	
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.900.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.900.000.000	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.400.000.000	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.400.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	800.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.300.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.900.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.900.000.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan	600.000.000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	600.000.000	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.450.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.450.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	274.500.000.000	279.000.000.000
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	208.500.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.000.000.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.000.000.000	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.500.000.000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	500.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	500.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	500.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.312.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.300.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.000.000		

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Peningkatan Pelayanan BLUD	150.000.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.946.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.546.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	500.000.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
RSUD GORAN RIUN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.025.000.000	41.455.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.105.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.850.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.350.000.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.430.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.680.000.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.750.000.000	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.525.000.000	106.875.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.330.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.315.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.080.000.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	17.240.000.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) D	16.840.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.000.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000.000	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2.360.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.360.000.000	
	Program Pengembangan Permukiman	2.000.000.000	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
	Program Penyelenggaraan Jalan	66.100.000.000	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	66.100.000.000	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	750.000.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	700.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	900.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.165.000.000	18.665.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.000.000	
	Program Pengembangan Perumahan	3.200.000.000	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.750.000.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	200.000.000	
	Program Kawasan Permukiman	4.000.000.000	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.250.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.750.000.000	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.800.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	7.500.000.000	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.500.000.000	
SATPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.623.000.000	10.098.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	58.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Perangkat Daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	690.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	330.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.000.000	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.475.000.000	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.875.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	600.000.000	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.317.500.000	3.317.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.600.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000	
BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.930.000.000	6.730.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.980.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	
	Program Penanggulangan Bencana	3.800.000.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.000.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	550.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.950.000.000	
DINAS SOSIAL	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	3.835.000.000	20.985.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.550.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.000.000	
	Program Pemberdayaan Sosial	4.500.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	3.500.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
	Program Rehabilitasi Sosial	4.500.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.500.000.000	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.650.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.650.000.000	
	Program Penanganan Bencana	3.500.000.000	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2.750.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	750.000.000	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	3.186.500.060	9.665.450.060
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.060	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	270.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	411.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	800.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.000.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;	900.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	400.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	500.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja;	1.032.500.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.011.000.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	21.500.000	
	Program Hubungan Industrial	1.676.450.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.200.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.500.250.000	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1.650.000.000	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.650.000.000	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	500.000.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	720.000.000	
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	720.000.000	
DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT PEMERINTAH AN DESA	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	350.000.000	6.300.000.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	
	Program Perlindungan Perempuan	350.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	
	Program Perlindungan Khusus Anak	150.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.800.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.800.000.000	
	Program Pemberdayaan Lembagakemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	2.150.000.000	
DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.150.000.000	14.510.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	5.340.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	420.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.050.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.100.000.000	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	5.000.000.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.675.000.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	925.000.000	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	100.000.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.300.000.000	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.320.000.000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	325.000.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	995.000.000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	750.000.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar		

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.265.000.000	5.515.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.000.000	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	900.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	900.000.000	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	350.000.000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	350.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	150.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH	350.000.000	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	150.000.000	
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	200.000.000	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Program Pengelolaan Persampahan	2.400.000.000	
	Pengelolaan Sampah	2.400.000.000	
DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.605.000.000	4.570.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.105.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	
	Penataan Organisasi	150.000.000	
	Program Pendaftaran Penduduk	1.090.000.000	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	540.000.000	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	50.000.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	400.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	100.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pendaftaran Penduduk		
	Program Pencatatan Sipil	750.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	200.000.000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	550.000.000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.000.000	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	125.000.000	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	656.000.000	8.406.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	
	Program Pengendalian Penduduk	600.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.600.000.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.550.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	600.000.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.800.000.000	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.550.000.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.200.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.350.000.000	
DINAS PERHUBUNGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.396.455.000	4.696.455.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.574.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.881.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.000.000	
	Penataan Organisasi	120.000.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.700.000.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	700.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.000.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Pelayaran	600.000.000	5.505.000.000
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	600.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.185.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	425.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.000.000	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.550.000.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.550.000.000	
	Program Aplikasi Informatika	2.220.000.000	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.470.000.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	300.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	250.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
DINAS KOPERASI, UKM PERDAGANG AN DAN PERIDUSTRIAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.317.147.391	6.667.147.391
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.947.391	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	570.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.000.000	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	100.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	250.000.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	250.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	700.000.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	500.000.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	200.000.000	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	500.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	500.000.000	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	100.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100.000.000	
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	300.000.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300.000.000	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	300.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	300.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.940.000.000	4.290.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.160.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	650.000.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	550.000.000	
	Program Promosi Penanaman Modal	100.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	300.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	875.000.000	2.175.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	
	Program Pembinaan Perpustakaan	700.000.000	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100.000.000	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Program Pengelolaan Arsip	200.000.000	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	300.000.000	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	150.000.000	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	150.000.000	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.092.000.000	18.527.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.000.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.435.000.000	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.250.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.535.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.700.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	850.000.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.650.000.000	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	200.000.000	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.100.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	350.000.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.750.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
DINAS PARIWISATA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.684.000.000	8.284.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.850.000.000	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	700.000.000	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	600.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.200.000.000	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
	Program Pemasaran Pariwisata	700.000.000	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	600.000.000	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	600.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.450.000.000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.250.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	200.000.000	
DINAS PERTANIAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.115.000.000	10.615.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.700.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.700.000.000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.000.000.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.250.000.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.500.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.750.000.000	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200.000.000	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	1.350.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.350.000.000	
SEKRETARIAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.439.840.000	55.949.189.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	519.960.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	917.050.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.387.480.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.770.230.000	
	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	5.845.120.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.700.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.500.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.250.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	
	Penataan Organisasi	250.000.000	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.180.000.000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	1.730.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	450.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	930.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	950.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	950.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	450.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8.800.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.800.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	585.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.065.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.255.000.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	810.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.900.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.900.000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.003.174.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.003.174.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.080.275.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.925.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	266.650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.250.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	611.450.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.700.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	
	Penataan Organisasi	1.450.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.700.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	600.000.000	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.100.000.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.100.000.000	
SEKRETARIAT DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	51.290.000.000	68.190.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.570.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.850.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.750.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.400.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	600.000.000	
	Layanan Administrasi DPRD	32.300.000.000	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	16.900.000.000	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.500.000.000	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	250.000.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.200.000.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.950.000.000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.000.000.000	
	Fasilitasi Tugas DPRD	.000.000.000	
BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.080.000.000	18.095.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	790.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.410.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.920.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.000.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.140.000.000	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.090.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	550.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100.000.000	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.875.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	525.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.650.000.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.500.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	300.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.700.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	500.000.000	
	Program Riset dan Inovasi	500.000.000	
	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	200.000.000	
	Invensi dan Inovasi	300.000.000	
BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.905.000.000	18.668.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.800.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.060.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	710.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.250.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.943.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.525.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	443.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.070.000.000	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.650.000.000	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	255.000.000	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	820.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	820.000.000	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.016.632.429	6.346.632.429
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.196.632.429	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.135.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.000.000	
	Penataan Organisasi	100.000.000	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.330.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.330.000.000	
BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.623.500.000	9.713.500.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	890.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.500.000	
	Program Kepegawaian Daerah	4.390.000.000	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.605.000.000	
	Mutasi dan Promosi ASN	2.150.000.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	250.000.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	385.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.700.000.000	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	700.000.000	
INSPEKTORAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.908.500.000	14.832.900.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.054.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.204.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	8.624.400.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	8.000.000.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	624.400.000	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan	1.300.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Asistensi		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	200.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	1.300.000.000	
KECAMATAN BULA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.102.106.650	2.196.106.650
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.106.650	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	14.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	25.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	
	KECAMATAN BULA BARAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		265.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100.000.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		175.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		175.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa		250.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		250.000.000	
KECAMATAN KESUI WATUBELA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	510.000.000	805.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	95.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	50.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	
KECAMATAN TEOR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	440.000.000	620.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	70.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	20.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	
KECAMATAN TELUK WARU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	265.000.000	600.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	60.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
KECAMATAN TUTUK TOLU	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	145.000.000	900.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	145.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	450.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	125.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	125.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	150.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	150.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	75.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75.000.000	
KECAMATAN KIAN DARAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	420.000.000	620.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	30.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	475.000.000	675.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	20.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Pemerintahan Daerah		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	90.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	10.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	
KECAMATAN KILMURY	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	450.000.000	735.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	60.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	90.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	60.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	35.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.000.000	
KECAMATAN WERINAMA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	675.000.000	1.235.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	190.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	125.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Tingkat Kecamatan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	65.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	230.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	95.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	135.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	40.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40.000.000	
KECAMATAN SIWALALAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	500.000.000	710.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	15.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	
KECAMATAN SERAM TIMUR	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	505.000.000	640.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25.000.000	

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	60.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	10.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	
KECAMATAN PULAU GOROM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.104.106.650	2.199.106.650
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.929.106.650	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	15.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	55.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	25.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	490.000.000	
KECAMATAN GOROM TIMUR	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	700.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	55.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	85.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	35.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	10.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	10.000.000	
			650.000.000

OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
KECAMATAN PULAU PANJANG	Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	490.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	80.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.000.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.000.000	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	10.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	
BADAN KESBANGPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.866.940.000	4.453.110.900
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.940.000	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	924.970.900	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	924.970.900	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	625.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	625.000.000	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000	



OPD PELAKSANA	PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	INDIKASI ANGGARAN	TOTAL ANGGARAN OPD
1	2	3	4
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	200.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	150.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	150.000.000	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	686.200.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	686.200.000	
TOTAL ANGGARAN			1.010.263.098.080

**Tabel V.4. Rencana Kerja Program/Kegiatan Stunting
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME /SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			350.000.000,00		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			350.000.000,00		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Belanja Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Paket	350.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			150.000.000,00		
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Belanja Penyediaan Layanan bagi Anak	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Paket	150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
JUMLAH				500.000.000,00		

OPD : Dinas Sosial

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU(Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			4.000.000.000,00		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			4.000.000.000,00		
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Permakanan - Penyediaan Permakanan, Asupan Gizi Bagi Penderita Stunting dan PMKS Lainnya	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	800 Orang	2.500.000.000,00	Dalam Pembahasan	
1.06.04.2.01.04	Penyediaan Sandang - Penyediaan Sandang dan Pangan	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	350 Orang	750.000.000,00	Dalam Pembahasan	
1.06.04.2.01.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	400 Orang	750.000.000,00	Dalam Pembahasan	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.650.000.000,00		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4.650.000.000,00		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota -Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	75000 Orang	1.000.000.000,00	Dalam Pembahasan	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota -Pengelolaan Data Fakir Miskin / Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	75000 Orang	150.000.000,00	Dalam Pembahasan	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga A, A	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	850 Orang	1.500.000.000,00	Dalam Pembahasan	

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU(Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga /Individu					
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat -Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat /Pemulihan Ekonomi	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	200 Orang	2.000.000.000,00	Dalam Pembahasan	
JUMLAH				8.650.000.000,00		

OPD : Dinas Ketahanan Pangan

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			250.000.000,00		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			250.000.000,00		
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakatdan Toko Tani Indonesia -Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	5 Unit	250.000.000,00	Dalam Pembahasan	
JUMLAH				250.000.000,00		

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS/DISETUIJ	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			600.000.000,00		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			600.000.000,00		
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga -PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.02.2.02.18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK -TERSEDIAANYA LAPORAN PROGRAM KKBPK	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.200.000.000,00		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			250.000.000,00		
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK -TERLAKSANANYA PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	250.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			650.000.000,00		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya -TERSEDIAANYA ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI FASKES	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	200.000.000,00	Dalam Pembahasan	

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) -PENINGKATAN PESERTA MKJP	(KAB.SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	200.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak -PELAYANAN KB BERGERAK	(KAB.SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	250.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			300.000.000,00		
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB -TERLAKSANYA PEMBINAAN KAMPUNG KB	(KAB.SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			300.000.000,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			300.000.000,00		
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) -SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEHJATERAAN KELUARGA	(KAB.SERAM BAGIAN TIMUR)	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dalam Pembahasan	
JUMLAH				2.100.000.000,00		

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

KODE	URAIAN URUSAN/BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN/USULAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	STATUS DISETUIJUI	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	UNSUR ENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01	PERENCANAAN					
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)		300.000.000	Dalam Pembahasan	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)		200.000.000	Dalam Pembahasan	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(KAB. SERAM BAGIAN TIMUR)		200.000.000	Dalam Pembahasan	
Jumlah				700.000.000		

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Apabila ditelaah, jenis pelayanan dasar daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 29 jenis layanan, dapat dilihat pada tabel dibawah :



Tabel V.5. PENYELARASAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA SPM TAHUN 2025

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Pendidikan	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Siswa Usia 12 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	10 ruang	2.500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang /bangunan yang akan di bangun	10 ruang	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 ruang	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	6 ruang	2.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	7 ruang	2.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 ruang	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	9 ruang	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 sarana prasarana	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 ruang	2.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 RUANG	2.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 RUANG	2.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 SARANA PRASARAN A	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah kebutuhan meja dan kursi siswa	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Beasiswa bagi yang kurang mampu	500 SISWA	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kebutuhan alat peraga siswa	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 SISWA	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 PESERTA	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 SEKOLAH	300.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas	1 KEG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 DOKUMEN	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
	Pendidikan sekolah dasar	Jumlah Siswa Usia 6 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan DASAR	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	10 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	10 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 RUANG	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	10 UNIT	2.000.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 UNIT	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 UNIT	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah kebutuhan meja dan kursi siswa	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	500.000.000	PENDIDIKAN
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Beasiswa bagi yang kurang mampu	500 SISWA	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kebutuhan alat peraga siswa	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 SISWA	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 PESERTA	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	50 SEKOLAH	300.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Kelembagaan dan manajemen sekolah			
					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 DOKUMEN	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	10 RUANG	2.500.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pemahaman mengenai sikap inklusif terhadap disabilitas	1 DOKUMEN	300.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa Usia 5 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan ANAK USIA DINI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKA	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di bangun	5 UNIT	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	10 UNIT	1.500.000.000	PENDIDIKAN
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang/ bangunan yang akan di rehab	5 UNIT	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah kebutuhan meja dan kursi siswa	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Beasiswa bagi yang kurang mampu	500 SISWA	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 SEKOLAH	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 ORG	300.000.000	PENDIDIKAN
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 DOKUMEN	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang/bangunan yang akan di bangun	10 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang/bangunan yang akan di bangun	11 RUANG	1.000.000.000	PENDIDIKAN
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 SISWA	300.000.000	PENDIDIKAN
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah pakaian seragam sekolah yang tersedia	5 PAKET	500.000.000	PENDIDIKAN
					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 PESERTA	1.000.000.000	PENDIDIKAN
Jumlah								60.100.000.000	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Pelayanan kesehatan pada Ibu hamil	Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (usia 0 - 28 hr)	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada Bayi Baru Lahir (usia 0 - 28 hari)	Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada balita	Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (usia 15-59 Thn)	Jumlah orang dengan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 Thn)	Orang dengan usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		standar							
	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (Usi > 15 Thn)	Jumlah oang dengan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (usia > 15 Thn)	Orang dengan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Diabetes Militus	Jumlah penderita Diabetes Militus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Militus	Penderita Diabetes Militus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanana kesehatan sesuai standar			Pelayanan kesehatan pada orang dengan Gangguan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanana kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang denga TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			Pelayanan Kesehatan orang dengam TB	Orang denga TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	200.000.000	Dinas Kesehatan
Jumlah								2.400.000.000	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Pekerjaan Umum	Infrastruktur Bangunan Pengaman Lingkungan Permukiman		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan bangunan wilayah pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten atau Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	Mencegah terjadinya air yang meluap dari aliran sungai pada saat curah hujan tinggi yang berdampak pada kerusakan jalan dan permukiman	6.166.131.816	PUPR
	Penyediaan Air Minum		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang di bangun	Mewujudkan Sistem Air Minum yang dirasakan oleh Masyarakat	14.006.072.840	PUPR



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	mewujudkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang lengkap, efisien, dan efektif serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan juga menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas.	82.393.550	PUPR



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	Penyediaan sistem Pengelolaan Air Limbah		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	mewujudkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang lengkap, efisien, dan efektif serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan juga menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas.	82.393.550	PUPR
	Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Menciptakan Sarana Infrastruktur jalan dan jembatan yang layak untuk kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat.	70.693.485.148	PUPR
Jumlah								91.030.476.904	



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit	1.250.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jumlah								1.250.000.000	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	1. Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	A. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok.	13.000.000	satpol PP
					Sub.Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	1 Dok.	20.000.000	satpol PP
				B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji NON ASN	Tersedianya Gaji NON ASN	12 BULAN	2.400.000.000	satpol PP
					Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	1 Tahun	5.000.000	satpol PP



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentasi Pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	Laporan	150.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Presentasi Pegawai yang mengikuti Bimtek	Laporan	150.000.000	satpol PP
				D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	50.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	10.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Paket	65.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Pengadaan	Paket	60.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum kantor	Paket	200.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar dan dalam Daerah	Laporan	350.000.000	satpol PP
				E. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	180.000.000	satpol PP



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Mobiler	Tersedianya Mobiler Kantor	Paket	25.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	25.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1 Unit	100.000.000	satpol PP
				F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	10.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentasi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	50.000.000	satpol PP
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	65.000.000	satpol PP



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	230.000.000	satpol PP
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	200.000.000	satpol PP
			2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	H. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terlaksananya pelaksanaan patroli, pengaman dan pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Laporan	4.000.000.000	satpol PP
					Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan perda dan Perkada	Presentasi Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan	200.000.000	satpol PP
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Presentasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	150.000.000	satpol PP



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					masyarakat tingkat Kabupaten				
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	75.000.000	satpol PP
					Peningkatan Kapasitas SDM SATPOL PP dan Satuan Linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak Azasi manusia	Presentasi Anggota SATPOL PP dan Linmas dalam mengikuti peningkatan SDM	Laporan	150.000.000	satpol PP
					Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Kerjasama Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	150.000.000	satpol PP
	Ketentrama, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam Penanggulan gan Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah								9.107.000.000	
Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,			108	300.000.000	Dinsos



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		diluar panti		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	1. Program Rehabilitasi Sosial		1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup	170	300.000.000	Dinsos
	Lansia Terlantar	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	5. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah	8011	600.000.000	Dinsos
	Gepeng	Jumlah tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial					15	200.000.000	Dinsos
	Bencana Alam dan Sosial	Jumlah perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah norang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	100	1.000.000.000	Dinsos
Jumlah								2.400.000.000	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Non ASN	Tersedianyan Gaji Non ASN	12 Bulan	1.454.194.829	Dinas Pemadam Kebakaran
			Urusan Pemerintahan						



**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
t			Ketentraman dan Ketertiban umum Serta Perlindungan Masyarakat						
		Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarkat dalam Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	-	-	-	
Jumlah								1.454.194.829	



Tabel V.6. Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas	Jumlah usulan	Prioritas Sumber Dana		
		APBD Kab	APBD Prov	APBN
Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Ungulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif	99	10.400.000.000		
Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan	54	416.000.000.000		
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran	0	-		
Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan	20	79.550.000.000		
Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif	0	-		
Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan	0	-		
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	0	-		
TOTAL	173	505.950.000.000		

**Tabel V.7. Rekapitulasi Hasil Usulan Musrenbang Terhadap
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	USULAN
1	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA dan OLAHRAGA	201
2	DINAS KESEHATAN	72
	RUMAH SAKIT GORAN RIUN	19
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULA	28
3	DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG	34
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PERMUKIMAN	24
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	23
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7
7	DINAS SOSIAL	32
8	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	43
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	51
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21
12	DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL	43
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28
14	DINAS PERHUBUNGAN	14
15	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA, STATISTIK dan PERSANDIAN	40
16	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	29
17	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26
18	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	20
19	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	35
20	DINAS PARIWISATA	43
21	DINAS PERTANIAN	23
22	SEKRETARIAT DAERAH	34
23	SEKRETARIAT DPRD	50
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	59
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	58
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	54
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	32
28	INSPEKTORAT DAERAH	39
29	KECAMATAN BULA	16
30	KECAMATAN BULA BARAT	11
31	KECAMATAN TELUK WARU	23
32	KECAMATAN TUTUK TOLU	13
33	KECAMATAN KIAN DARAT	20
34	KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	22

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	USULAN
35	KECAMATAN KELIMURY	24
36	KECAMATAN WERINAMA	22
37	KECAMATAN SIWALALAT	22
38	KECAMATAN SERAM TIMUR	22
39	KECAMATAN PULAU GOROM	16
40	KECAMATAN GOROM TIMUR	20
41	KECAMATAN PULAU PANJANG	21
42	KECAMATAN KESUI WATUBELA	20
43	KECAMATAN TEOR	22
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7
TOTAL		1.537

BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan tahun keenam dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1 Penetapan Indikator dan Target Umum (Makro)

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia (IMM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDRB Perkapita, tingkat inflasi, dan indeks ketimpangan. Penetapan Indikator Makro Pemerintah Kabupaten seram bagian timur sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 6.1.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,3-5,4, realisasi ini menunjukkan Indonesia mampu mempertahankan di atas 5,00 persen. Di tahun 2025 target pertumbuhan ekonomi tingkat Nasional sebesar 5,3-5,6. Pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku di tahun 2025 akan berada pada angka 5,26-5,51. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,17 persen.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2025 seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan dapat diturunkan dengan target Nasional 4,5-5,0 persen, untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerjaan keahlian antara lain melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kartu pekerja, dan target provinsi Maluku di tahun 2025 sebesar 5,55-6,03 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur ditargetkan sebesar 2,80 persen.

c. Tingkat Kemiskinan

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan tahun 2025 dapat diturunkan menjadi 18,70 persen di tahun 2025.

d. Rasio Gini

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi bertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh. Di tahun 2025 untuk angka rasio gini target nasional sebesar 0,379-0,382 dan target provinsi

maluku di tahun 2025 sebesar 0,282-0,287 persen, pertumbuhan ekonomi. indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Dampak dari perbaikan kondisi perekonomian indonesia di rasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut. Di tahun 2025 di kabupaten seram bagian timur diprediksi akan lebih baik di bandingkan deng akngkah rasi gini di tahun – tahun sebelumnya dan di targerkan untuk tahun 2025 akan berada pada angkat 0,234.

e. Indeks Modal Manusia

Pada tahun 2024,diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator ke depan.dan targer provinsi maluku di tahun 2025 akan mencapai target 0,49 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur di perkirakan dengan target sebesar 73,90 persen pada tahun 2025.

Tabel VI.1 Indikator Makro Tahun 2025

No	Indikator	Target Nasional 2025	Target Provinsi 2025	Target Kabupaten 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,26 – 5,51	4,17
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,8 – 8,0	5,55 – 6,03	2,80
3	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5 – 8,0	13,01 – 13,51	18,70
4	Rasio Gini (%)	0,5	0,282 – 0,287	0,234
5	Indeks modal Manusia	0,379 – 0382	0,49	66,20
6	Penurunan intensitas EMISI GRK	36,6	42,88	-

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Tabel VI.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Seram Bagian Timur

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Indikator Kinerja Utama 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,17
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,20
Tingkat Kemiskinan (%)	18,70
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80
PDRB Perkapita (juta/penduduk)	27,530
Tingkat Inflasi (%)	2,50-3,87
Indeks Gini Rasio (point)	0,234
Indeks Kinerja Pemerintahan Daerah (skor)	
Indeks Desa Membangun	Mandiri 4 Desa, Maju 9 Desa, Berkembang 40 Desa, Tertinggal 177 Desa, Sangat Tertinggal 28 Desa
Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	3.509,35
Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB (%)	
Rasio daya serap tenaga kerja	50
Jumlah Taman Pengajian Qur'an yang aktif (unit)	54
Rasio KDRT (%)	
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (%)	3/1000
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (%)	3/1000
Presentase penduduk berakses air minum (%)	60
Presentase rumah tinggal bersanitasi (%)	56
Presentase Rumah Tangga penggunalistrik (%)	
Indeks Pelayanan Publik	
Opini BPK	WDP
Level Maturitas SPIP	2
Level Kapabilitas APIP	3
Nilai hasil evaluasi SAKIP	-
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (%)	
Presentase ketaatan terhadap RTRW	-
Proporsi jalan dalam kondisi baik (%)	-
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Penetapan Target Kinerja dalam Indikator Kinerja Kunci merupakan upaya pencapaian prioritas dalam pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tahun 2025, yang dapat dinilai dan dievaluasi diakhir tahun 2025.

Indikator kinerja kunci (IKK) meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek

daya saing daerah. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi : kesejahteraan dan pemerataan ekonomi atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi seperti : pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/ infrastuktur perhubungan dan Penataan Ruang.

**Tabel VI.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,20
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,17
3	Tingkat Kemiskinan (%)	18.70
4	PDRB Perkapita (juta/penduduk)	27,530
5	Tingkat Inflasi (%)	2,50-3,87
6	Gini Ratio (point)	0,234
7	Tingkat Pengangguran (%)	2,80

**Tabel VI.4 Aspek Pelayanan Umum
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
II	ASPEK PELAYANAN UMUM	
II.I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
II.I.I	PENDIDIKAN	
1	Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (%)	57,52
2	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%)	65,52
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	98,73
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	82,78
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD(%)	-

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/Mi/Paket A (%)	-
7	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/Paket B (%)	-
8	Angka Putus Sekolah SD/MI	18,01
9	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	12,11
10	Angka Kelulusan SD/MI (%)	98,25
11	Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	99,04
12	Angka Melek Huruf (%)	7,439
13	Rata-rata lama sekolah (%)	97,03
14	Harapan lama sekolah (%)	97,03
15	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	54,35
16	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	67,35
17	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	68,34
18	Rasio Guru/Murid Sekolah pendidikan dasar	15,95
19	Rasio Guru/Murid per kelas Rata tingkat SD/MI	16,04
20	Rasio Guru/Murid per kelas Rata tingkat SMP/MTs	11,35
21	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	4,181
22	Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	1.163
23	Penduduk yang berusia>15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	1.387
24	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	2.196
25	Angka Kelulusan Paket A (%)	-
26	Angka Kelulusan Paket B (%)	-
27	Angka Kelulusan Paket C (%)	-
II.I.II	KESEHATAN	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per1000 Kelahiran Hidup (%)	3/1000
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	100
3	Angka Kematian Balita Per1000 Kelahiran Hidup (%)	5/1000
4	Angka Kematian Neonatal Per1000 Kelahiran Hidup	3/1000
5	Angka Kematian Ibu per100.000 Kelahiran Hidup (%)	3/100.000
6	Angka Harapan Hidup (%)	65,8
7	Rasio posyandu per satuan balita (%)	1:48
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-
9	Rasio dokter persatuan penduduk	Dokter Umum=39:100.000 Dokter gigi= 14:100.000 Dokter spesialis=10:100.000
10	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Bidan=99.100.000 Perawat=235.100.1000 Apoteker=10.100.1000 Kesmas=38.100.1000
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	90

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
12	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (kasus)	702
14	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (%)	490
15	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per100.000 penduduk) (%)	76
16	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (Kasus)	90
17	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (Kasus)	90
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100
19	Penderita diare yang ditangani (Jiwa)	3742
20	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100
21	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	80
22	Cakupan puskesmas (%)	94
23	Cakupan pembantu puskesmas (%)	34
24	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	90
25	Cakupan pelayanan anak balita (%)	75
26	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	75
27	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100
28	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	90
29	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100
II.I.III	PEKERJAAN UMUM	
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	40,69
2	Rasio Jaringan Irigasi	44,6
3	Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	-
4	Persentase penduduk berakses air minum	60
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	15
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	56
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	60
8	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Unit)	-
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	104.106 m
10	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	503.106 km
11	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	-
12	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik(>40 KM/Jam)	10,47

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
13	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	7,65
II.I.IV	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	Rasio rumah layak huni	18,46
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,12
5	Persentase areal kawasan kumuh	3,77
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh	3,77
7	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	1,36
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	8,88
9	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (Lokasi)	4
10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	28,28
13	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	-
14	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah (%)	0
II.I.V	KETENTRAMAN, KETERTIBANUMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	80
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	90
3	Presentase Penegakan Perda	50
II.I.VI	SOSIAL	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social (%)	40
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	40
3	Jumlah warga KAT yang tertangani (KK)	-
4	Persentase PMKS yang tertangani	40
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, s erta Lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	60
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	30
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-
II.II	URUSAN WAJIB NON PELAYAN DASAR	
II.II.I	TENAGAKERJA	
1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (org)	87
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (org)	32
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (org)	10
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (org)	20
5	Keselamatan dan perlindungan (perusahaan)	65 (Badan usaha)

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (org)	500
7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (org)	3 (badan Usaha)
II.II.II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	40
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	1
3	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	80-80
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	90
5	Rasio KDRT	60
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	70-90
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit	10
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	70-90
9	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	50
II.II.III	KETAHANANPANGAN	
1	Ketersediaan energy dan protein per kapita	2.150
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100
II.II.IV	LINGKUNGAN HIDUP	
1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan.	5 kali pengaduan
2	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (desa)	6 desa
3	Penetapan hak MHA(%)	70
4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota(dok)	1 dokumen
5	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (dok)	2 dokumen
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (laporan)	32 kali
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (Dok)	5 dokumen
8	Timbulan sampah yang ditangani (m3)	4.001 ton

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
9	Persentase cakupan area pelayanan (%)	75
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	70
11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota (M3)	9642.3 (m2)
II.II.V	KEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIIL	
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	79.50
2	Rasio bayi ber akte kelahiran	70.30
3	Rasio pasangan ber akte nikah	10.50
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	73.500
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	73.500
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	63.517
7	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten (ada/tidak ada)	138.580
II.II.VI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	198
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	198
3	Persentase PKK aktif	198
4	Persentase Posyandu aktif	248
5	Persentase LSM aktif	-
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	80-10
II.II.VII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	80
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,8
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3
4	Rasio Akseptor KB	75
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	45
6	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20
7	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	100
8	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	10
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15 kec
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	198 desa
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	15 kec
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	15 kec

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	15
14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100
15	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	396
16	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100
II.II.VIII	PERHUBUNGAN	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	Perhari/560 orang
2	Rasio ijin trayek	6 Trayek
3	Jumlah Pelabuhan (Unit)	5 unit peyeberangan
4	Jumlah Terminal Bus (Unit)	1 unit
5	Jumlah Bandar Udara (Unit)	1 unit
6	Persentase layanan angkutan darat	75
7	Pemasangan Rambu-rambu	250
II.II.IX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	Cakupan Layanan Telekomunikas i(%)	40
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	87
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	93
4	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (%)	41
5	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan (%)	40
II.II.X	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	Presentase koperasi aktif	193
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	-
3	Persentase BPR/LKM aktif	-
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	4512
II.II.XI	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1	Rasio daya serap tenaga kerja	2,17
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	58
3	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp.41.305.019.475
II.II.XII	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0
2	Persentase wirausaha muda	0
3	Cakupan pembinaan olahraga	0
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0
6	Jumlah atlet berprestasi	0
7	Jumlah prestasi olahraga	0
II.II.XIII	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	8.400
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	24.000
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{400}{137,804/0.0029}$
4	Jumlahrata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (%)	$\frac{7.200/5.532}{1.51}$
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	12.000 judul
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	4 tenaga pustakawan
7	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	81
8	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	50 orang
II.II.XIV	KEBUDAYAAN	
1	Cakupan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	0
2	Jumlah Sanggar budaya	0
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0
4	Jumlah Jenis Seni dan Budaya	0
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0
7	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0
II.III	URUSAN PILIHAN	
II.III.I	PERIKANAN	
1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	23.560 Ton
2	Cakupan bina kelompok nelayan Tangkap	50%
3	Produksi perikanan kelompok nelayan Tangkap (ton)	100 Ton
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	61,71
5	Produksi perikanan Budidaya (ton)	130 Ton
6	Cakupan bina kelompok nelayan Budidaya (%)	70
7	Produksi perikanan kelompok nelayan Budidaya (ton)	3,6 ton/kelompok/tahun
8	Konsumsi ikan (Kg)	75kg/kapita
II.III.II	PARIWISATA	
1	Kunjungan wisata (Orang)	15,870
2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	5-6 Orang
II.III.III	PERTANIAN	
1	Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	36.03

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
2	Kontribusi sector pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	37.62
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya per hektar (Ton GKG)	-
4	Cakupan bina kelompok petani (%)	50
II.III.IV	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	-
3	Jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan	-
4	Jumlah IKM aktif (unit)	371
II.IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	
II.IV.I	SEKRETARIAT DAERAH	
1	Jumlah Perda dan Perbup	10 50
2	Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Pringkat 1.Nilai 5,25
3	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	B
II.IV.II	SEKRETARIAT DPRD	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapAlat- alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (ada/tidak)	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untukmelaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (ada/tidak)	ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (ada/tidak)	ada
II.IV.III	INSPEKTORAT	
1	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan (internal) yang diselesaikan	80
2	Presentase tindaklanjut hasil pengawasan BPK yang terselesaikan (status 1)	60
II.IV.IV	PERENCANAAN	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPDyang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah : RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD (%)	85
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	90

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan (%)	65
7	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	50
II.IV.V	KEUANGAN	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	21
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	15
4	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,25
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu
6	Presentase capaian PAD	80
II.IV.VI	KEPEGAWAIAN	
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	160
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	150
4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (bulan)	3
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	30
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	15
7	Presentasi Pelanggaran Pegawai	0
II.IV.VII	KECAMATAN BULA	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	3
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	100
II.IV.VIII	KECAMATAN SERAM TIMUR	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	3
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	16
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	100
II.IV.IX	KECAMATAN WERINAMA	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	3
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	100
II.IV.X	KECAMATAN SIWALALAT	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	10 desa
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	90
II.IV.XI	KECAMATAN BULA BARAT	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	80
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	13
4	Cakupan Koordinasipenyelenggaraanpemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XII	KECAMATAN TELU WARU	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XIII	KECAMATAN TUTUK TOLU	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	11
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XIV	KECAMATAN KIAN DARAT	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XV	KECAMATAN SIRATAUN WIDA TIMUR	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XVI	KECAMATAN PULAU GOROM	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	3
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	24
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	80
II. IV.XVII	KECAMATAN GOROM TIMUR	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2

NO	ASPEK/BIDANGURUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	23
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	80
II.IV.XVIII	KECAMATAN P. PANJANG	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	6
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XIX	KECAMATAN WAKATE	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok Binaan PKK	18
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XX	KECAMATAN TEOR	
1	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
2	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
3	Jumlah Kelompok BinaanPKK	10
4	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	75
II.IV.XXII	KECAMATAN KILMURY	
	Jumlah jenis administrasi pelayanan public (Jenis)	2
	Cakupan peran serta masyarakat dalam membangun desa (%)	100
	Jumlah Kelompok BinaanPKK	14
	Cakupan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	70
II.IV.XXIII	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
1	Presentase Penyelesaian kasus penanganan konflik sosial dan pengendalian keamanan lingkungan (%)	85
2	Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat (%)	75
3	Prosentase Pencegahan terjadinya konflik social di kalangan masyarakat (%)	75
4	Presentase penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat yang terlaksana (%)	50
5	Persentase Fasilitasi Ketahanan Sosial Budaya dan organisasi kemasyarakat yang terlaksana (%)	5

Tabel VI.5 Aspek Daya Saing Daerah
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	
III.I	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	
III.I.I	PERHUBUNGAN	
1	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	71
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Darat	560
3	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Laut	-
4	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Udara (Orang)	160
5	Jumlah tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	1 Lokasi parker 2 halte
III.II	PENATAAN RUANG	
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	-
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	-
III.III	IKLIM INVESTASI	
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Ribu Rupiah)	58

Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pembangunan dilakukan koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Selain itu, Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur selain ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat dan swasta untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 dapat terwujud secara optimal.

Selain hal tersebut di atas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintah daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang gambaran umum daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informasi publik, maka RKPD dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrument pengendalian, monitoring dan evaluasi. Adapun instrument pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Menurut tatacara pengendalian tersebut disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target - target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing-masing OPD. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya pada kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi juga mencakup tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Posisi OPD pada tatacara pengendalian ini menjadi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri. Diharapkan apabila terjadi

tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang lebih jauh, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang sangat penting.

Sehubungan dengan tatacara pengendalian tersebut diatas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing OPD agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.
2. OPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
6. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2025 setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas nasional

dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang focus dan sudah siap untuk dilaksanakan. Setelah RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 ditetapkan, tidak akan lagi menerima perubahan dalam RKPD baik perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan maupun pagu anggaran.

Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur secara menyeluruh


BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
ABDUL Mukti Keliobas